

SKRIPSI

**PENGUNGKAPAN *LOW CARBON ECONOMY* DITINJAU DARI
KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK, BIAYA LINGKUNGAN, DENGAN
INISIATIF HIJAU SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**



Diajukan oleh
Sisilia Lidia Ayemi
146220121057

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

2025

**PENGUNGKAPAN *LOW CARBON ECONOMY* DITINJAU DARI KEPEMILIKAN
SAHAM PUBLIK, BIAYA LINGKUNGAN, DENGAN INISIATIF HIJAU SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

SKRIPSI

**Dianjukan untuk ujian skripsi
Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh
Gelara Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGUNGKAPAN *LOW CARBON ECONOMY* DITINJAU DARI
KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK, BIAYA LINGKUNGAN, DENGAN
INISIATIF HIJAU SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

NAMA : Sisilia Lidia Ayemi

NIM : 146220121057

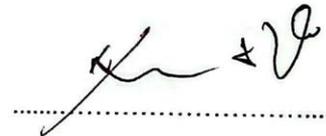
Telah disetujui oleh tim pembimbing

Pada, 24 Juni 2025

Pembimbing I

Yusron Dfinubun, S.E., M.Acc.

NIDN. 1407079001

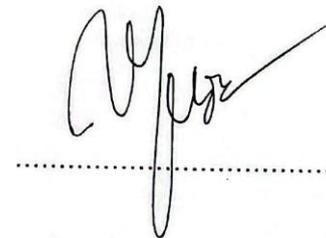


.....

Pembimbing II

Dr. Vebby Anwar, S. E., M. Si.

NIDN. 0915127503



.....

HALAMAN PENGESAHAN

PENGUNGKAPAN *LOW CARBON ECOCOMY* DITINJAU DARI KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK, BIAYA LINGKUNGAN, DENGAN INISIATIF HIJAU SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

NAMA : Sisilia Lidia Ayemi
NIM : 146220121057
WAKTU PENELITIAN : 22 April 2025 – 21 Mei 2025

Skripsi ini telah di uji oleh di uji oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 23 Juni 2025

Dewan Penguji Skripsi
Pembimbing Skripsi

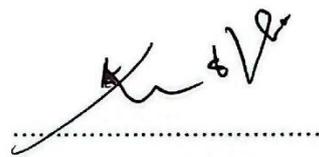
Yusron Difinubun, S.E., M.Acc.
NIDN. 1407079001

Ketua Penguji

Munzir, S. E., M. M
NIDN. 1409039302

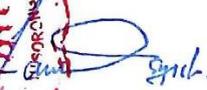
Anggota Penguji

Sabaria, S. E., M. M.
NIDN. 142406960



Sorong,
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnia dan Humaniora




Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si.
NIDN. 1419099401

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

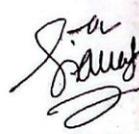
Nama : Sisilia Lidia Ayemi

NIM : 146220121057

Judul Skripsi : **Pengungkapan *Low Carbon Economy* Ditinjau Dari Kepemilikan Saham Publik, Biaya Lingkungan, Dengan Inisiatif Hijau Sebagai Variabel Intervening**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Sorong, 23 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Sisilia Lidia Ayemi

146220121057

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.”

(Amsal 3:5-6)

“Hidup ini seperti perjalanan panjang tanpa peta, kadang kita tersesat, jatuh, bahkan terluka begitu dalam, tapi bukan itu yang membuat kita gagal—melainkan jika kita berhenti melangkah, menyerah sebelum waktunya, dan lupa bahwa setiap ujian selalu menyimpan hadiah tersembunyi bagi mereka yang sabar menunggu”

-Tere Liye

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada: Kedua orang tuaku tercinta, yang doa, cinta, dan pengorbanannya menjadi cahaya di setiap langkahku. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar untuk tidak menyerah. Para dosen, yang telah menyalakan api ilmu dalam diriku, dan membimbingku dengan sabar meski aku tak selalu mudah diajar. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bahu tempat bersandar dan tawa di tengah kepenatan. Dan kepada diriku sendiri, yang telah bertahan, meski berkali-kali ingin menyerah. Terima kasih telah terus melangkah sejauh ini.

ABSTRAK

Sisilia Lidia Ayemi/146220121057. **PENGUNGKAPAN *LOW CARBON ECONOMY* DITINJAU DARI KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK, BIAYA LINGKUNGAN, DENGAN INISIATIF HIJAU SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***, Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Juni 2025.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*. (2) Untuk menganalisis pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*. (3) Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh Inisiatif Hijau. (4) Untuk menganalisis pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh Inisiatif Hijau. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Variabel penelitian ini terdiri atas variabel independen, dependen, dan mediasi yakni Kepemilikan Saham Publik terhadap variabel Pengungkapan *Low Carbon Economy*, variabel Biaya Lingkungan terhadap variabel Pengungkapan *Low Carbon Economy*, variabel Kepemilikan Saham Publik dan variabel Biaya Lingkungan terhadap variabel Pengungkapan *Low Carbon Economy* dimediasi oleh Inisiatif Hijau. Sampel data penelitian ini adalah 42 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang meliputi PROPER (*Public Disclosure Program for Environmental Compliance*). Penelitian ini menggunakan teknik *Judgement Sampling* dan metode analisis PLS (*Partial Least Square*), data diolah menggunakan Software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*. Biaya Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*. Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh Inisiatif Hijau. Biaya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh Inisiatif Hijau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan ilmiah, mendorong peningkatan transparansi perusahaan dalam pelaporan lingkungan, mendukung pemerintah dalam perumusan kebijakan ramah lingkungan, serta menjadi acuan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepemilikan Saham Publik, Biaya Lingkungan, Akuntansi Hijau, *Low Carbon Economy*, Inisiatif Hijau

ABSTRACT

Sisilia Lidia Ayemi/146220121057. **DISCLOSURE OF LOW CARBON ECONOMY IN TERMS OF PUBLIC SHARE OWNERSHIP, ENVIRONMENTAL COSTS, WITH GREEN INITIATIVES AS INTERVENING VARIABLES GREEN INITIATIVE AS AN INTERVENING VARIABLE**, Thesis, Faculty of Business Economics and Humanities. Muhammadiyah Sorong University of Education. June 2025.

The objectives of this study are: (1) To analyze the effect of Public Share Ownership on Low Carbon Economy disclosure. (2) To analyze the effect of Environmental Costs on the disclosure of Low Carbon Economy. (3) To analyze the effect of Public Share Ownership on the disclosure of Low Carbon Economy mediated by Green Initiative. (4) To analyze the effect of Environmental Costs on the disclosure of the Low Carbon Economy mediated by Green Initiative. This research is descriptive quantitative research. This research variable consists of independent, dependent, and mediation variables, namely Public Share Ownership on the Low Carbon Economy disclosure variable, Environmental Costs variable on the Low Carbon Economy disclosure variable, Public Share Ownership variable and Environmental Costs variable on the Low Carbon Economy disclosure variable mediated by Green Initiative. The data sample of this study is 42 companies listed on the Indonesia Stock Exchange which includes PROPER (Public Disclosure Program for Environmental Compliance). This study uses Judgement Sampling technique and PLS (Partial Least Square) analysis method, the data is processed using SmartPLS 4.0 software. The results showed that Public share ownership has a positive and significant effect on Low Carbon Economy Disclosure. Environmental Costs have a positive and significant effect on Low Carbon Economy Disclosure. Public Share Ownership has a positive and significant effect on the disclosure of Low Carbon Economy mediated by Green Initiative. Environmental Costs have a positive and significant effect on the disclosure of the Low Carbon Economy mediated by Green Initiative. This research is expected to contribute as a scientific reference material, encourage increased corporate transparency in environmental reporting, support the government in formulating environmentally friendly policies, and become a reference for investors in making sustainable investment decisions.

Keywords: Public Share Ownership, Environmental Costs, Green Accounting, Low Carbon Economy, Green Initiatives

KATA PENGANTAR

Assalamualaiakum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Pengasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PENGUNGKAPAN LOW CARBON ECONOMY DITINJAU DARI KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK, BIAYA LINGKUNGAN, DENGAN INISIATIF HIJAU SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”**.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Penelitian ini berhasil selesai berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan moril maupun dukungan finansial. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, terima kasih telah memberikan kesempatan penulis menempuh pendidikan di kampus UNIMUDA Sorong tercinta.
3. Bapak Fuad Ardiansyah, S. Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
4. Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
5. Ibu Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., CPA., Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan

Muhammadiyah Sorong.

6. Bapak Yusron Difininubun, M.Acc. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Vebby Anwar, S.E, M. Si. selaku dosen pembimbing II skripsi penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan dan pengetahuan berharga yang bapak/ibu berikan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang telah memberikan pengajaran dan berbagi pengetahuan kepada penulis.
8. Teristimewa kedua orangtua penulis Bapak Riki Ayemi dan Ibu Mariana Warami yang selalu memanjatkan do'a dan mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat serta memberikan dukungan penuh baik moral dan materil tak terhingga untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi sarjana hingga selesai. Terima kasih sudah mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran dan hal lainnya untuk mengantarkan penulis sampai dititik ini. Karya sederhana ini dan gelar sarjana penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kalian dan diberikan berkat melimpah, panjang umur dan selalu diberikan kesehatan agar terus menemani setiap langkah baru penulis dikemudian hari.
9. Kakakku tersayang Joice Ayemi, terima kasih banyak telah menyediakan kepalanya untuk penulis dalam melewati masa sulit sekaligus menjadi teman berdiskusi setiap saat dan terima kasih sudah hadir menjadi '*Role model*' penulis dalam menjalankan setiap proses di kehidupan ini.
10. Asik tercinta Jonathan Ayemi terima kasih sudah hadir menjadi anak baik yang selalu menghibur penulis dengan tingkah random kalian disaat penyelesaian skripsi ini.

11. Irma Munira Bafadal dan Priskila Pasaribu, teman adu nasib yang telah menemani penulis merealisasikan keinginan random setiap saat.
12. Teman seperjuangan satu jurusan Akuntansi angkatan 2020, yang selalu kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta saling memberikan dukungan selama menempuh perkuliahan. Terima kasih sudah berani berjuang bersama dan mewujudkan harapan orang tua. Kalian hebat!!. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
13. Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri, Sisilia, seorang perempuan sederhana yang tak pernah berhenti berjuang meskipun jalan sering kali tak mudah ditebak. Terima kasih telah bertahan, melewati banyak proses penuh tantangan, dan tetap memilih untuk melangkah maju. Terima kasih karena telah berani bermimpi, mengambil langkah besar sebagai sarjana, dan menyelesaikan perjalanan ini dengan penuh tanggung jawab. Perjalanan menuju skripsi ini bukan soal akademik, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri, belajar bersabar, dan terus mencoba meskipun ingin menyerah. Sisilia, kamu sudah bekerja keras, dan layak untuk bangga. Semoga ini menjadi awal dari langkah-langkah besar selanjutnya dalam hidup.

Penulis dengan tulus menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam memperluas pengetahuan dan sumber informasi bagi yang membutuhkan.

Sorong, 24 Juni 20225
Penulis,

(Sisilia Lidia Ayemi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SUB JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Definisi Operasional.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Kajian Teori	17
2.2 Kerangka Pikir	30
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian	39
3.3 Desain Penelitian.....	40
3.4 Populasi Dan Sampel.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.2 Pembahasan.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	83
5.1 Simpulan	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel.....	16
Tabel 2. Indikator <i>Low Carbon Economy</i>	26
Tabel 3. Interval Skor Penilaian.....	26
Tabel 4. Indikator Kepemilikan Saham Publik.....	27
Tabel 5. Indikator Biaya Lingkungan.....	28
Tabel 6. Indikator Inisiatif Hijau.....	29
Tabel 7. Kalender Kegiatan.....	41
Tabel 8. Kriteria Sampel Penelitian.....	43
Tabel 9. Perusahaan Sampel Penelitian.....	44
Tabel 10. Hasil Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 11. Hasil Pengujian <i>Convergent Validity</i>	53
Tabel 12. Hasil Pengujian <i>Discriminant Validity (Cross Loading)</i>	54
Tabel 13. Hasil Uji <i>Discriminant Validity (Fornell-Lacker Criterion)</i>	54
Tabel 14. Hasil Pengujian <i>Average Variance Extracted</i>	55
Tabel 15. Hasil Pengujian <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach's Alpha</i>	56
Tabel 16. Hasil Uji <i>R-square (R²)</i>	56
Tabel 17. Hasil Pengujian Hipotesis.....	58

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1. Distribusi Emisi Gas Rumah Kaca	5
Diagram 1. Negara Penyumbang Emisi	1
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.	30
Gambar 2. Desain Penelitian.	42
Gambar 3. <i>Outer Model</i>	52
Gambar 4. <i>Outer Bootstrapping</i>	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Sampel Data Perusahaan mengikuti PROPER	113
Lampiran 1.2 Tabulasi Data Perusahaan	114
Lampiran 1.3 Hasil Analisis Data	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis lingkungan muncul saat terjadi ketidakseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan usaha untuk melestarikannya (Penuelas et al., 2023). Krisis lingkungan terjadi akibat aktivitas dan tindakan manusia yang menyebabkan perubahan iklim (*human-caused climate change*) (Trenberth, 2018), banjir, tanah longsor, hilangnya hutan (deforestasi), serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri dan sampah plastik, ditambah polusi udara dari aktivitas pabrik dan pertambangan (Sukumaran, 2022). Lembaga antar pemerintah yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), menerbitkan sebuah laporan pada bulan Maret 2023 (Kaplan, 2023). IPCC menyatakan bahwa krisis iklim semakin memburuk dengan cepat, yang berdampak pada meningkatnya intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia, seperti gelombang panas, kekeringan, curah hujan tinggi, hingga badai tropis (Steratore, 2019).

Menurut laporan *Environmental Performance Index* (EPI), kinerja Indonesia dalam upaya pelestarian lingkungan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia Pasifik (Lin et al., 2024). EPI mengevaluasi sejauh mana keberlanjutan lingkungan diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan mengacu pada tiga indikator utama dalam pelestarian lingkungan: Kesehatan Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Keberlanjutan Ekosistem (Senir, 2024). Berdasarkan indikator tersebut, penilaian dilakukan menggunakan skala skor 0-100. Indonesia

menempati peringkat ke-164 dari 180 negara dengan skor 28,2 dari 100 (Novemyanto & Nazri, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia tengah menghadapi kondisi yang mengharuskan perhatian khusus terhadap potensi ancaman krisis lingkungan (J. D. Smith et al., 2024). Akibatnya, fenomena seperti pemanasan global dan perubahan iklim semakin memperburuk keadaan bumi serta menjadi salah satu penyebab utama terjadinya krisis lingkungan yang serius (Kumar et al., 2024).

Menurut Angus dan Butler, umat manusia sedang mengalami krisis lingkungan dengan skala yang sangat besar (Burdon & Martel, 2023);(Sujatmiko et al., 2024). Perhatian utama tertuju pada pemanasan global, namun di sisi lain, aktivitas manusia turut memperburuk pencemaran di sungai, danau, dan lautan (Edo et al., 2024). Ketersediaan air bersih terus menurun, bahkan menurut Angus dan Butler, kondisi ini digambarkan sebagai “*exhausting*,” yang berarti persediaan air bersih semakin terkuras habis (Acquafredda, 2024);(Nurfatimah & Difinubun, 2024). Keberadaan manusia justru mengakibatkan kerusakan kesuburan tanah, hilangnya ribuan spesies, serta membebani proses ekologi yang seharusnya menjaga keseimbangan biosfer selama ribuan tahun (Srivastav, 2024). Berdasarkan pandangan tersebut, penulis berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat mencegah krisis lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan pencegahan sejak dini terhadap peningkatan emisi karbon melalui penerapan *Low Carbon Economy* di perusahaan (Hu & He, 2024).

Secara teori, penerapan *Low Carbon Economy* di perusahaan didasarkan pada dukungan Teori Legitimasi (Rohani & Jabbour, 2024). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan wajib mengikuti norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat (Gezgin et al., 2024). Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari kontrak sosial perusahaan untuk

mempertahankan legitimasi di mata masyarakat (Tetteh et al., 2024). Pengungkapan penerapan *Low Carbon Economy* oleh perusahaan mencerminkan komitmen perusahaan dalam mematuhi norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat (S. Wang et al., 2024). *Low carbon economy* adalah aktivitas ekonomi yang secara drastis menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Gbadeyan et al., 2024). Tujuan utama dari *Low Carbon Economy* adalah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan karbon dioksida (CO₂) (Lugo-Morin, 2021). Menurut penelitian (Rehman et al., 2023);(Difinubun & Nastiti, 2024), emisi karbon memiliki hubungan secara langsung terkait dengan emisi GRK yang memicu perubahan iklim baik di tingkat global maupun nasional. Menurut (Arisanti et al., 2024), Indonesia merupakan Salah satu negara dengan jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) tertinggi di dunia. Negara-negara maju menerapkan strategi pengurangan emisi karbon melalui sistem perdagangan karbon (Oke et al., 2024).

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41% pada tahun 2030 dengan dukungan dari komunitas internasional (Puteri, 2024). Indonesia menargetkan untuk mencapai emisi nol bersih (*net-zero emission*) pada tahun 2060 sebagai bagian dari komitmennya terhadap pengendalian perubahan iklim (Kuncoro et al., n.d.). Komitmen tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Panjang untuk Mewujudkan Pembangunan Rendah Emisi dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Menuju Tahun 2050 (Fam & Fam, 2024). Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menurunkan emisi sebesar 50% dalam skenario *business as usual*, dengan catatan adanya dukungan kuat dari masyarakat global (Nurhayati et al., 2024). Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon menetapkan sejumlah

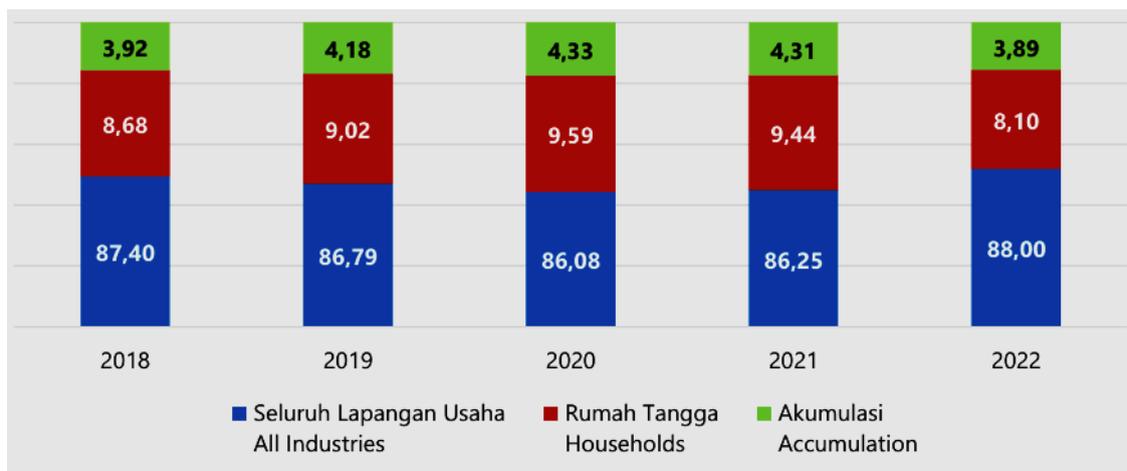
mekanisme yang perlu dijalankan dalam implementasi perdagangan maupun non-perdagangan karbon (Purnamasari & Nurachmah, 2023). Skema perdagangan karbon diterapkan melalui mekanisme cap and trade serta offsetting, sedangkan instrumen non-perdagangan mencakup pungutan karbon dan mekanisme pembayaran yang didasarkan pada pencapaian hasil (*result-based payment/RBP*) (Tektona et al., 2025).

Namun, berdasarkan pengamatan penulis terhadap isu ini, terdapat sejumlah fenomena yang menunjukkan bahwa penerapan ekonomi rendah karbon di tingkat perusahaan masih belum berlangsung secara optimal (Abbas et al., 2024). Hal ini tercermin dari tingginya kontribusi emisi karbon yang berasal dari berbagai sektor industri di Indonesia, mulai dari kegiatan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, hingga sektor Penyediaan Listrik dan Gas, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh berbagai institusi, baik di sektor industri maupun rumah tangga (Rokhmawati et al., 2024).

Berdasarkan laporan *Indonesia Energy Flow Accounts* tahun 2018 hingga 2022, sektor industri atau lapangan usaha menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca (GRK), dengan rata-rata andil mencapai 86,90 persen selama lima tahun tersebut (Lim et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang bersifat produktif menyumbang secara signifikan terhadap total emisi GRK pada skala nasional (Bhatti et al., 2024). Di sisi lain, kontribusi emisi GRK yang berasal dari sektor rumah tangga dan akumulasi secara berturut-turut memberikan kontribusi rata-rata sebesar 8,97 persen dan 4,13 persen (Mishra, n.d.). Di tahun 2022, emisi GRK yang berasal dari semua sektor usaha menunjukkan kenaikan kecil dibandingkan periode sebelumnya, dengan total kontribusi sebesar 88,00 persen (Akash et al., 2024). Sebaliknya, pada tahun 2022,

kontribusi emisi GRK dari sektor rumah tangga dan akumulasi cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 8,10 persen dan 3,89 persen secara berurutan (Bertoli et al., 2024). Sebagaimana di gambarkan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 1. Distribusi Emisi Gas Rumah Kaca (persen), 2018–2022



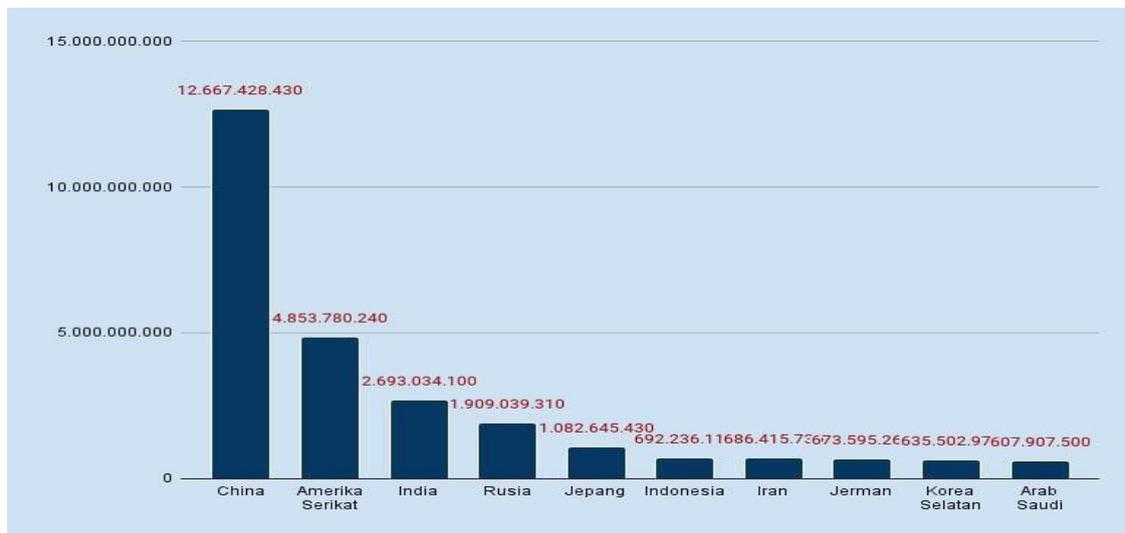
Sumber: Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK Indonesia (2024)

Berdasarkan data pada tabel di atas, secara umum emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor usaha dalam perekonomian menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan jumlah mencapai 887.233 Gg CO₂e pada tahun 2022.

Selama periode 2018–2022, Kontribusi emisi terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik serta Gas, diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Transportasi (Saragih et al., 2024). Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan ekonomi rendah karbon di kalangan perusahaan masih belum mencapai tingkat yang maksimal (Luo et al., 2024). Sementara itu, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara penyumbang emisi GRK terbesar di dunia, dengan total emisi mencapai 692 juta ton CO₂e, atau sekitar 1,80%

dari keseluruhan emisi GRK global (Priyanto et al., n.d.). Sebagaimana di gambarkan sebagai berikut.

Diagram 1. Negara Penyumbang Emisi



Sumber: CO2 Emissions by Country (2022)

Dalam diagram diatas dijelaskan dalam penelitian (Tirto, 2024), Diagram ini mengilustrasikan bahwa Tiongkok, Amerika Serikat, dan India adalah tiga negara dengan kontribusi emisi karbon terbesar di dunia. Meskipun Indonesia berada di peringkat keenam, negara ini mengalami peningkatan emisi yang signifikan, yang menekankan pentingnya upaya lebih lanjut dalam pengelolaan dan pengurangan emisi karbon.

Fenomena ini mengisyaratkan bahwa isu-isu lingkungan seperti pelaporan emisi karbon, performa lingkungan, dan tanggung jawab perusahaan harus mendapat perhatian utama dari para pemangku kepentingan (Fina et al., 2024). Penelitian dari (Lu et al., 2024), menunjukkan bahwa pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK) memiliki dampak positif terhadap reaksi para investor. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memperoleh legitimasi dan memperkuat citra positif di mata investor,

yang pada akhirnya mendukung kelangsungan operasional dan keberlanjutan bisnis mereka (Fadilla & Yenti, 2024).

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan ekonomi rendah karbon di perusahaan, yang meliputi tiga faktor utama, yaitu Kepemilikan Saham Publik, Biaya Lingkungan, dan Inisiatif Hijau (Singhania & Bhan, 2024). Kepemilikan saham publik merujuk pada jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat luas. Saham tersebut dapat diperjualbelikan oleh perusahaan kepada para investor (Alifi & Kurniawati, 2024). Investor biasanya mempertimbangkan analisis laporan keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk membeli saham (Tracy, 2024). Laporan perusahaan yang jelas, lengkap, dan informatif mengenai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dapat memberikan indikasi positif kepada publik (Dagestani et al., 2024). Kepemilikan saham tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki berbagai hak dan kewajiban (MacLeod, 2024). Investor publik memiliki kewajiban berdasarkan perannya dalam perusahaan, dan seharusnya berhak mendapatkan akses informasi tentang kinerja perusahaan (Vazhynskyi et al., 2024).

Secara konsep, hubungan antara kepemilikan saham publik dan pengungkapan ekonomi rendah karbon dapat dijelaskan melalui dua teori, yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi (Ali et al., 2024). Berdasarkan pandangan teori stakeholder, tanggung jawab perusahaan meliputi tidak hanya pemegang saham, tetapi juga semua pihak yang terhubung atau terdampak oleh kegiatan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Talan et al., 2024). Dengan meningkatnya tuntutan dari pemangku kepentingan untuk transparansi dan akuntabilitas, perusahaan diwajibkan untuk memasukkan aspek lingkungan dalam strategi bisnis mereka dan menyampaikan

informasi yang relevan kepada publik (Reid et al., 2024). Perubahan ini menekankan pergeseran peran pemangku kepentingan dalam memengaruhi tindakan perusahaan serta mendorong tercapainya hasil sosial yang lebih positif (Alshukri et al., 2024). Menurut teori legitimasi, organisasi atau perusahaan perlu menyelaraskan aktivitasnya dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat agar dapat berkembang dan bertahan (Zhang, 2024). Untuk memperkecil kesenjangan legitimasi, perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai emisi karbon serta dampak lingkungan yang dihasilkan (Nishitani et al., 2024). Melalui penyajian transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi rendah karbon, perusahaan dapat memperlihatkan keseriusannya dalam menjalankan tanggung jawab lingkungan serta mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan (Di Vaio et al., 2024). Secara ringkas, legitimasi berperan dalam memperkuat posisi perusahaan, membangun hubungan yang solid, serta mendukung keberlanjutan operasionalnya di pasar (Gomez-Trujillo et al., 2024).

Pertama, tingginya konsentrasi kepemilikan saham publik berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan kinerja perusahaan (Torres et al., 2024). Perusahaan dengan kinerja yang solid biasanya lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi, mampu menarik perhatian investor, serta menjaga hubungan yang seimbang antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Nasution et al., 2024).

Kedua, Biaya lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *low carbon economy*. Biaya lingkungan adalah pengeluaran yang perlu dikeluarkan perusahaan akibat dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasionalnya, serta untuk mendukung upaya-upaya perlindungan lingkungan yang direncanakan (Li et al., 2024). Pernyataan yang sejalan juga diungkapkan oleh (G. Wu et al., 2024), Biaya

lingkungan merujuk pada pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk mendanai program-program perbaikan lingkungan sebagai konsekuensi dari pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Biaya lingkungan sebaiknya disajikan secara terpisah sesuai dengan klasifikasi masing-masing jenis beban yang ditanggung (Andersen et al., 2024). Langkah ini diambil untuk memungkinkan evaluasi kinerja operasional perusahaan secara lebih optimal, khususnya yang berhubungan dengan dampak terhadap lingkungan (Abid et al., 2024).

Secara teoritis, keterkaitan antara biaya lingkungan dan ekonomi rendah karbon dapat dijelaskan melalui dua pendekatan utama, yakni teori stakeholder dan teori legitimasi (Meutia et al., 2022). Menurut teori stakeholder, perusahaan berkewajiban tidak hanya kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh operasional perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (P. A. Sari et al., 2024). Dengan meningkatnya tuntutan dari para pemangku kepentingan akan transparansi dan akuntabilitas, perusahaan diharuskan mengungkapkan biaya lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dalam menjalankan strategi bisnisnya, sekaligus menyampaikan informasi yang relevan kepada publik (Saeed et al., 2024). Perubahan tersebut menyoroti pergeseran peran pemangku kepentingan dalam membentuk perilaku perusahaan dan mendorong tercapainya dampak sosial yang positif (Dimingu & Mogaji, 2024). Berdasarkan teori legitimasi, sebuah organisasi atau perusahaan perlu memenuhi syarat tertentu agar dapat berkembang dan tetap bertahan, aktivitas yang dijalankan perlu disesuaikan dengan norma, nilai, serta harapan sosial yang berlaku di masyarakat (Al Sayed & Sayed, 2024). Kesesuaian aktivitas perusahaan dengan norma sosial tercermin melalui alokasi proporsi

biaya yang seimbang antara kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan non lingkungan (Ren, 2024). Untuk mengurangi kesenjangan legitimasi, perusahaan perlu mengungkapkan data mengenai emisi karbon serta dampak lingkungan yang ditimbulkan (Cai et al., 2024). Melalui transparansi dan akuntabilitas dalam hal ekonomi rendah karbon serta pengelolaan biaya lingkungan (Zhu et al., 2024), Perusahaan dapat menegaskan keseriusannya dalam menjalankan tanggung jawab lingkungan dan memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan (Can & Turker, 2024). Secara ringkas, memperoleh legitimasi berperan dalam memperkuat posisi perusahaan, membina hubungan yang solid, serta mendukung keberlanjutan operasional di pasar (Rivero-Gutiérrez et al., 2024).

Selain kepemilikan saham publik dan biaya lingkungan, faktor lain yang turut memengaruhi pengungkapan *low carbon economy* adalah inisiatif hijau (Q. Wu, 2024). Inisiatif hijau merujuk pada program dan langkah-langkah yang dirancang untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak ekologis dari kegiatan manusia (Nketiah et al., 2024). Langkah-langkah dalam inisiatif ini mencakup proyek energi terbarukan, desain bangunan hijau, transportasi yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang efektif, dan praktik bisnis yang mendukung keberlanjutan lingkungan (Dhayal et al., 2024). Pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat semakin giat mendukung inisiatif hijau sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, mengatasi perubahan iklim, dan mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan (Shan & Ji, 2024). Inisiatif hijau diharapkan mampu mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan, sebab tindakan-tindakan tersebut turut mendukung penerapan manajemen energi, konservasi air, serta pengelolaan limbah yang lebih efisien (Khalil et

al., 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inisiatif hijau adalah program atau kegiatan yang dilakukan perusahaan secara resmi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta melakukan upaya perbaikan lingkungan (Karman et al., 2024).

Secara teori, pengaruh inisiatif hijau terhadap *low carbon economy* dapat dijelaskan melalui dua teori, yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi (X. Liu et al., 2024). Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban tidak hanya kepada pemegang sahamnya, tetapi juga kepada semua pihak yang terkena dampak atau berpengaruh terhadap perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Corazza et al., 2024). Menurut teori stakeholder, perusahaan bertanggung jawab bukan hanya kepada para pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terpengaruh oleh atau memengaruhi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Lei et al., 2024). Perubahan ini menyoroti pergeseran peran pemangku kepentingan dalam memengaruhi tindakan perusahaan serta mendorong tercapainya dampak sosial yang positif. (Kiladze et al., 2024). Menurut teori legitimasi, supaya organisasi atau perusahaan dapat tumbuh dan bertahan, mereka harus menyesuaikan kegiatan mereka dengan norma, nilai, serta ekspektasi sosial yang berlaku (Selin, 2024). Keselarasan aktivitas perusahaan dengan norma tercermin melalui kebijakan inisiatif hijau. Untuk mengurangi kesenjangan legitimasi, perusahaan perlu memberikan informasi terkait emisi karbon dan dampak lingkungan yang dihasilkan (Velte, 2024). Dengan menyediakan transparansi dan akuntabilitas terkait ekonomi rendah karbon dan inisiatif hijau perusahaan berpotensi untuk mengungkapkan komitmennya terhadap tanggung jawab lingkungan serta memperoleh legitimasi di mata para pemangku kepentingan (Morrison et al., 2024). Singkatnya, perolehan legitimasi berperan dalam

memperkuat posisi, hubungan, dan keberlanjutan perusahaan di pasar (Weniger & Jarchow, 2024). Dampak inisiatif hijau terhadap ekonomi rendah karbon sesuai dengan hasil penelitian dari (Nurseha et al., 2024), yang menyatakan bahwa inisiatif hijau berdampak positif pada kinerja perusahaan.

Penelitian ini menghadirkan aspek kebaruan dan orisinalitas melalui kajian terhadap *Pengungkapan Low Carbon Economy* ditinjau dari kepemilikan saham publik, biaya lingkungan dan inisiatif hijau pada Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berpartisipasi dalam program PROPER (*Public Disclosure Program for Enviromental Compliance*) dan telah mempublikasikan laporan tahunan mereka. Dalam laporan LCDI Bappenas (2024), sektor energi diidentifikasi sebagai salah satu penyebab terbesar emisi GRK global. Berdasarkan data IEA, jumlah emisi dari sektor ini meningkat tiga kali lipat selama dua dekade terakhir, mencapai 33 Gigaton CO₂ dan berkontribusi sebesar 36% terhadap total emisi global (Utami, 2021). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menyusun strategi terkini untuk mendorong dunia usaha memprioritaskan pengelolaan limbah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (M. L. Ramadhan et al., 2024). PROPER merupakan penilaian terhadap kinerja lingkungan perusahaan, meskipun saat ini belum ada regulasi khusus yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan dan menerapkan ESG dalam laporan keberlanjutan mereka (Moussa & Elmarzouky, 2024). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam PROPER serta telah menyampaikan laporan tahunan, untuk mengkaji sejauh mana kontribusi mereka terhadap emisi (Yustina et al., 2024). Penelitian ini dikembangkan berdasarkan temuan sebelumnya dari penelitian (Uswatul et al., 2024) yang menunjukkan bahwa

pengungkapan ESG berdampak negatif terhadap implementasi ekonomi rendah karbon (LCE). Meski awalnya berdampak negatif, pengungkapan ESG menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap LCE setelah dimediasi oleh Inisiatif Hijau (Qing et al., 2024). Penelitian ini mengisi kesenjangan literature terkait *Pengungkapan Low Carbon Economy* ditinjau dari kepemilikan saham publik, biaya lingkungan dan inisiatif hijau, hal tersebut turut memperkaya wawasan mengenai bagaimana pengungkapan *sustainability reporting* berperan dalam mewujudkan komitmen *Net Zero Emission* tahun 2060.

Penelitian ini memiliki novelty antara lain Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada faktor internal perusahaan seperti kinerja keuangan dan tata kelola dalam pengungkapan *Low Carbon Economy*. Penelitian ini menyajikan perspektif baru dengan mengevaluasi dampak kepemilikan saham publik dan beban biaya lingkungan terhadap transparansi dalam penerapan *Low Carbon Economy*. Riset sebelumnya lebih banyak membahas inisiatif hijau sebagai kebijakan perusahaan tanpa menghubungkannya secara langsung sebagai mediator dalam hubungan antara kepemilikan saham publik, biaya lingkungan, dan pengungkapan *Low Carbon Economy*. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dengan menguji apakah inisiatif hijau berperan sebagai penghubung yang memperkuat dampak partisipasi kepemilikan oleh publik dan beban ekologis terhadap keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai *Low Carbon Economy*.

Berdasarkan fenomena dan celah riset yang telah diungkapkan mengenai *Pengungkapan Low Carbon Economy* hal ini dilihat dari perspektif kepemilikan saham publik, biaya lingkungan, dan inisiatif hijau (D. Wu & Xie, 2024). Penulis bermaksud

melakukan pengujian lanjutan penelitian (Uswatul et al., 2024) guna mengevaluasi konsistensi temuan melalui peningkatan jangkauan data sampel serta penambahan variabel baru dalam analisis. Penelitian yang dimaksud berjudul “*Pengungkapan Low Carbon Economy* ditinjau dari kepemilikan saham publik, biaya lingkungan dengan Inisiatif Hijau sebagai variabel intervening”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, berikut adalah rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy*?
2. Apakah Biaya Lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy*?
3. Apakah Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh inisiatif hijau?
4. Apakah biaya lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh inisiatif hijau?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy*.
2. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy*.

3. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh inisiatif hijau.
4. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh inisiatif hijau.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menjadi kajian terkini dan dapat memberikan manfaat bagi akademisi sebagai tambahan literature review serta membentuk landasan teoritis yang lebih kokoh dalam pengembangan konseptual akuntansi keberlanjutan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan praktis agar membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, membangun keberlanjutan bisnis dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melakukan investasi pada perusahaan.

1.5 Definisi Operasional

Untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, penelitian ini menggunakan operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Oprasional Variabel

No	Nama Variabel	Jenis Variabel	Indikator Pengukuran	Sumber
1.	<i>Low Carbon Economy</i>	Variabel Independen	$GHG = \frac{Total\ Skor\ Perusahaan\ Periode\ T}{Total\ Skor\ Maksimum}$	Gabrielle & Toly, 2019 dalam Uswatul, et all (2024)
2.	Kepemilikan Saham Perusahaan	Variabel Independen	$KSP = \frac{Jumlah\ Kepemilikan\ Saham\ Publik}{Total\ Lembar\ Saham\ Perusahaan} \times 100\%$	Rahmadhani et al. (2021)
3.	<i>Biaya Lingkungan</i>	Variabel Dependen	$Biaya\ Lingkungan = \frac{Environmental\ Cost}{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}$	Siagian, A. O. (2021).
4.	Inisiatif Hijau	Variabel Moderasi	$Indeks\ ESG\ GRI\ G4 = \frac{Nilai\ Pengungkapan\ ESG}{Total\ Pengungkapan} \times 100\%$	Husada & Handayani, 2021 dalam Uswatul, 2024

Sumber: (Uswatul et al., 2024)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu entitas, seperti perusahaan, harus mematuhi kontrak serta norma-norma sosial yang berlaku dalam menjalankan aktivitasnya (Fornasari & Traversi, 2024). Menurut (Ghozali, 2020) Teori legitimasi menekankan bahwa suatu entitas atau organisasi, termasuk perusahaan, memiliki tanggung jawab untuk terus memastikan bahwa seluruh kegiatannya dianggap sah dan sesuai dengan batasan, norma, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Teori ini didasarkan pada konsep “kontrak sosial” (Moehler & Thrasher, 2024), yang menyiratkan bahwa kegiatan operasional perusahaan harus sejalan dengan ekspektasi masyarakat. Artinya, perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, seperti menjaga lingkungan, memperhatikan kesehatan, dan menjamin keselamatan para karyawan. Kontrak sosial ini mengandung arti bahwa aktivitas operasional perusahaan harus mencerminkan harapan masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menangani berbagai isu sosial, seperti pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keselamatan tenaga kerja. Kegagalan perusahaan dalam menjawab ekspektasi masyarakat dapat menyebabkan hilangnya legitimasi dari lingkungan sosialnya (Spanuth & Urbano, 2024). Apabila perusahaan gagal memenuhi harapan masyarakat, maka masyarakat dapat memberikan sanksi berupa pembatasan secara hukum, keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti pendanaan dan tenaga

kerja, serta aksi boikot dari konsumen yang ditunjukkan melalui penurunan permintaan terhadap produk perusahaan (Sullivan & Robinson, 2017).

(Elfeky,2017) Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu memperluas pengungkapan informasi secara sukarela, mengingat adanya kontrak sosial yang mengikat antara perusahaan dan masyarakat. Pengungkapan tersebut diperlukan guna menjamin bahwa perusahaan menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai etika yang dianut oleh masyarakat. Pengungkapan informasi secara sukarela, seperti laporan terkait aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Faisal et al., 2018), hal ini diperlukan karena pengungkapan yang bersifat wajib belum mampu memberikan informasi yang cukup bagi para pemangku kepentingan untuk memahami kondisi sebenarnya dari perusahaan (Elfeky, 2017). Perusahaan harus menyampaikan pengungkapan ini kepada publik melalui dokumen yang dapat dengan mudah diakses, seperti *annual report*. Menurut (Cadiz Dyball, 1998), laporan tahunan dapat memberikan bantuan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai sejauh mana kegiatan perusahaan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

(Mousa & Hassan, 2015), Juga mengungkapkan bahwa teori legitimasi merupakan sebuah konsep kerangka yang dibangun atas dasar hubungan sosial dan pertukaran antara masyarakat dengan perusahaan. Konsep kerangka ini bertujuan untuk menjelaskan peran entitas, seperti perusahaan, dalam mengungkapkan aktivitas yang berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan tertentu. Perusahaan dapat menyampaikan hasil tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat melalui laporan sosial dan lingkungan, salah satunya adalah laporan ESG.

Pengelolaan legitimasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menyesuaikan praktik bisnis agar sejalan dengan nilai dan harapan masyarakat, sehingga dapat membentuk atau mengubah persepsi publik terhadap perusahaan (Melinda & Wardhani, 2020). Dalam teori legitimasi, terdapat konsep kontrak sosial yang menekankan bahwa setiap tindakan perusahaan harus dapat diterima oleh masyarakat luas, atau setidaknya memperoleh pengakuan dari pihak eksternal agar dianggap sah secara sosial (Caesaria & Basuki, 2017). Organisasi dalam perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat (König & Wenzelburger, 2021). Dengan terciptanya keselarasan nilai dan standar antara perusahaan dan masyarakat, perusahaan dapat memperoleh pengakuan dari publik. Hal ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan perusahaan dan mendukung pencapaian kinerja yang lebih unggul (Lelkes, 2016).

Teori ini menekankan bahwa suatu organisasi atau entitas harus secara berkelanjutan menunjukkan bahwa operasionalnya sejalan dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, serta memastikan bahwa aktivitasnya memperoleh penerimaan atau legitimasi dari pihak eksternal (Tjahjono, 2024). Pada tahun 1975, Dowling dan Pfeffer menjadi pelopor dalam memperkenalkan teori legitimasi, menitikberatkan pada pentingnya hubungan antara dunia bisnis dan lingkungan sosial di sekitarnya (Walmsley & Wraae, 2024). Teori ini memandang bahwa peran masyarakat sangat signifikan dalam membentuk dan memengaruhi perkembangan bisnis dari waktu ke waktu (Wiessner et al., 2024). Salah satu prinsip utama dalam teori legitimasi adalah bahwa suatu institusi dapat terus berkembang selama para pemangku kepentingannya meyakini bahwa

institusi tersebut beroperasi sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anut (J. Ha et al., 2024). Gagasan ini memberikan panduan bagi bisnis dalam meraih dukungan publik dan membuktikan bahwa aktivitas operasional mereka dapat diterima oleh masyarakat secara sosial (Hardiningsih et al., 2024). Teori legitimasi, yang diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975, menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan di sekitarnya (Gezgin et al., 2024). Berdasarkan premis dasar landasan teori mengenai legitimasi, keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh para pemangku kepentingan yang memandang sejauhmana entitas tersebut berusaha mewujudkan nilai-nilai dan tujuan yang mereka yakini (Madi, 2024). Konsep ini memberikan panduan bagi perusahaan untuk mendapatkan dukungan publik serta menunjukkan bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat diterima dan dianggap sesuai dengan norma sosial oleh masyarakat (Fosu et al., 2024).

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Stakeholder Theory merupakan isu strategis yang membahas cara perusahaan dalam mengelola hubungan dengan para pihak yang berkepentingan terhadap operasionalnya (Freeman et al., 2020). Secara umum, pemangku kepentingan dipahami sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, karena mereka dapat memengaruhi maupun terpengaruh oleh aktivitas perusahaan (Qian et al., 2024). Dari sisi internal, pemangku kepentingan utama mencakup karyawan, investor, pemberi kredit, konsumen, serta pemasok (Lindsey et al., 2021). Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan diharapkan dapat memenuhi ekspektasi serta kebutuhan para *stakeholders* (Barney & Harrison, 2020). Perusahaan berusaha memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap aktivitas bisnis yang dijalankan, mengingat peran

penting dukungan *stakeholders* bagi keberlangsungan perusahaan (Freeman et al., 2021). Dukungan dari pemangku kepentingan dapat diperoleh melalui penerapan pengungkapan informasi keuangan maupun non-keuangan, di mana para pemangku kepentingan mengharapkan manajemen memberikan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan (Kujala et al., 2017).

Berdasarkan Teori *Stakeholder*, perusahaan tidak semata-mata beroperasi demi kepentingan internalnya saja, melainkan juga berkewajiban untuk memperhatikan dan mendukung berbagai pihak yang terlibat, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, serta pihak-pihak lainnya (Maryanti & Fithri, 2017). Menurut (Mulpiani, 2019), pemangku kepentingan atau stakeholder merupakan individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan memberikan pengaruh terhadap perusahaan, sehingga perusahaan perlu menjalin kerja sama dengan seluruh pihak terkait pada kegiatan operasional usahanya guna menjamin kelangsungan dan kesinambungan kegiatan usahanya (Ghazali & Zulmaita, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nanik Ermawati dan Yanuar Nugroho, 2023), Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan harus memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekitarnya (Husada & Handayani, 2021 ; Lamberton, 2015 ; dan Handayani, 2019). Menurut penjelasan teori stakeholder, hubungan antara variabel Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Green Accounting Information* (Sun, 2024).

2.1.3 Teori Signal

Signalling Theory yang diperkenalkan oleh Akerlof (1970) menyatakan bahwa dalam suatu transaksi, pihak-pihak yang terlibat memiliki tingkat informasi yang berbeda-beda, dan informasi tersebut memiliki nilai tersendiri (Fathi et al., 2024). Sinyal yang diberikan oleh perusahaan dianggap sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi penilaian dan keputusan investasi dari pihak-pihak eksternal perusahaan (Imelda et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pendapat A. Gumanti (2012) yang menyatakan bahwa sinyal dapat dipahami sebagai suatu isyarat yang diberikan kepada pihak-pihak eksternal (investor) dimana sinyal tersebut telah disiapkan oleh pihak perusahaan (manajer) itu sendiri. Setiap bentuk sinyal yang dikeluarkan oleh perusahaan bertujuan untuk menyampaikan pesan tertentu, dengan harapan dapat mengubah cara pasar atau pihak eksternal menilai perusahaan (A Gumanti, 2012) Oleh karena itu, sinyal yang akan disampaikan oleh perusahaan harus mengandung informasi yang cukup kuat untuk mengubah pandangan pihak eksternal mengenai penilaian terhadap perusahaan. Pengungkapan informasi non-keuangan, seperti pengungkapan ESG, juga dapat dianggap sebagai suatu sinyal positif yang diharapkan dapat diterima oleh pihak lain dan memengaruhi proses pengambilan keputusan mereka (Ombai et al., 2024). Pengungkapan informasi non-keuangan perusahaan terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat berfungsi sebagai sinyal positif bagi para investor (Erben Yavuz et al., 2024)..

Signalling Theory menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor dan pemangku kepentingan mengenai prospek serta kinerja perusahaan melalui laporan keuangan (Brigham, 2019). Berdasarkan teori *signalling*,

diharapkan perusahaan memberikan informasi yang cukup kepada pemangku kepentingan (Chirsty & Sofie, 2023). Niat baik ini seringkali ditunjukkan dengan mengungkapkan lebih banyak informasi, khususnya yang terkait dengan keberlanjutan perusahaan (Caesaria & Basuki, 2017). Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai laporan keuangan mereka kepada pihak eksternal (Bergh et al., 2014). Sinyal dapat dipahami sebagai suatu tanda yang diberikan oleh perusahaan kepada investor (Singhal & Kapur, 2024). Oleh karena itu, sinyal yang dikeluarkan oleh perusahaan harus mengandung informasi yang cukup kuat untuk dapat mengubah pandangan pihak eksternal mengenai valuasi perusahaan (Martha & Khomsiyah, 2023).

2.1.4 Teori *Triple Bottom Line*

Pendekatan *Triple Bottom Line* (TBL) mulai dikenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” (Yanti & Rasmini, 2015). Elkington menekankan bahwa perusahaan tidak hanya perlu mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (people) serta turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan (planet) (Putra, 2024). Sampai sekarang, sejumlah pakar juga telah mengemukakan konsep TBL. Menurut Andrew Savitz (2006) dalam karya (Slaper & Hall, 2011), Triple Bottom Line (TBL) mencerminkan esensi keberlanjutan dengan menilai pengaruh aktivitas organisasi terhadap dunia, mencakup aspek keuangan seperti profitabilitas dan kepentingan pemegang saham, serta aspek sosial, masyarakat, dan lingkungan. (P. A. C. Smith & Sharicz, 2011) mengemukakan bahwa TBL adalah, “*The result of the activities*

of an organization voluntary or governed by law, that demonstrate the ability of the organization to maintain viable its business operations (including financial viability as appropriate) whilst not negatively impacting any social or ecological systems.”

TBL menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan (Tajuddin et al., 2024). TBL dapat dijadikan sebagai standar evaluasi perusahaan yang memperhitungkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif (Muharman, 2024). Keterkaitan yang erat antar ketiga aspek TBL menunjukkan bahwa masing-masing saling mendukung dan memengaruhi (Jum’ a et al., 2024). Menurut (Line, 2017) dari perspektif ekonomi, perusahaan perlu memfokuskan perhatian pada pencapaian keuntungan untuk memastikan kelangsungan hidupnya, dari segi sosial, perusahaan harus berkomitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sementara itu, dalam hal aspek lingkungan hidup, setiap kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan. Menurut Wibisono (2007) yang dikutip dalam (Sofyanty et al., 2017) dijelaskan keterkaitan antara tiga dimensi utama dalam konsep *Triple Bottom Line*. Dimensi ekonomi (profit) merujuk pada keuntungan tambahan yang dibutuhkan guna menjamin keberlanjutan operasional perusahaan. Dimensi sosial (people) mencerminkan peran komunitas sebagai elemen krusial dalam mendukung keberlangsungan usaha. Sementara itu, dimensi lingkungan (planet) berkaitan dengan aspek ekologi yang saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Konsep TBL juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep *Tri Hita Karana* (Asraf et al., 2024). Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus penerapannya. Konsep TBL diterapkan dalam dunia bisnis dengan tujuan menjaga

keseimbangan antara keuntungan, aspek sosial, dan lingkungan. Sementara itu, *Tri Hita Karana* menekankan pada terciptanya harmoni antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitar (Hutasoit & Wau, 2017). Dengan demikian, pada akhirnya yang penting adalah mempertahankan keseimbangan antara unsur-unsur tersebut guna mencapai keberlanjutan.

2.1.5 Low Carbon Economy

Ekonomi Rendah Karbon (LCE) adalah suatu sistem ekonomi yang dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara adil sambil secara nyata menurunkan dampak terhadap ekosistem dan mengurangi risiko keterbatasan sumber daya alam. Guna mewujudkan sistem ini, suatu pemerintah perlu mengupayakan laju ekonomi yang rendah atau bahkan tanpa menghasilkan emisi karbon (Nugraha et al., 2024).

Usaha untuk menurunkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer dapat mempengaruhi kecepatan perubahan iklim (Bhatti et al., 2024). Untuk mencegah pemanasan global melebihi 2°C, sistem ekonomi ini dirancang agar konsentrasi GRK tetap pada 450 Ppm CO₂, yang setara dengan upaya untuk menghentikan pemanasan global (Thanissery, n.d.). Hingga saat ini, jumlah CO₂ di atmosfer telah melampaui batas 400 ppm (Qin et al., 2024). Penurunan emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang amat ditentukan oleh adanya regulasi yang memiliki komitmen kuat serta pendanaan di sektor ekonomi berkelanjutan, yang sering disebut sebagai Ekonomi Rendah Karbon (Yadav et al., 2024). Indikator berikut digunakan sebagai alat pengukur dalam menilai tingkat pencapaian *Low Carbon Economy*:

Tabel 2. Indikator Low Carbon Economy

No	Indikator Pengukuran
1.	Tingkat, Intensitas, Sumber, Dan Sektor Emisi Gas Rumah Kaca Dilengkapi Dengan Data Perubahan Suhu Permukaan Tahunan Menurut Negara Dan Wilayah.
2.	Produksi Berbasis Emisi Mencakup Tingkat, Intensitas, Produktivitas, Dan Porsi Transportasi. Permintaan Berbasis Emisi Mencakup Intensitas, Produktivitas, Dan Porsi Transportasi Berdasarkan Industri.
3.	Penggunaan Energi Meliputi Bauran Dan Pasokan Energi, Intensitas, dan Porsi Energi Terbarukan.

Sumber: (Leontinus, 2022)

Indikator untuk menilai *Low Carbon Economy* dapat diperoleh melalui rumus yang diadaptasi dari studi Gabrielle & Toly (2019), sebagaimana dikutip dalam (Uswatul et al., 2024) yaitu sebagai berikut:

$$GHG = \frac{\text{Total Skor Perusahaan Periode } T}{\text{Total Skor Maksimum}}$$

Mengacu pada indikator pengukuran tersebut, kriteria Ekonomi Rendah Karbon ditentukan melalui skor penilaian yang dijelaskan berikut ini:

Tabel 3. Interval Skor Penilaian

Interval Skor (in %)	Kategori
0%-20%	Sangat Rendah
21%-40%	Rendah
41%-60%	Sedang
61%-80%	Tinggi
81%-100%	Sangat Tinggi

Sumber: Pedoman umum rentang skala, dalam (Uswatul et al., 2024)

2.1.6 Kepemilikan Saham

Saham yang dimiliki oleh masyarakat luas dikenal sebagai kepemilikan saham publik (Octavio & Setiawan, 2024). Perusahaan memiliki kemampuan untuk menjual atau memperdagangkan saham publiknya kepada para investor (Bahodirovich, 2024). Salah satu langkah awal yang biasanya dilakukan investor sebelum membeli saham adalah meninjau laporan bisnis (Tracy, 2024). Bagi investor, hal yang paling krusial adalah mendapatkan laporan perusahaan yang transparan dan lengkap, karena hal ini dapat membantu meningkatkan pemanfaatan sumber daya mereka (Wong et al., 2024). Kepemilikan ini memberikan dorongan bagi masyarakat untuk memiliki berbagai hak serta memikul tanggung jawab tertentu (Nijs et al., 2024). Kewajiban ini memiliki kaitan erat terhadap keterlibatan pemodal publik di dalam entitas bisnis, sedangkan keuntungannya meliputi hasil yang diperoleh dari investasi, terutama berupa pembayaran dividen (Amimakmur et al., 2024).

Tabel 4. Indikator Kepemilikan Saham Publik

No	Indikator Pengukuran
1.	Kontribusi Investor
2.	Investasi
3.	Dividen

Sumber: (Amimakmur et al., 2024)

Dalam mengidentifikasi kepemilikan saham publik, Rahmadhani et al. (2021) menggunakan perhitungan melalui rumus:

$$KSP = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Publik}}{\text{Total Lembar Saham Perusahaan}} \times 100\%$$

(Rahmadhani et al. (2021)

2.1.7 Biaya Lingkungan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (R. D. P. Sari et al., 2024), biaya lingkungan adalah pengeluaran yang harus ditanggung perusahaan sebagai konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional sehari-hari serta upaya perlindungan yang direncanakan. Pernyataan serupa disampaikan oleh (Aftab et al., 2024), yang menyebutkan bahwa biaya lingkungan merupakan pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan program pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Biaya lingkungan perlu disajikan secara terpisah berdasarkan kategori atau klasifikasi jenis bebannya. Langkah ini ditempuh agar aktivitas bisnis perusahaan, khususnya yang berkontribusi terhadap perubahan lingkungan, bisa dinilai secara lebih tepat (Fu et al., 2024).

Tabel 5. Indikator Biaya Lingkungan

No	Indikator Pengukuran
1.	Kegiatan Operasional
2.	Perbaikan Lingkungan
3.	Pencemaran Lingkungan

Sumber: (Fu et al., 2024)

Indikator berikut digunakan untuk mengukur biaya lingkungan yang dicantumkan dalam laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan, dengan cara membandingkan anggaran program bina lingkungan terhadap laba bersih perusahaan. Indikator Biaya Lingkungan yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan oleh (Siagian, 2024) sebagai berikut:

$$Biaya\ Lingkungan = \frac{Environmental\ Cost}{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}$$

(Siagian, 2024)

2.1.8 Inisiatif Hijau

Inisiatif hijau merujuk pada program dan upaya yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia (Nketiah et al., 2024). Inisiatif ini meliputi berbagai tindakan, seperti proyek energi terbarukan, desain bangunan ramah lingkungan, transportasi yang berkelanjutan, pengurangan sampah, serta praktik bisnis yang mendukung kelestarian lingkungan (Dhayal et al., 2024). Pemerintah, perusahaan, dan individu semakin mengadopsi inisiatif hijau sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, memitigasi perubahan iklim, dan mendorong terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan (Barnaby et al., 2024). Diharapkan bahwa penerapan inisiatif hijau dapat mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan, karena inisiatif ini turut mendukung penerapan manajemen energi, konservasi air, serta pengelolaan limbah yang lebih efisien (Maman et al., 2024). Dengan kata lain, inisiatif hijau merujuk pada serangkaian program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta secara formal berupaya melakukan pemulihan dan perbaikan kondisi lingkungan (Rana & Arya, 2024). (Issa & In'airat, 2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, inisiatif hijau memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Indikator tersebut diadaptasi dari hasil penelitian (Yacob et al., 2019), yakni sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Inisiatif Hijau

No	Indikator Pengukuran
1.	Manajemen Energi
2.	Konservasi Air
3.	Pengolahan Limbah

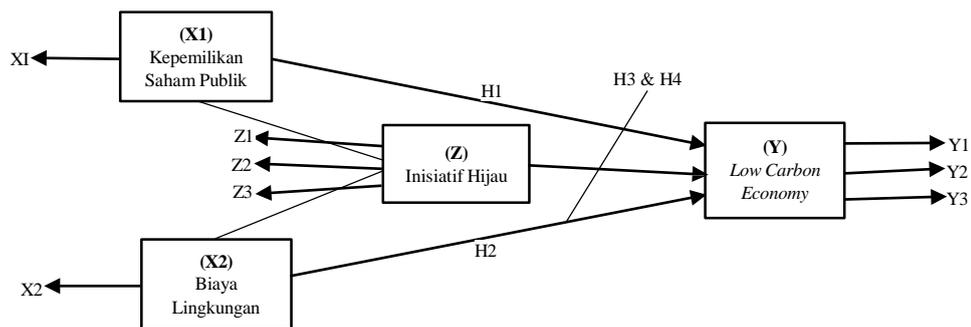
Sumber: (Uswatul et al., 2024)

$$IH = \frac{\text{Indikator yang diungkapkan}}{\text{Total Pengungkapan}}$$

(Husada & Handayani, 2021)

Penilaian inisiatif hijau dalam penelitian ini didasarkan pada indikator-indikator tertentu dan diukur menggunakan variabel dummy. Adapun kriteria penilaiannya meliputi: a) Efisiensi energi (skor 1 jika terdapat upaya, 0 jika tidak). b) Penggunaan air secara efisien (skor 1 jika diterapkan, 0 jika tidak). c) Sistem pengelolaan limbah (skor 1 jika tersedia, 0 jika tidak).

2.2 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka pikir yang bermaksud untuk menguji Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* (H1), Pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* (H2), Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* dimediasi oleh Inisiatif Hijau (H3), dan Pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* dimediasi oleh Inisiatif Hijau (H4).

2.3 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap *Low Carbon Economy*

Kepemilikan saham publik mengacu pada jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat umum. Saham-saham ini dapat diperdagangkan secara bebas atau dijual oleh perusahaan kepada para investor (Alifi & Kurniawati, 2024). Salah satu pertimbangan yang dilakukan investor sebelum membeli saham adalah menganalisis kondisi laporan perusahaan tersebut (Damodaran, 2024). Laporan perusahaan yang transparan, menyeluruh, dan informatif mengenai tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan lingkungan dapat memberikan sinyal positif kepada publik (Dagestani et al., 2024). Kepemilikan saham tersebut mendorong masyarakat untuk memiliki sejumlah hak serta menjalankan kewajiban tertentu (MacLeod, 2024). Kewajiban yang muncul berkaitan dengan kontribusi investor publik terhadap perusahaan, sedangkan hak yang dimiliki mencakup akses terhadap informasi mengenai kinerja perusahaan (Vazhynskyi et al., 2024).

Secara teoritis, dampak kepemilikan saham publik terhadap *low carbon economy* dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi (Ali et al., 2024). Berdasarkan teori stakeholder, tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada pemegang saham saja, melainkan juga mencakup berbagai pihak lain yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Talan et al., 2024). Saat tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari para pemangku kepentingan meningkat, perusahaan dituntut untuk memasukkan aspek lingkungan ke dalam strategi bisnisnya serta menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat (Reid et al., 2024). Penyampaian informasi

mengenai emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya dapat digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk menutupi kesenjangan legitimasi (Cai et al., 2024). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam konteks Low Carbon Economy memungkinkan perusahaan untuk memperlihatkan komitmennya terhadap tanggung jawab lingkungan dan memperoleh pengakuan legitimasi dari para *stakeholder* (Di Vaio et al., 2024). Dengan kata lain, legitimasi membantu memperkuat posisi, membangun relasi, serta memastikan keberlanjutan perusahaan dalam pasar (Gomez-Trujillo et al., 2024).

Penelitian ini meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan kata lain, semakin besar kepemilikan institusional, semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk melaporkan emisi karbonnya (Angelina & Handoko, 2023).

Dampak Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon—konsentrasi kepemilikan saham oleh sekelompok pemegang saham dominan dapat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi, khususnya pada perusahaan yang berada di bawah kendali investor dengan kepemilikan besar (Oyerogba et al., 2025). Hal ini berkaitan dengan kebutuhan investor utama akan informasi yang lebih mendalam. Selain itu, konsentrasi kepemilikan juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan kinerja perusahaan (Torres et al., 2024). Perusahaan dengan kinerja yang baik biasanya lebih terbuka dalam menyampaikan informasi, mampu menarik perhatian investor, serta menjaga

keseimbangan hubungan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Nasution et al., 2024). Dengan demikian hipotesis penelitian yang dapat di ajukan sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Pengungkapan Low Carbon Economy*.

Pengaruh Biaya Lingkungan Terhadap *Pengungkapan Low Carbon Economy*

Pengeluaran untuk biaya lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mengantisipasi dan menghadapi isu-isu lingkungan (X. Wang & Wu, 2024). Biaya lingkungan adalah beban finansial perusahaan terkait kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional sehari-hari serta upaya perlindungan lingkungan yang akan dilakukan (R. D. P. Sari et al., 2024). Hal serupa diungkapkan oleh (Aftab et al., 2024), yakni menyatakan adapun biaya lingkungan mencakup pengeluaran perusahaan untuk program pemulihan akibat dampak pencemaran dari kegiatan operasional. Biaya lingkungan perlu disajikan secara terpisah berdasarkan jenis atau klasifikasi beban yang terkait. Langkah ini dilakukan guna memperoleh penilaian yang lebih akurat terhadap kinerja operasional perusahaan, khususnya yang memiliki dampak terhadap lingkungan (Zaporowska & Szczepański, 2024).

Secara teoritis, dampak biaya lingkungan terhadap *low carbon economy* dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi (Ali et al., 2024). Berdasarkan teori stakeholder perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang dapat terpengaruh oleh atau mempengaruhi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Talan et al., 2024). Sejalan dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari pihak terkait, perusahaan perlu melaporkan biaya lingkungan sebagai wujud tanggung jawab lingkungan yang terintegrasi ke dalam perencanaan bisnis, serta menyampaikan data

yang signifikan kepada masyarakat luas (Reid et al., 2024). Perubahan ini mencerminkan peran baru para pemangku kepentingan (Di Vaio et al., 2024) dalam memengaruhi cara perusahaan bertindak dan mendorong tercapainya manfaat sosial yang baik (Alshukri et al., 2024). Menurut teori legitimasi, untuk berkembang dan bertahan, organisasi atau perusahaan harus menyesuaikan tindakannya selaras dengan norma-norma, keyakinan, dan harapan yang sedang berlaku di masyarakat (Zhang, 2024). Keselarasan aktivitas perusahaan dengan norma tercermin dalam pembagian proporsi biaya antara aktivitas lingkungan dan non-lingkungan (Ren, 2024). Institusi memiliki peluang untuk mengurangi kesenjangan legitimasi (*legitimacy gap*) melalui penyampaian informasi mengenai emisi karbon serta berbagai dampak lingkungan lain yang ditimbulkan (Cai et al., 2024). Dengan mengedepankan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam hal ekonomi karbon rendah, perusahaan dapat menegaskan tanggung jawab lingkungan mereka serta meraih pengakuan legitimasi dari para pihak berkepentingan (Di Vaio et al., 2024). Singkatnya, legitimasi yang diperoleh berfungsi untuk menguatkan posisi, mempererat hubungan, serta memastikan keberlanjutan perusahaan dalam pasar (Gomez-Trujillo et al., 2024). Dengan demikian hipotesis penelitian yang dapat di ajukan sebagai berikut:

H₂ : Biaya Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Low Carbon Economy.

Kepemilikan saham publik terhadap Low Carbon Economy dimediasi oleh inisiatif hijau.

Inisiatif hijau merujuk pada program dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak ekologis yang dihasilkan oleh aktivitas manusia (Nketiah et al., 2024). Inisiatif ini meliputi berbagai tindakan,

seperti proyek energi terbarukan, desain bangunan ramah lingkungan, transportasi berkelanjutan, pengurangan sampah, serta praktik bisnis yang mendukung kelestarian lingkungan (Umoh et al., 2024). Pemerintah, perusahaan, dan individu semakin mengadopsi inisiatif hijau sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, mengatasi perubahan iklim, dan mendorong terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan (Barnaby et al., 2024). Diharapkan bahwa dengan adanya inisiatif hijau, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas kinerjanya, karena inisiatif ini juga mendukung implementasi manajemen energi, konservasi air, dan pengelolaan limbah yang lebih efisien (M. L. Ramadhan et al., 2024). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa inisiatif hijau adalah serangkaian aktivitas atau program yang dilakukan oleh perusahaan guna mengurangi dampak buruk terhadap habitatnya (Karman et al., 2024).

Secara teoritis, dampak inisiatif hijau terhadap *low carbon economy* dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi (X. Liu et al., 2024). Menurut teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada para pemilik saham, tetapi juga kepada semua pihak yang terkena dampak atau bisa memengaruhi kegiatan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (P. A. Sari et al., 2024). Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari para pemangku kepentingan terkait kinerja lingkungan, perusahaan perlu mengungkapkan inisiatif hijau sebagai wujud tanggung jawab lingkungan yang terintegrasi dalam perencanaan bisnis mereka serta dengan menyampaikan data yang sesuai kepada publik (R. Sari & Muslim, 2024). Pergeseran ini menyoroti perubahan peran pemangku kepentingan dalam memengaruhi perilaku perusahaan dan mendorong

terciptanya manfaat sosial yang bernilai bagi masyarakat (Khan, 2024). Menurut teori legitimasi, agar bisa berkembang dan terus ada, sebuah perusahaan harus menyesuaikan kegiatannya dengan aturan, nilai, dan harapan yang berlaku di masyarakat (Aldawsari, 2023). Keselarasan aktivitas perusahaan dengan norma tercermin melalui penerapan kebijakan inisiatif hijau (Butler, 2011). Organisasi bisa mengatasi kesenjangan legitimasi dengan menyampaikan informasi seputar emisi karbon dan dampak lingkungan lainnya (Cai et al., 2024). Dengan bersikap terbuka dan bertanggung jawab tentang *low carbon economy* dan inisiatif hijau, perusahaan bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait (Su et al., 2024). Secara ringkas, legitimasi yang diperoleh berfungsi untuk menguatkan posisi, mempererat hubungan, dan memastikan keberlanjutan perusahaan dalam pasar (Gomez-Trujillo et al., 2024).

Dampak konsentrasi inisiatif hijau terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* sejalan dengan temuan penelitian (Pham & Nguyen, 2024) yang menyatakan bahwa inisiatif hijau berkontribusi secara positif terhadap performa perusahaan. Selain itu temuan (Uswatul et al., 2024) menemukan bahwa Inisiatif hijau mampu memediasi pengaruh positif dan signifikan antara pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Low Carbon Economy* (LCE). Dengan demikian hipotesis penelitian yang dapat di ajukan sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh inisiatif hijau.

Biaya lingkungan terhadap Low Carbon Economy dimediasi oleh inisiatif hijau.

Inisiatif hijau merujuk pada program dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan serta mengurangi dampak ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia (Nketiah et al., 2024). Inisiatif ini melibatkan berbagai tindakan, seperti proyek energi terbarukan, desain bangunan ramah lingkungan, transportasi berkelanjutan, pengurangan sampah, serta praktik bisnis yang mendukung kelestarian lingkungan (Umoh et al., 2024). Pemerintah, perusahaan, dan individu semakin mengadopsi inisiatif hijau sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, mengatasi perubahan iklim, dan mendorong terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan (Barnaby et al., 2024). Diharapkan bahwa melalui inisiatif hijau, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas kinerjanya, karena inisiatif ini juga mendukung implementasi manajemen energi, konservasi air, dan pengelolaan limbah yang lebih efektif (M. L. Ramadhan et al., 2024). Jadi, bisa disimpulkan bahwa inisiatif hijau adalah langkah atau program yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan secara resmi berusaha memperbaiki kondisi lingkungan (Karman et al., 2024).

Secara teoritis, dampak inisiatif hijau terhadap *low carbon economy* dapat dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi (X. Liu et al., 2024). Menurut teori stakeholder, perusahaan harus memperhatikan kepentingan banyak pihak, bukan hanya pemegang saham, karena banyak pihak lain juga bisa terkena pengaruh dari kegiatan perusahaan (P. A. Sari et al., 2024). Semakin banyak pihak yang ingin perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan, sehingga perusahaan harus melaporkan kegiatan ramah lingkungan mereka dan menyampaikan

informasi penting kepada masyarakat (R. Sari & Muslim, 2024). Perubahan ini menandai semakin besarnya pengaruh pemangku kepentingan dalam mengarahkan perusahaan menuju tindakan yang membawa manfaat sosial (Khan, 2024). Menurut teori legitimasi, keberlangsungan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan standar sosial yang berlaku (Aldawsari, 2023). Keselarasan aktivitas perusahaan dengan norma tercermin melalui penerapan kebijakan inisiatif hijau (Butler, 2011). Untuk mengurangi kesenjangan legitimasi, perusahaan perlu transparan tentang emisi karbon dan pengaruhnya terhadap lingkungan (Cai et al., 2024). Dengan memberikan informasi yang jelas dan bertanggung jawab tentang ekonomi rendah karbon dan program hijau, perusahaan bisa menunjukkan keseriusannya dalam menjaga alamnya serta mendapatkan kepercayaan dari semua pihak yang berkepentingan (Su et al., 2024). Legitimasi membantu perusahaan agar lebih kuat, memiliki hubungan yang baik, dan berkelanjutan di dunia bisnis (Gomez-Trujillo et al., 2024).

Dampak konsentrasi inisiatif hijau terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy* sejalan dengan temuan penelitian (Pham & Nguyen, 2024), yang menyatakan bahwa inisiatif hijau memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu temuan (Uswatul et al., 2024) menemukan bahwa Inisiatif hijau mampu memediasi pengaruh positif dan signifikan antara pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Low Carbon Economy* (LCE). Dengan demikian hipotesis penelitian yang dapat di ajukan sebagai berikut:

H₄ : Biaya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh inisiatif hijau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel, yakni variabel Kepemilikan saham publik terhadap variabel pengungkapan *low carbon Economy*, variabel biaya lingkungan terhadap variabel pengungkapan *low carbon Economy*, variabel kepemilikan saham public dan variabel biaya lingkungan terhadap variabel pengungkapan *low carbon Economy* dimediasi oleh inisiatif hijau. Menurut Sugiyono dalam penelitian (Damayanti, 2024), penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada positivisme, yang digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk menjelaskan serta menguji hipotesis yang diajukan.

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan dimulai dari bulan September 2024 s/d Februari 2025. Berdasarkan waktu penelitian, berikut adalah kalender kegiatan selama pelaksanaan penyusunan:

Tabel 7. Kalender Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Bulan									
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun
		Tahun 2024					2025				
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penyusunan Proposal Penelitian		■	■	■						
3	Bimbingan Proposal			■	■	■					
4	Seminar Usulan Penelitian					■					
5	Pengumpulan dan Pengolahan Data Penelitian						■	■	■	■	
6	Penyusunan Hasil Penelitian							■	■	■	
7	Sidang Skripsi/Seminar Hasil										■

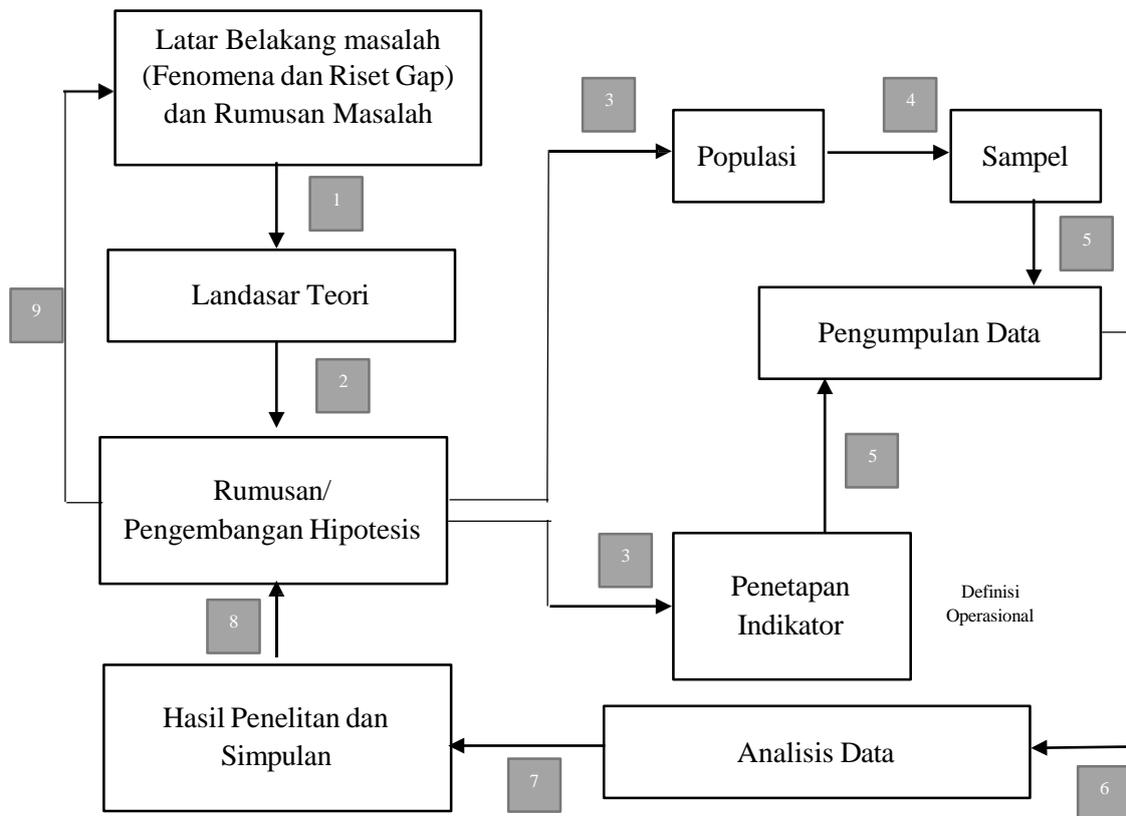
Sumber: Penulis, (2024)

3.2.2 Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian di lakukan di galeri Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan variabel mediasi (Z). Desain penelitian ini dimulai dengan menentukan masalah penelitian, menetapkan landasan teori, mengembangkan hipotesis, menetapkan indikator variabel, menentukan populasi kemudian menetapkan jumlah sampel penelitian. Langkah selanjutnya yaitu Pengumpulan data berdasarkan jumlah sampel penelitian dan indikator variabel yang digunakan. Langkah berikutnya setelah mengumpulkan data adalah menganalisisnya. Hasil analisis data di interpretasi sebagai hasil penelitian dan simpulan. Hasil Penelitian dan simpulan digunakan untuk mengkonfirmasi hipotesis yang di ajukan. Tahap terakhir yaitu konfirmasi hipotesis untuk menjawab rumusan masalah. Sebagaimana digambarkan dalam bentuk skema, sebagai berikut:



Gambar 2. Desain Penelitian

2.4 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan seluruh elemen yang dijadikan sebagai area generalisasi. Elemen dalam populasi mencakup semua subjek yang akan diukur dan menjadi unit yang diteliti (Sugiyono, (2017). Penelitian ini memfokuskan pada populasi yang terdiri dari 3.200 perusahaan di Indonesia yang terdaftar sebagai peserta program PROPER (*Public Disclosure Program for Environmental Compliance*) dan telah menyampaikan laporan tahunan secara konsisten pada rentang waktu 2019 hingga 2023. Sampel adalah sekumpulan unit yang dipilih dari populasi dengan tujuan merepresentasikan karakteristik dan proporsi yang ada dalam populasi secara keseluruhan (Sugiyono, 2013). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode judgment

sampling, menurut (Wijaya, 2018) *judgment sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, sejalan dengan pendapat (Sugiyono, (2017), metode ini diterapkan dengan berpedoman pada kriteria berikut:

Tabel 8. Kriteria Sampel Penelitian

No	Category	Score
1	Perusahaan Terdaftar Dalam Proper Yang Telah <i>Go Public</i>	3.200
2	Perusahaan Telah Terdaftar Melakukan Pembaruan Laporan Keuangan Tahun 2019-2024	2.201
3	Perusahaan Menjelaskan Tentang Akuntansi Lingkungan Dalam Pelaporan Keberlanjutan	221
4	Perusahaan Melaporkan Laporan Keuangan Secara Lengkap Berturut-turut	42
Total Sampel		42
Periode		5
Total Sampel Akhir		210

Sumber: Data Sekunder (2024)

Dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan sebagai dasar pengambilan sampel, diperoleh sebanyak 42 perusahaan yang telah *go public* dan secara konsisten melaporkan informasi akuntansi lingkungan dalam laporan keberlanjutan selama periode 2019 hingga 2023. Berdasarkan jumlah sampel tersebut, data yang akan dianalisis berjumlah 306, yang diperoleh dari hasil perkalian 42 perusahaan dengan 5 tahun periode pengamatan ($42 \times 5 = 210$). Daftar nama-nama perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perusahaan Sampel Penelitian

No	Nama Entitas	Kode emiten	Tipe	jenis	Sektor
1	PT Adaro Indonesia	ADRO	<i>High profile</i>	Pertambangan lain	Pertambangan dan Penggalian
2	PT Aneka Tambang, Tbk.	ANTM	<i>High profile</i>	Pertambangan lain	Penambangan Emas DMP
3	PT Astra Internasional	ASII	<i>High profile</i>	Otomotif	Industri otomotif
4	PT Austindo Nusantara Jaya	ANJT	<i>High profile</i>	Agribisnis	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit
5	PT Austindo Nusantara Jaya Agri	ANJA	<i>High profile</i>	Agribisnis	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit
6	PT Barito Pacifik, Tbk.	BRPT	<i>High profile</i>	Energi	Energi dan industri
7	PT Biofarma	INAF	<i>High profile</i>	Kesehatan	farmasi
8	PT Bukit Asam	PTBA	<i>High profile</i>	Pertambangan lain	Stockpile Batubara
9	PT Bumi Resource, Tbk.	BUMI	<i>High profil</i>	Pertambangan lain	Pertambangan batu bara
10	PT Candra Asri Petrochemical, Tbk.	TPIA	<i>High profil</i>	kimia	petrokimia
11	PT Cikarang Listrindo	POWR	<i>High profil</i>	Energi	Energi (pembangkit listrik)
12	PT Elnusa, Tbk.	ELSA	<i>High profil</i>	Energi	Energi (minyak dan gas)
13	PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)	TINS	<i>High profil</i>	Pertambangan lain	Pertambangan dan Metalurgi (Aluminium)
14	PT Indika Energy, Tbk.	INDY	<i>High profil</i>	Energi	Energi dan pertambangan
15	PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk.	INTP	<i>High profil</i>	Semen	Semen
16	PT Indonesia Power (PIP)	KRYA	<i>High profile</i>	Energi	Energi (listrik)
17	PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.	JPFA	<i>High profile</i>	Agribisnis	Agribisnis
18	PT JOB Pertamina - Medco E&P Tomori	MEDC	<i>High profile</i>	Energi	Energi (eksplorasi dan produksi minyak dan gas)
19	PT Kalbe Farma	KLBF	<i>High profile</i>	Kesehatan	Farmasi
20	PT PERTAMINA	PGEO	<i>High profile</i>	Perminyakan	Pertambangan
21	PT Pertamina EP Asset 1 - Field Rantau	PGEO	<i>High profile</i>	Perminyakan	MIGAS EP

No	Nama Entitas	Kode emiten	Tipe	jenis	Sektor
22	PT Pertamina Geothermal Energy	PGEO	<i>High profile</i>	Perminyakan	Pertambangan
23	PT Pertamina Hulu Indonesia (PHE)	PGEO	<i>High profile</i>	Perminyakan	Pertambangan
24	PT Perusahaan Gas Negara, Tbk.	PGAS	<i>High profile</i>	Perminyakan	MIGAS
25	PT Petrokimia Gresik	PIHC	<i>High profile</i>	Kimia	Pupuk
26	PT Petrosea, Tbk.	PTRO	<i>High profile</i>	Perminyakan	Pertambangan
27	PT Phapros, Tbk.	PEHA	<i>High profile</i>	Kesehatan	Farmasi
28	PT PLN (PLN)	PLN	<i>High profile</i>	Energi (listrik)	Energi (listrik)
29	PT PUPUK INDONESIA	PIHC	<i>High profile</i>	Kimia	Pupuk
30	PT Pupuk Iskandar Muda	PIHC	<i>High profile</i>	Kimia	Pupuk
31	PT Pupuk Kalimantan Timur	PIHC	<i>High profile</i>	Kimia	Pupuk
32	PT Pupuk Kujang	PIHC	<i>High profile</i>	Kimia	Pupuk
33	PT SRIWIdjaja Palembang	PIHC	<i>Low profile</i>	Kimia	Pupuk
34	PT Sahabat Mewah Dan Makmur	ANJA	<i>Low profile</i>	Agribisnis	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit
35	PT Sumber Graha Sejahtera (Sampoerna Kayoe)	SGER	<i>Low profile</i>	Produsen kayu lapis	Perkayuan dan Kayu Olahan
36	PT Semen Indonesia	SMGR	<i>High profile</i>	Semen	Semen
37	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido SIDOMUNCUL (SIDO)	SIDO	<i>High profile</i>	Kesehatan	Farmasi dan Jamu (Consumer Health)
38	PT Solusi Bangun, Tbk.	SMBC	<i>High profile</i>	Semen	Semen
39	PT TIMAH, Tbk.	TINS	<i>High profile</i>	Timah	Pertambangan (Timah)
40	PT Toyota Motor Manufacturing	TMMIN	<i>High profile</i>	Otomotif	Industri Otomotif
41	PT United Tractors	UNTR	<i>High profile</i>	Alat berat	Alat berat dan Pertambangan
42	PT Vale Indonesia	INCO	<i>High profile</i>	Pertambangan lain	Pertambangan (Nikel)

Sumber: PROPER (2022)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kearsipan. Menurut (Sugiarto, 2015) teknik kearsipan merupakan suatu proses penataan dan penyimpanan dokumen atau berkas secara sistematis agar mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Data yang di analisis merupakan data sekunder bersumber dari PROPER atau situs web resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Data ini diambil dari *annual report* yang telah dirilis oleh perusahaan sepanjang periode penelitian (Ghazali & Zulmaiti, 2020).

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS), dan pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1 Analisis Uji Deskriptif

Analisis deskriptif berfungsi untuk menggambarkan data yang telah diolah ke dalam format angka atau nilai *numeric* (Difinubun et al, 2023). Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran data dengan menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi. Data ini dikumpulkan berdasarkan kebutuhan tertentu tanpa tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum atau universal. Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran umum data dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.5.1 Evaluasi Measurement Model (*Outer Model*)

Evaluasi outer model dilakukan untuk menilai validitas data melalui pengujian *convergent validity* dan *discriminant validity*, serta mengukur reliabilitas model dengan menggunakan uji *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* pada masing-masing blok indikator (Ahmad et al., 2023).

a. *Convergent Validity*

Chin dalam penelitiannya (Ahmad et al., 2023) menyatakan bahwa indikator konstruk diuji untuk menguji *convergent validity* dan dianggap valid jika memiliki nilai lebih dari 0.70, sementara *loading factor* antara 0.50 s/d 0.60 dapat dianggap memadai.

b. *Discriminant Validity*

Pada penelitian ini, indikator reflektif diuji melalui *discriminant validity* dengan memeriksa *cross loading* antara indikator dan konstruknya, indikator dianggap diterima jika nilai korelasinya melebihi 0.70. Selanjutnya, pengukuran menggunakan kriteria *Fornell Larcker*, dimana sebuah indikator dianggap valid jika memiliki *loading factor* yang cukup untuk konstruk lainnya (Ahmad et al., 2023).

c. *Average Variance Extracted (AVE)*

Penelitian (Ahmad et al., 2023) menjelaskan bahwa *Average Variance Extracted* (AVE) digunakan untuk menilai sejauh mana varians konstruk dapat dijelaskan oleh indikator-indikator yang menyusunnya, dengan mempertimbangkan adanya kesalahan pengukuran. Nilai AVE yang direkomendasikan minimal adalah lebih dari 0,50.

d. Composite Reliability Dan Cronbach's Alpha

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad et al., 2023) menyatakan bahwa tahap akhir dalam evaluasi *outer model* adalah melakukan pengujian terhadap reliabilitasnya. Uji ini dilakukan dengan menggunakan indikator *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan pengukuran. Nilai *composite reliability* > 0.60 dan nilai *cronbach's alpha* > 0.70 yang berarti bahwa setiap variabel telah memenuhi kriteria pengukuran nilai untuk uji reliabilitas sehingga dapat dikatakan *reliable*.

3.5.2 Pengujian Uji Model Struktural (Inner Model)

Menurut penelitian (Ahmad et al., 2023), pengembangan model dilakukan berdasarkan konsep, yang kemudian diikuti dengan pengujian *inner model* untuk mengevaluasi hubungan antara variabel eksogen dan endogen. Penilaian terhadap model struktural atau *inner model* dilakukan melalui Nilai *R-square* (R^2), yang juga dapat digunakan sebagai indikator kecocokan model. Hasil uji PLS *R-square* menunjukkan sejauh mana variabel dalam model mampu menjelaskan variasi antar komponen.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Dalam model struktural, hubungan antar variabel harus menunjukkan nilai estimasi yang signifikan. Untuk mencapai signifikansi tersebut, digunakan prosedur *bootstrapping*. Pengujian hipotesis dianggap signifikan apabila nilai koefisien parameter serta nilai t-statistik dari hasil algoritma *bootstrapping* memenuhi kriteria. Penentuan signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%, yaitu sebesar 1,65 (Ahmad et al., 2023).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dari analisis terhadap 210 data laporan keberlanjutan perusahaan publik yang secara lengkap mengungkapkan penerapan akuntansi lingkungan dalam pelaporan keberlanjutan. Pemilihan 210 sampel data didasarkan pada akumulasi laporan selama 12 bulan dalam kurun waktu 5 tahun pengamatan, yakni dari tahun 2019 hingga 2023, yang merupakan hasil perkalian antara jumlah perusahaan sampel dengan periode pengamatan ($42 \text{ perusahaan} \times 5 \text{ tahun} = 210$ laporan).

4.1.1 Analisis Uji Deskriptif

Hasil statistik deskriptif berdasarkan nilai Kepemilikan Saham Publik, Biaya Lingkungan, *Low Carbon Economy*, dan Inisiatif Hijau, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Statistik Deskriptif

Indikator	<i>n</i>	Mean	Median	Observed min	Observed max	Standard deviation
X1	210	0.490	0.430	0.010	1.000	0.311
X2	210	0.136	0.030	0.000	1.900	0.284
Y1.1	210	0.644	0.630	0.610	0.950	0.065
Y1.2	210	0.660	0.640	0.610	0.900	0.057
Y1.3	210	0.657	0.640	0.610	0.960	0.065
Z1	210	2.145	2.450	0.250	2.730	0.589
Z2	210	1.870	1.910	0.250	2.450	0.409
Z3	210	2.213	2.450	0.380	2.450	0.441

Sumber: Data Diolah, *Output SmartPLS 4.0 (2025)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan hasil deskriptif untuk variabel independen, yaitu Kepemilikan Saham Publik (X1) yang diukur menggunakan dua indikator. Dalam penelitian ini, nilai minimum yang diperoleh adalah 0.010 dan nilai

maksimum sebesar 1.000; dengan rata-rata sebesar 0.490. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan terkait Kepemilikan Saham Publik tergolong baik, serta menunjukkan tingkat transparansi yang relatif tinggi dalam menyampaikan informasi penting mengenai kepemilikan saham publik.

Variabel Biaya Lingkungan (X2), yang diukur melalui dua indikator, menunjukkan nilai minimum sebesar 0.000 dan maksimum sebesar 1.900; rata-rata nilai yang diperoleh adalah 0.136. Ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam mengelola biaya lingkungan tergolong baik, serta mencerminkan tingkat keterbukaan informasi yang cukup tinggi dalam menyampaikan data terkait biaya lingkungan yang bersifat penting bagi publik. Sementara itu, variabel dependen mencakup dua variabel, salah satunya adalah *Low Carbon Economy* (Y1) yang diukur menggunakan tiga indikator. Nilai minimum yang diperoleh adalah 0.610 dan nilai maksimum mencapai 0.950; dengan rata-rata sebesar 0.644. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam mendukung upaya penurunan emisi karbon tergolong cukup tinggi.

Selanjutnya, variabel moderasi yaitu Inisiatif Hijau diukur melalui tiga indikator. Pada indikator pertama (Z), nilai terendah yang tercatat adalah 0.250, sedangkan nilai tertingginya mencapai 2.730, dengan nilai rata-rata sebesar 2.145. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Inisiatif Hijau terhadap kinerja perusahaan dalam aspek pengelolaan lingkungan dinilai cukup positif.

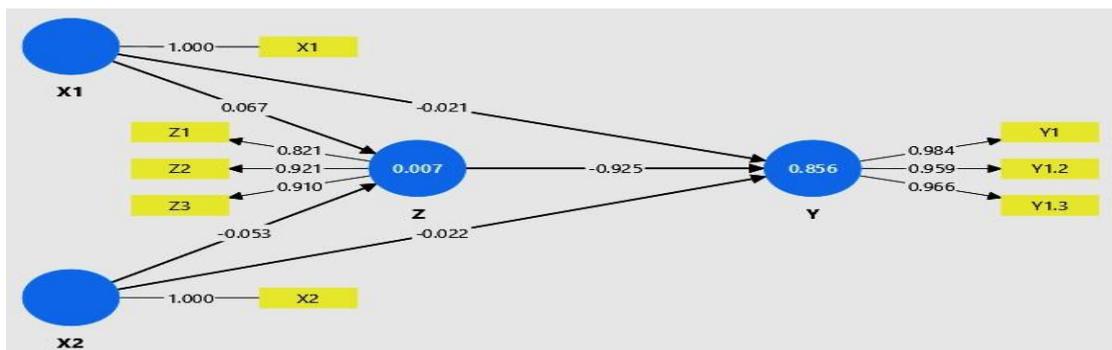
Berdasarkan penjelasan deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Saham Publik (X1), Biaya Lingkungan (X2), *Low Carbon Economy* (Y), serta Inisiatif Hijau (Z) memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan

standar deviasinya. Hal ini mengindikasikan bahwa data dari masing-masing variabel memiliki penyebaran yang stabil dan terdistribusi dengan baik.

4.1.2 Hasil Outer Model (Measurement)

a. Convergent Validity

Evaluasi *Convergent Validity* dilakukan dengan mengacu pada nilai *outer loading* sebagai parameter penilaiannya. Penelitian (Ahmad et al., 2023), menjelaskan bahwa indikator konstruk diuji menggunakan *Convergent Validity*, dengan ketentuan bahwa indikator dinyatakan **valid** apabila memiliki nilai > 0.70 , dan meskipun demikian, nilai *loading factor* antara 0,50 hingga 0,60 masih dianggap memadai. Pengukuran *Outer model* dilakukan menggunakan SmartPLS 4.0 dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 3. Outer Model

Sumber: Data Diolah, *Output SmartPLS 4.0* (2025)

Berdasarkan gambar di atas, seluruh variabel menunjukkan nilai *loading factor* yang melampaui angka 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam variabel penelitian ini telah memenuhi syarat *Convergent Validity*, dan tidak ada indikator yang perlu dikecualikan dari proses analisis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstruk diukur menggunakan indikator-indikator yang valid dan dapat diandalkan, sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Berdasarkan uraian diatas, hasil *Outer loading* pengujian *Convergent Validity* digambarkan sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Pengujian *Convergent Validity*

Indikator	Outer loadings	Keterangan
X1 <- X1	1.000	VALID
X2 <- X2	1.000	VALID
Y1 <- Y	0.984	VALID
Y1.2 <- Y	0.959	VALID
Y1.3 <- Y	0.966	VALID
Z1 <- Z	0.821	VALID
Z2 <- Z	0.921	VALID
Z3 <- Z	0.910	VALID

Sumber: Data Diolah, *Output SmartPLS 4.0 (2025)*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian *Convergent Validity* menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan valid, yang dibuktikan dengan nilai *Outer Loading* > 0.70.

b. *Discriminant Validity*

Indikator reflektif dapat dievaluasi melalui pengujian *discriminant validity* dengan menggunakan dua kriteria pengukuran, yaitu *cross loading* dan Fornell-Larcker. Menurut penelitian (Ahmad et al., 2023), Pengukuran *Cross Loading* mengukur korelasi antara indikator dengan konstraknya. Jika nilai korelasi tersebut melebihi 0,70, maka indikator tersebut dianggap layak dan nilai variabelnya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Hasil *Outer Loading* dalam penelitian ini yang diukur menggunakan *Cross Loading* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Pengujian *Discriminant Validity (Cross Loading)*

Variabel	X1	X2	Y	Z
X1	1.000	-0.011	-0.083	0.068
X2	-0.011	1.000	0.029	-0.054
Y1	-0.071	0.031	0.984	-0.909
Y1.2	-0.079	-0.004	0.959	-0.874
Y1.3	-0.092	0.056	0.966	-0.907
Z1	0.038	0.007	-0.677	0.821
Z2	0.070	-0.020	-0.850	0.921
Z3	0.069	-0.115	0.905	0.910

Sumber: Data Diolah, *Output SmartPLS 4.0 (2025)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa discriminant validity telah tercapai dengan baik, ditunjukkan oleh nilai korelasi antara indikator dan konstraknya yang lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan konstruk lain. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian *discriminant validity* menggunakan kriteria *Fornell-Larcker* melalui SmartPLS versi 4.0, yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Discriminant Validity (Fornell-Lacker Criterion)

Variabel	X1	X2	Y	Z
X1	1.000			
X2	-0.011	1.000		
Y	-0.083	0.029	0.970	
Z	0.068	-0.054	-0.925	0.885

Sumber: Data Diolah, *Output* SmartPLS 4.0 (2025)

Dari penjelasan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Saham Publik sebagai variabel independen memiliki nilai korelasi sebesar 1.000, demikian pula dengan variabel Biaya Lingkungan yang juga menunjukkan nilai korelasi sebesar 1,000. Kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel *Low Carbon Economy* (0.970) dan Inisiatif Hijau (0,885). Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai cross loading di atas 0.70, yang berarti bahwa setiap variabel dalam penelitian ini sudah layak dan bisa mewakili apa yang ingin diukur secara keseluruhan. Hal ini berarti semua variabel dalam penelitian sudah menunjukkan validitas yang baik dan bisa dibedakan satu sama lain dengan jelas. Selain itu, semuanya telah memenuhi syarat untuk pengujian *discriminant validity*.

c. Average Variance Extracted (AVE)

Menurut penelitian (Ahmad et al., 2023), nilai AVE digunakan untuk melihat seberapa besar informasi yang bisa dijelaskan oleh konstruk dari indikator-indikatornya,

setelah memperhitungkan tingkat kesalahan pengukuran. Nilai AVE yang dianggap memenuhi syarat minimum adalah 0.50. Tabel hasil perhitungan *Average Variance Extracted* (AVE) digambarkan sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Pengujian *Average Variance Extracted*

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Y	0.941
Z	0.784

Sumber: Data Diolah, *Output SmartPLS 4.0* (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sudah memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu nilai > 0.50 . Dengan kata lain, semua indikator tersebut sudah cukup andal, sehingga layak digunakan untuk tahapan pengujian selanjutnya.

d. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Menurut penelitian (Ahmad et al., 2023), tahap akhir dari mengevaluasi *outer model* adalah melakukan pengujian untuk memastikan bahwa model tersebut memiliki tingkat keandalan yang baik. Pengujian ini dilakukan melalui dua indikator, yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*, agar memastikan bahwa alat ukur yang digunakan sudah konsisten dan tidak mengalami masalah dalam pengukuran. Tabel perhitungan hasil *composite reliability* dan *cronbach's alpha* adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Pengujian *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Keterangan
Y	0.968	0.969	0.979	<i>Reliable</i>
Z	0.862	0.883	0.916	<i>Reliable</i>

Sumber: Data Diolah, *Output SmartPLS 4.0* (2025)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai *composite reliability* > 0,60 dan nilai *cronbach's alpha* > 0,70. Ini berarti variabel-variabel tersebut sudah memenuhi syarat untuk uji keandalan, sehingga bisa dikatakan cukup *reliable*.

4.1.3 Pengujian Uji Model Struktural (*Inner Model*) – Uji Determinan

Nilai R-square (R^2) menunjukkan seberapa baik model cocok dengan data, dengan menggambarkan seberapa besar perubahan pada variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel independen (Lestari & Riyadi, 2024). Tabel hasil perhitungan R-square menggunakan SmartPLS 4.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji R-square (R^2)

Variabel	R-square	R-square adjusted
Y	0.856	0.854
Z	0.007	-0.002

Sumber: Data Diolah, *Output SmartPLS 4.0 (2025)*

Dari tabel diatas, terlihat nilai R-square (R^2) untuk variabel Low Carbon Economy (Y) adalah 0.856, dengan nilai R-square adjusted sebesar 0.854. Di sisi lain, nilai R-square (R^2) untuk variabel Inisiatif Hijau (Z) tercatat hanya sebesar 0.007, dengan nilai R-square yang telah disesuaikan (adjusted R-square) sebesar -0.002. Penelitian ini mengungkapkan adanya keterkaitan antara Kepemilikan Saham Publik (X1) dan Low Carbon Economy (Y), yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,854. Artinya, keduanya saling berpengaruh cukup kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa sebesar 85,6% variasi pada variabel Low Carbon Economy (Y) dapat dijelaskan oleh perubahan pada variabel Kepemilikan Saham Publik (X1). Dengan kata lain, variabel Kepemilikan Saham Publik hampir tidak memberikan pengaruh dalam menjelaskan perubahan pada Inisiatif Hijau. Bahkan, nilai *Adjusted R-square* yang negatif menunjukkan bahwa model ini justru kurang baik dibandingkan jika hanya menggunakan rata-rata nilai Inisiatif Hijau (Z) sebagai dasar

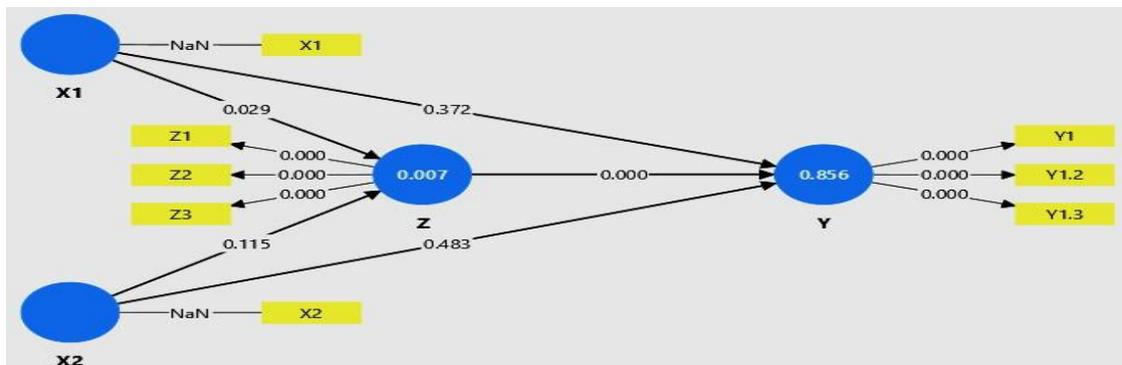
prediksi. Di sisi lain, hubungan antara Kepemilikan Saham Publik (X1) dan *Low Carbon Economy* (Y) terlihat kuat dan signifikan, tetapi hubungan yang sama tidak ditemukan antara Kepemilikan Saham Publik dan Inisiatif Hijau (Z).

Berdasarkan hasil analisis model, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara Kepemilikan Saham Publik (X1) dan Inisiatif Hijau (Z), dengan koefisien hubungan sebesar -0.002. Analisis ini menunjukkan sekitar 26,9% perubahan pada variabel Inisiatif Hijau (Z) dapat dijelaskan oleh perubahan dalam Kepemilikan Saham Publik (X1). Hasil ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan masih belum banyak mengungkapkan informasi terkait biaya lingkungan, karena informasi seperti biaya pencegahan dan biaya deteksi terhadap dampak lingkungan dianggap sensitif atau bersifat rahasia oleh perusahaan. Oleh karena itu, penerapan dan pengungkapan akuntansi hijau masih terbatas dan belum optimal. Sementara itu, sekitar 73,1% perubahan dalam variabel *Low Carbon Economy* (Y) disebabkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

Pada model struktural, estimasi hubungan antar variabel perlu menunjukkan signifikan. Dengan melihat signifikan pada hipotesis menggunakan nilai koefisien parameter dan nilai signifikan t-statistik dilihat melalui laporan *algorithm bootstrapping*. Pengukuran *outer model* dengan metode *bootstrapping* menggunakan Smart-PLS 4.0

ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 4. Outer Bootstrapping

Sumber: Data diolah, *Output SmartPLS 4.0 (2025)*

Hasil pengujian hipotesis diatas dapat dirangkum pada tabel berikut, dengan ringkasan hasil pengujian hipotesis melalui *bootstrapping* dan menggunakan SmartPLS 4.0 sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan Hipotesis	Original sample (O)	T statistics	P values	Hasil
H1	KSP → LCE	-0.083	3.617	0.000	Ditolak
H2	BL → LCE	0.028	1.117	0.264	Ditolak
H3	KSP ↔ IH → LCE	-0.062	2.149	0.032	Diterima
H4	BL ↔ IH → LCE	0.049	1.585	0.113	Ditolak

Sumber: Data Diolah, *Output SmartPLS 4.0 (2025)*

Pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa empat hipotesis (4), yang diajukan, dua hipotesis (2) berhasil dibuktikan dan diterima. Berikut penjelasannya:

1) Hipotesis Pertama

Pada tabel 20 mengungkapkan hasil dari *Original Sample* (O) senilai -0.083 yang berarti kepemilikan saham publik berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai T-Statistik > T-Tabel ($3.617 > 1.65$) dan P- Value sebesar $0.000 < 0.05$ (5%) yang berarti memiliki pengaruh signifikan. Sebab itu dapat dinyatakan bahwa **H1 ditolak**, yang menunjukkan Kepemilikan Saham Publik (KSP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Low*

Carbon Economy (LCE).

2) Hipotesis kedua

Pada tabel 20 melaporkan hasil dari *Original Sample* (O) senilai +0.028 yang berarti biaya lingkungan berpengaruh positif. Hasil penelitian memperlihatkan nilai T-Statistik > T-Tabel ($1.117 > 1.65$) dan nilai P-Value ($0.264 > 0.05$ (5%)) yang berarti memiliki pengaruh tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H2 ditolak**, yang menunjukkan Biaya Lingkungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Low Carbon Economy* (LCE).

3) Hipotesis ketiga

Pada tabel 20 memperlihatkan bahwa hasil dari *Original Sample* (O) senilai -0.062 yang berarti kepemilikan saham publik berpengaruh negatif. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai T-Statistik > T-Tabel ($2.149 > 1.65$) dan nilai P-Value ($0.032 < 0.05$), menunjukkan pengaruh signifikan, oleh karena itu dapat diartikan bahwa **H3 diterima**, yang menunjukkan Kepemilikan Saham Publik (KSP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Low Carbon Economy* (LCE) yang di mediasi dengan Inisiatif Hijau (IH).

4) Hipotesis keempat

Pada tabel 20 menunjukkan bahwa hasil dari *Original Sample* (O) senilai +0.049 yang berarti biaya lingkungan berpengaruh positif. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai T-Statistik > T-Tabel ($1.585 > 1.65$) dan nilai P-Value ($0.133 > 0.05$), yang berarti memiliki pengaruh tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa **H4 ditolak**, yang menunjukkan Biaya Lingkungan (BL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Low Carbon Economy* (LCE) yang di mediasi dengan Inisiatif Hijau (IH).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap *Low Carbon Economy*

Kepemilikan saham publik berarti jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat secara luas. Saham ini bisa dibeli, dijual, atau diperdagangkan secara bebas oleh investor (Alifi & Kurniawati, 2024). Sebelum memutuskan untuk membeli saham, salah satu hal yang biasanya dipertimbangkan oleh investor adalah kondisi laporan keuangan perusahaan tersebut (Damodaran, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa nilai dari *Original Sample* (O) senilai -0.083 yang menunjukkan Kepemilikan Saham Publik berpengaruh negatif. Selain itu, nilai T-Statistik > T-Tabel ($3.617 > 1.65$) dan P- Value sebesar $0.000 > 0.05$ (5%) mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut bersifat signifikan secara statistik. Dengan demikian, dari simpulan tersebut Kepemilikan Saham Publik (KSP) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Low Carbon Economy (LCE). Hal ini disebabkan oleh nilai Kepemilikan Saham Publik dari dalam penelitian ini berada pada rentang 0.000 hingga 1.641; dengan rata-rata sebesar -0.211. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam hal kepemilikan saham publik masih rendah. Artinya, kepemilikan saham publik belum mampu memberikan dorongan yang kuat terhadap upaya perusahaan dalam mendukung *Low Carbon Economy*.

Kepemilikan saham publik menunjukkan bahwa ada investor individu atau lembaga dari luar perusahaan yang ikut memiliki saham perusahaan tersebut. Umumnya, pemegang saham publik lebih mementingkan hasil keuangan jangka pendek dan ingin pengembalian investasi yang cepat. Karena itu, jika manajemen perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh pemilik saham publik, mereka cenderung mengurangi program jangka panjang yang tidak langsung menghasilkan

keuntungan, termasuk langkah-langkah menuju *Low Carbon Economy* (LCE). Padahal, komitmen terhadap ekonomi rendah karbon biasanya memerlukan investasi besar di awal dan hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang sesuatu yang sering kali tidak sesuai dengan harapan para pemegang saham publik.

Dalam kenyataannya, menjalankan strategi rendah karbon sering kali mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, dan perbaikan rantai pasok yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini bisa mengurangi keuntungan jangka pendek dan berdampak pada berkurangnya dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Karena itu, ketika perusahaan memiliki proporsi saham publik yang tinggi, tekanan pasar untuk menjaga keuntungan bisa menghambat komitmen terhadap inisiatif rendah karbon. Temuan ini mendukung anggapan bahwa struktur kepemilikan sangat memengaruhi arah strategi perusahaan, termasuk dalam hal keberlanjutan.

Salah satu penyebabnya adalah karena investor publik biasanya tidak mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari upaya menuju *Low Carbon Economy* (LCE), berbeda dengan pemilik jangka panjang atau lembaga investasi yang punya visi keberlanjutan. Selain itu, pemegang saham publik umumnya tidak terlalu terlibat dalam keputusan operasional perusahaan, sehingga mereka tidak banyak mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung lingkungan.

Menurut teori stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan. Dalam hal ini, penerapan Strategi *Low Carbon Economy* dijalankan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab eksternal, khususnya terkait isu

lingkungan dan keberlanjutan. Namun, jika kepemilikan perusahaan didominasi oleh pemegang saham publik, fokus perusahaan cenderung tertuju pada kepentingan mereka yang menginginkan keuntungan jangka pendek. Akibatnya, perhatian terhadap kepentingan stakeholder lain termasuk perlindungan lingkungan bisa menjadi berkurang. Pemegang saham publik biasanya lebih fokus pada hasil keuangan jangka pendek dan peningkatan nilai saham, dibandingkan dengan pemilik internal atau lembaga investasi yang cenderung memiliki pandangan jangka panjang terhadap keberlanjutan. Dalam perspektif teori stakeholder, dominasi satu kelompok stakeholder dalam hal ini investor publik bisa menyebabkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Akibatnya, program jangka panjang seperti pengurangan emisi karbon dan transisi ke *Low Carbon Economy* sering kali tidak menjadi prioritas utama. Temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan mendukung pandangan bahwa tekanan pasar dari pemegang saham publik bisa menghambat komitmen perusahaan terhadap isu lingkungan.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha beroperasi sesuai dengan nilai dan harapan yang diterima oleh masyarakat. Salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat dan pemerintah adalah dengan menerapkan praktik *Low Carbon Economy*, apalagi saat kesadaran publik terhadap isu perubahan iklim semakin tinggi. Namun, jika perusahaan lebih banyak dikendalikan oleh pemegang saham publik, fokusnya bisa bergeser dari membangun citra baik di mata masyarakat menjadi sekadar memenuhi tuntutan pasar modal. Ketidakseimbangan ini dapat membuat perusahaan menunda atau mengurangi program-program yang mendukung tujuan jangka panjang, dan ramah lingkungan.

Pertentangan antara upaya perusahaan untuk menjaga citra dan penerimaan

masyarakat melalui program keberlanjutan, dengan tekanan pasar dari pemegang saham publik, menjadi tantangan besar dalam menjalankan strategi ekonomi rendah karbon. Seringkali, keputusan untuk menjaga reputasi lingkungan seperti mengurangi emisi karbon atau berinvestasi pada energi bersih tidak langsung menghasilkan keuntungan finansial. Karena itu, perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh publik sering menghadapi dilema antara mempertahankan dukungan sosial dan memenuhi tuntutan laba dari pasar. Inilah yang menjelaskan mengapa penelitian ini menemukan hubungan negatif dan signifikan antara Kepemilikan Saham Publik dan penerapan *Low Carbon Economy*.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik yang tinggi cenderung lebih lambat dalam mengadopsi praktik ramah lingkungan. Penelitian ini didukung oleh temuan Ladika dan Sautner (2019); (Amoa- Gyarteng & Dhliwayo, 2023), yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik. Sering kali berkorelasi dengan tekanan pasar terhadap kinerja keuangan jangka pendek perusahaan, namun temuan ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Alawadi & Rashid, 2023) . Penelitian Ladika dan Sautner (2019), menemukan bahwa investor publik terutama yang bersifat transaksional, cenderung mendorong manajemen untuk fokus pada pencapaian laba jangka pendek dibandingkan strategi jangka panjang. Penelitian oleh (Alawadi & Rashid, 2023), mengungkapkan bahwa praktik manajemen laba berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi perusahaan publik non-keuangan, sebaliknya penggunaan utang jangka pendek terbukti berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi. Meskipun kepemilikan publik tidak selalu berpengaruh langsung terhadap manajemen laba, faktor lain seperti struktur modal dan penggunaan utang jangka pendek dapat memainkan peran penting dalam

menentukan fokus perusahaan pada laba jangka pendek atau strategi jangka panjang (Amoa-Gyarteng & Dhliwayo, 2023). Dalam konteks ini, inisiatif rendah karbon yang membutuhkan investasi besar dan waktu implementasi yang lama, menjadi kurang menarik bagi perusahaan yang berada di bawah pengaruh kuat pemegang saham publik. Hal ini menjadi salah satu penjelasan mengapa KSP dapat memberikan pengaruh negatif terhadap upaya perusahaan dalam mendukung *Low Carbon Economy*.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Gillan dan Starks (2000), menunjukkan bahwa investor publik biasanya kurang aktif dalam mendukung agenda *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Sebaliknya, investor institusional atau strategis cenderung lebih terlibat dan vokal dalam mendorong pentingnya keberlanjutan. Investor publik sering kali lebih fokus pada keuntungan jangka pendek dan kurang memperhatikan dampak sosial atau lingkungan (Kouam, 2024). Sementara itu, investor institusional lebih terdorong untuk memasukkan pertimbangan ESG karena mereka percaya bahwa hal ini berhubungan erat dengan kinerja keuangan yang baik. Mereka juga lebih tanggap terhadap permintaan klien akan investasi berkelanjutan dan aktif memengaruhi arah kebijakan perusahaan dengan cara berinteraksi langsung dengan manajemen (Rau & Yu, 2024). Karena hal ini, perusahaan cenderung mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan investor publik, termasuk mengurangi pengeluaran untuk proyek lingkungan yang tidak langsung menghasilkan keuntungan.

Penelitian terdahulu oleh Zhang et al (2017), menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan publik yang tinggi cenderung memiliki kinerja lingkungan yang lebih rendah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pasar saham memberikan insentif yang lemah terhadap praktik keberlanjutan, yang

menyebabkan perusahaan tidak terdorong untuk berinvestasi dalam teknologi hijau atau memperbaiki jejak karbon mereka. Menurut penelitian (Luo et al., 2024), mengungkapkan bahwa kepemilikan saham oleh dana indeks (index funds) yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan peminjaman kembali saham untuk pemungutan suara (proxy voting). Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional yang memiliki saham publik dapat mempengaruhi keputusan manajerial, termasuk dalam hal kompensasi dan pemilihan direksi, yang sering kali berfokus pada hasil jangka pendek (Nasta et al., 2024). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian, di mana KSP ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Low Carbon Economy*. Hasil ini memperkuat literatur bahwa kepemilikan publik dapat menjadi hambatan terhadap transformasi bisnis menuju praktik ramah lingkungan.

Dalam konteks negara berkembang, seperti Indonesia, tekanan terhadap kinerja keuangan jangka pendek dari investor publik bahkan lebih besar akibat ketidakstabilan ekonomi dan pergerakan pasar saham yang tidak menentu. Penelitian lokal seperti oleh Santoso dan Laksmi (2020), juga menemukan bahwa perusahaan publik cenderung enggan berinvestasi dalam Inisiatif Hijau karena dianggap kurang menguntungkan dalam waktu dekat. Dalam penelitian yang disebutkan (Hasselsteen et al., 2024), bahwa tantangan dalam keuangan berkelanjutan di Indonesia termasuk kurangnya insentif bagi perusahaan, biaya pungutan untuk green bond yang dianggap tidak signifikan, dan sertifikasi green yang tidak mudah. Selanjutnya penelitian oleh (Rahmani et al., 2024), mengidentifikasi tantangan utama dalam adopsi green finance di Indonesia, termasuk kurangnya kesadaran dan edukasi terkait instrumen keuangan hijau, serta hambatan regulasi dan keterbatasan insentif. Biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan fasilitas yang didapatkan, sehingga perusahaan mungkin enggan berinvestasi dalam inisiatif hijau. Oleh karena itu,

temuan dalam penelitian ini tidak hanya konsisten dengan penelitian terdahulu secara global, tetapi juga mencerminkan tantangan mendasar yang dihadapi perusahaan ditingkat lokal dalam menyeimbangkan tuntutan pasar dengan komitmen terhadap *Low Carbon Economy*.

Dampak dari penelitian ini sangat penting bagi manajer perusahaan dan pembuat kebijakan. Bagi manajemen, diperlukan strategi komunikasi dan pelibatan pemegang saham publik untuk menyadarkan pentingnya transisi menuju *Low Carbon Economy* dalam jangka panjang. Sementara itu, dari sisi kebijakan publik, pemerintah dapat mendorong insentif kebijakan perpajakan atau kebijakan pengungkapan keberlanjutan yang lebih ketat agar perusahaan tetap terdorong mengimplementasikan inisiatif hijau meskipun berada di bawah tekanan pasar saham. Dengan demikian, perusahaan dapat menyeimbangkan antara tuntutan profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan secara lebih strategis.

4.2.2 Pengaruh Biaya Lingkungan Terhadap Pengungkapan *Low Carbon Economy*

Pengeluaran untuk biaya lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mengantisipasi dan menghadapi isu-isu lingkungan (X. Wang & Wu, 2024). Biaya lingkungan adalah beban finansial yang harus ditanggung perusahaan sebagai hasil dari pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional sehari-hari serta upaya perlindungan lingkungan yang akan dilakukan (R. D. P. Sari et al., 2024). Pernyataan serupa disampaikan oleh (Aftab et al., 2024), yang menyatakan bahwa biaya lingkungan merupakan pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan program pemulihan lingkungan sebagai akibat dari pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan nilai Original Sample (O)

sebesar +0.028, yang mengindikasikan adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan T-Statistik > T-Tabel ($1.117 > 1.65$) dan P- Value ($0.264 > 0.05$ (5%)) sehingga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Dengan demikian, Biaya Lingkungan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *Low Carbon Economy* (LCE).

Nilai Original Sample (O) sebesar -0.083 menunjukkan adanya hubungan negatif antara dua variabel, artinya ketika nilai salah satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Meskipun nilainya kecil, arah hubungan ini tetap penting karena mencerminkan kecenderungan umum dalam perilaku data. Dalam konteks ini, hubungan negatif dapat mengindikasikan bahwa ketika satu pihak (misalnya pemegang saham publik atau biaya tertentu) meningkat, maka dukungan atau pencapaian terhadap variabel seperti *Low Carbon Economy* (LCE) cenderung menurun.

Meskipun nilai hubungan tergolong lemah, hasil penelitian tetap dianggap signifikan secara statistik karena P-Value sebesar $0.000 < 0.05$. Artinya, kemungkinan bahwa hubungan ini terjadi secara kebetulan sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut nyata dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun dampaknya mungkin kecil dalam ukuran efek, arah pengaruh yang negatif memiliki dasar empiris yang kuat dan tidak dapat diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Hubungan negatif yang ditemukan dapat dijelaskan oleh adanya konflik antara kepentingan jangka pendek dan tujuan jangka panjang keberlanjutan. Misalnya, jika variabel yang dimaksud adalah Biaya Lingkungan, maka biaya publik yang tinggi bisa menciptakan tekanan pasar yang mendorong perusahaan untuk mengejar laba dalam waktu singkat, sehingga mereka enggan berinvestasi dalam inisiatif lingkungan seperti transisi ke ekonomi rendah karbon. Dalam hal ini, hubungan negatif muncul sebagai

dampak dari orientasi perusahaan yang lebih mengutamakan nilai pemegang saham daripada kepentingan lingkungan jangka panjang.

Teori stakeholder menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak berkepentingan (stakeholders), seperti masyarakat, karyawan, pemerintah, dan lingkungan. Dalam teori ini, adopsi *Low Carbon Economy* (LCE) merupakan wujud komitmen perusahaan dalam merespon tuntutan yang semakin tinggi dari pemangku kepentingan eksternal terhadap bisnis berkelanjutan. Namun, jika perusahaan didominasi oleh kepemilikan saham publik, maka orientasi pengambilan keputusan sering kali lebih condong ke pemenuhan ekspektasi investor jangka pendek. Hal ini bisa menyebabkan perusahaan mengesampingkan kepentingan stakeholders yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Biaya Lingkungan cenderung menimbulkan tekanan agar perusahaan terus meningkatkan nilai saham dan laba dalam waktu singkat. Dalam teori stakeholder, dominasi kepentingan satu kelompok (yakni investor publik) atas kelompok lain dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam tata kelola perusahaan. Sebagai akibatnya, inisiatif strategis jangka panjang seperti investasi dalam teknologi rendah karbon atau pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi kurang prioritas. Oleh karena itu, teori stakeholder menjelaskan bahwa struktur biaya yang terlalu terfokus pada pasar saham dapat menghambat komitmen perusahaan terhadap tujuan lingkungan jangka panjang.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus beroperasi dalam kerangka nilai dan norma yang diterima masyarakat agar memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial. Dalam konteks keberlanjutan, legitimasi diperoleh melalui komitmen terhadap lingkungan dan kontribusi terhadap agenda global seperti transisi ke ekonomi rendah karbon. Namun, jika perusahaan lebih berorientasi pada biaya lingkungan, maka

usaha untuk membangun legitimasi ini bisa dikompromikan. Keputusan strategis yang terlalu fokus pada laba jangka pendek dapat memunculkan persepsi negatif dari masyarakat dan stakeholder lain, sehingga mengancam legitimasi perusahaan.

Perusahaan yang terlalu terpengaruh oleh dinamika pasar saham mungkin akan mengurangi komitmen terhadap keberlanjutan karena tidak dianggap menguntungkan secara langsung. Dalam perspektif teori legitimasi, hal ini berisiko merusak kepercayaan publik dan menghambat integrasi nilai-nilai lingkungan dalam strategi bisnis. Oleh karena itu, agar perusahaan tetap relevan secara sosial dan sah secara moral, mereka perlu menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dengan tuntutan lingkungan dan sosial dari masyarakat luas.

Temuan hubungan negatif yang signifikan antara biaya lingkungan dan *Low Carbon Economy* mengindikasikan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi sosial. Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Bushee (1998); (Akter et al., 2024); (Banerjee et al., 2024), telah menunjukkan bahwa biaya lingkungan cenderung membuat perusahaan lebih fokus pada pencapaian target keuangan jangka pendek. Bushee (1998) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa investor publik yang bersifat transaksional cenderung menekan manajemen untuk meningkatkan laba dalam waktu singkat. Penelitian dari (Akter et al., 2024), mengungkapkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa investor dengan kepemilikan besar dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan manajerial, termasuk dalam hal manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa investor mungkin memberikan tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan laba melalui manipulasi aktivitas riil, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja saham perusahaan (Banerjee et al., 2024). Akibatnya, perusahaan yang

didominasi oleh pemegang saham publik sering kali enggan mengalokasikan sumber daya untuk investasi jangka panjang yang tidak memberikan imbal hasil instan, seperti pengembangan inisiatif ramah lingkungan. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa biaya lingkungan dapat menghambat implementasi *Low Carbon Economy*.

Dyck et al. (2019) juga menemukan bahwa biaya lingkungan cenderung kurang terlibat dalam isu-isu keberlanjutan seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dibandingkan dengan pemegang saham institusional atau strategis, investor publik biasanya tidak memiliki insentif jangka panjang untuk mendorong perusahaan agar berkontribusi terhadap agenda lingkungan. Penelitian oleh (Kim, 2024), menemukan bahwa biaya institusional oleh pemerintah dan dana pensiun memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ESG perusahaan. Investor ini cenderung memiliki perspektif jangka panjang dan dipengaruhi oleh tekanan publik serta regulasi pemerintah, yang mendorong mereka untuk mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. (Makhija et al., 2025), membedakan dampak antara investor sosial dan investor tradisional terhadap kinerja ESG perusahaan. Investor sosial, yang memprioritaskan nilai-nilai etika, cenderung memiliki dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan dibandingkan dengan investor tradisional. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih terbuka terhadap publik melalui pasar saham sering kali mengalami tekanan untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan keuntungan, yang berpotensi bertentangan dengan upaya menuju ekonomi rendah karbon.

Studi yang dilakukan oleh Zhang, Zhu, dan Ding (2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki struktur biaya tersebar di pasar modal cenderung memiliki skor kinerja lingkungan yang lebih rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa biaya institusional dan kepemilikan negara memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan karbon sukarela perusahaan. Sebaliknya, konsentrasi kepemilikan,

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tersebut (Choi et al., 2024). Penelitian oleh (Hou et al., 2024), menemukan bahwa biaya lingkungan dengan orientasi jangka panjang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja ESG perusahaan. Sebaliknya, biaya lingkungan dengan orientasi jangka pendek menunjukkan dampak negatif. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris lainnya yang menyatakan bahwa tekanan dari pasar modal lebih banyak mendorong efisiensi biaya dan profitabilitas dibandingkan dengan inovasi hijau atau pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan antara BL dan LCE sejalan dengan tren yang telah diamati dalam studi-studi sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan dalam konteks negara berkembang juga memperkuat temuan ini. Dalam studi oleh Santoso dan Laksmi (2020), ditemukan bahwa perusahaan publik di Indonesia cenderung minim dalam menerapkan praktik keberlanjutan karena tingginya tekanan dari investor yang berorientasi pada keuntungan finansial. (Ray & Hardi, 2024), menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka cenderung mengalami peningkatan kinerja jangka panjang. Meskipun terdapat tekanan untuk fokus pada keuntungan finansial, perusahaan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. (Mechrgui & Theiri, 2024), mengungkapkan bahwa investor yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan dapat mempengaruhi perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Meskipun tekanan untuk mencapai keuntungan finansial tetap ada, investor yang mendukung praktik keberlanjutan dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam inisiatif yang berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan di negara berkembang biasanya lebih rentan terhadap ketidakstabilan pasar dan lebih berhati-hati dalam

mengeluarkan biaya yang tidak memberikan hasil langsung. Hal ini menjelaskan mengapa dalam konteks lokal seperti Indonesia, biaya lingkungan bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi *Low Carbon Economy* secara efektif.

Penelitian ini penting bagi pengambil kebijakan dan manajer perusahaan karena menunjukkan bahwa elemen tertentu dalam struktur perusahaan (seperti pola kepemilikan atau struktur biaya) dapat menjadi penghambat dalam upaya transisi ke arah keberlanjutan. Oleh karena itu, strategi perusahaan perlu dievaluasi kembali untuk menyeimbangkan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab lingkungan. Pemerintah dan lembaga pengatur pasar modal juga dapat mengambil peran dengan menciptakan insentif atau kebijakan tata kelola yang mendorong perusahaan tetap memperhatikan aspek lingkungan, meskipun berada dalam tekanan pasar yang berdaya saing tinggi.

4.2.3 Kepemilikan Saham Publik Terhadap *Low Carbon Economy* Dimediasi Oleh Inisiatif Hijau

Inisiatif hijau merujuk pada program dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak ekologis yang dihasilkan oleh aktivitas manusia (Nketiah et al., 2024). Inisiatif ini meliputi berbagai tindakan, seperti proyek energi terbarukan, desain bangunan ramah lingkungan, transportasi berkelanjutan, pengurangan sampah, serta praktik bisnis yang mendukung kelestarian lingkungan (Umoh et al., 2024). Pemerintah, perusahaan, dan individu semakin mengadopsi inisiatif hijau sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, mengatasi perubahan iklim, dan mendorong terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan (Barnaby et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hasil dari *Original Sample* (O) senilai -0.062 yang berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang negatif. Hasil penelitian

juga menunjukkan nilai T-Statistik $>$ T-Tabel ($2.149 > 1.65$) dan nilai P-Value ($0.032 > 0.05$), yang mengindikasikan adanya pengaruh signifikan. Dengan demikian, Kepemilikan Saham Publik (KSP) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Low Carbon Economy* (LCE) yang dimoderasi oleh Inisiatif Hijau (IH).

Penelitian ini menunjukkan keterkaitan hubungan antara Kepemilikan Saham Publik (KSP) dan *Low Carbon Economy* (LCE), yang dipengaruhi oleh peran moderasi Inisiatif Hijau (IH), bersifat negatif namun signifikan. Nilai Original Sample (O) sebesar -0.062 menandakan bahwa peningkatan kepemilikan saham publik cenderung menurunkan efektivitas LCE, meskipun dalam konteks dimoderasi oleh IH. Signifikansi statistik ditunjukkan dengan T-statistik $2.149 > 1.65$ dan P-Value $0.032 < 0.05$, yang berarti bahwa hasil tersebut dapat dipercaya secara statistik dan tidak bersifat kebetulan. Artinya, peran IH sebagai moderator memengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara KSP dan LCE.

Inisiatif Hijau (IH) berfungsi sebagai faktor moderasi yang mengubah atau memengaruhi kekuatan pengaruh antara kepemilikan saham publik dan pencapaian ekonomi rendah karbon. Meski KSP secara umum cenderung mengurangi dorongan terhadap LCE karena kecenderungan investor publik yang lebih fokus pada jangka pendek dan mengutamakan profitabilitas, kehadiran IH memungkinkan perusahaan tetap menjalankan strategi hijau sebagai bentuk respons terhadap tekanan eksternal seperti regulasi, citra publik, atau permintaan pasar. Dengan demikian, IH mampu menjaga agar agenda lingkungan tetap berjalan meskipun ada tekanan finansial dari investor publik.

Ketika IH diimplementasikan secara aktif melalui kebijakan efisiensi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, atau pelaporan keberlanjutan— perusahaan dapat tetap menjaga legitimasi lingkungan meskipun struktur kepemilikannya menuntut kinerja keuangan yang kuat. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun arah

pengaruhnya negatif, hubungan tersebut tetap signifikan; artinya, pengaruh KSP terhadap LCE memang nyata, tetapi dapat diarahkan atau dikendalikan melalui intervensi strategis seperti IH.

Menurut Teori Stakeholder, perusahaan memikul tanggung jawab yang lebih luas, mencakup bukan hanya pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak berkepentingan seperti pemerintah, masyarakat, konsumen, dan lingkungan. Sehubungan dengan hal itu, penerapan *Low Carbon Economy* (LCE) merupakan upaya perusahaan untuk memenuhi tuntutan stakeholder yang semakin kritis terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Namun, tingginya kepemilikan saham publik dapat menciptakan tekanan jangka pendek dari investor yang lebih fokus pada profitabilitas, sehingga komitmen terhadap kepentingan stakeholder lingkungan bisa terpinggirkan. Inilah yang menjelaskan munculnya pengaruh negatif antara KSP dan LCE.

Meskipun tekanan dari pemegang saham publik cenderung mengarah pada pengabaian isu lingkungan, Inisiatif Hijau (IH) dapat berperan sebagai mekanisme penyeimbang. Dalam kerangka Teori Stakeholder, IH berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab manajemen terhadap kelompok stakeholder non-keuangan. Ketika perusahaan menjalankan IH, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan secara luas. Dengan demikian, meskipun terdapat pengaruh negatif dari KSP terhadap LCE, pelaksanaan IH dapat membantu meredakan tekanan pasar dan mempertahankan hubungan baik dengan stakeholder lingkungan.

Teori Legitimasi berpendapat bahwa organisasi harus bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan ekspektasi masyarakat agar tetap memperoleh legitimasi sosial. Implementasi LCE adalah salah satu cara perusahaan memperkuat legitimasi di mata publik yang semakin peduli terhadap perubahan iklim dan dampak lingkungan. Namun,

dalam perusahaan yang dimiliki secara luas oleh publik, orientasi pada hasil keuangan dapat membuat perusahaan mengabaikan tuntutan legitimasi ini. Oleh karena itu, pengaruh negatif dari KSP terhadap LCE dapat mencerminkan konflik antara tekanan pasar modal dan upaya memperoleh legitimasi sosial.

Dalam konteks Teori Legitimasi, Inisiatif Hijau menjadi alat strategis bagi perusahaan untuk menjaga hubungan positif dengan masyarakat dan mempertahankan reputasi. Ketika IH dijalankan dengan baik, perusahaan dapat tetap menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, meskipun berada di bawah tekanan dari pemegang saham publik. Artinya, IH berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan perusahaan untuk memuaskan pasar dan tuntutan eksternal untuk bertindak secara bertanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan IH sebagai moderator mampu mengurangi dampak negatif dari KSP terhadap LCE, dan membantu perusahaan tetap berada dalam legitimasi yang diharapkan masyarakat.

Hasil serupa dalam penelitian ini ditemukan juga dalam penelitian sebelumnya oleh Bushee (1998) dan He & Tian (2013); (Edmans, 2023); (J. Liu et al., 2023), yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik sering kali menimbulkan tekanan terhadap manajemen untuk fokus pada hasil keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini didukung oleh temuan Bushee (1998) dan He & Tian (2013) bahwa investor publik, terutama yang bersifat transaksional, lebih mementingkan nilai saham dan dividen dalam waktu dekat daripada pencapaian jangka panjang seperti keberlanjutan lingkungan. (Edmans, 2023), mengungkapkan bahwa 92% investor enggan mengorbankan kinerja jangka pendek demi potensi manfaat jangka panjang dari investasi ESG. Selain itu, 66% investor berpendapat bahwa faktor ESG kemungkinan akan memiliki peran yang lebih kecil dalam keputusan investasi mereka di masa depan.

Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan

positif yang signifikan dengan kinerja ESG perusahaan. Namun, hubungan positif ini terutama didorong oleh investor institusional dengan horizon investasi jangka panjang yang tidak sensitif terhadap tekanan, serta investor institusional dengan horizon investasi jangka pendek yang sensitif terhadap tekanan (J. Liu et al., 2023). Tekanan ini mendorong perusahaan untuk mengurangi belanja jangka panjang seperti investasi dalam teknologi rendah karbon. Hal inilah yang dapat menjelaskan pengaruh negatif KSP terhadap implementasi *Low Carbon Economy*.

Namun, penelitian lain juga menunjukkan bahwa perusahaan yang menjalankan Inisiatif Hijau (IH) dapat menetralkan atau mengurangi dampak negatif dari tekanan eksternal, termasuk yang berasal dari pasar modal. Menurut Porter & Kramer (2011), Inisiatif Hijau seperti efisiensi energi, inovasi produk berkelanjutan, dan pelaporan emisi bukan hanya berfungsi untuk tujuan sosial, tetapi juga dapat meningkatkan keunggulan perusahaan yang berdaya saing tinggi dalam jangka panjang. Penelitian (Bonsu et al., 2024), meneliti peran keunggulan kompetitif sebagai mediator antara inisiatif hijau dan kinerja perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa inisiatif hijau memiliki dampak positif terhadap keunggulan kompeten, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian (Nuryakin & Maryati, 2022), menguji pengaruh inisiatif hijau terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan dan kinerja keberlanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa inisiatif hijau memiliki dampak positif terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan. Dengan kata lain, meskipun investor publik mendorong efisiensi dan hasil cepat, penerapan IH dapat membantu perusahaan tetap menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan keberlanjutan.

Penelitian oleh Clarkson et al. (2015) juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap pengungkapan lingkungan dan inisiatif hijau mampu

mempertahankan performa lingkungan yang baik, bahkan di bawah tekanan pasar. Penelitian (Ramlawati et al., 2022), mengkaji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dengan inovasi hijau sebagai variabel intervening. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang proaktif dalam strategi hijau cenderung lebih tangguh terhadap tekanan investor. Penelitian (P. Ramadhan et al., 2023), menginvestigasi dampak pengungkapan emisi karbon dan inovasi hijau terhadap nilai perusahaan, dengan kinerja lingkungan sebagai variabel moderasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon dan inovasi hijau memiliki dampak positif signifikan terhadap nilai perusahaan, meskipun kinerja lingkungan tidak secara signifikan memoderasi hubungan tersebut. Temuan ini sejalan dengan mediasi IH dalam penelitian, di mana IH berperan dalam menjaga arah positif LCE meskipun struktur kepemilikan didominasi publik. Dengan demikian, IH menjadi variabel kunci yang dapat mengarahkan ulang pengaruh negatif KSP terhadap LCE.

Dalam konteks negara berkembang, seperti Indonesia, temuan ini menjadi semakin relevan. Penelitian oleh Santoso dan Laksmi (2020) menyatakan bahwa perusahaan publik di Indonesia cenderung kurang konsisten dalam menjalankan praktik keberlanjutan karena tekanan profitabilitas. Namun, studi tersebut juga menemukan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan strategi hijau dalam model bisnisnya mampu menunjukkan performa lingkungan yang lebih baik. Penelitian oleh (Saputra, 2020), menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan keberlanjutan pada entitas publik sektor manufaktur di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan, ukuran entitas, dan tata kelola entitas publik berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik keberlanjutan mereka.

Penelitian (Hua et al., 2024), menyoroti bahwa inisiatif hijau dapat menjadi mekanisme mediasi yang penting untuk mempertahankan komitmen terhadap ekonomi rendah karbon, meskipun perusahaan dihadapkan pada ekspektasi tinggi dari investor publik. Integrasi strategi hijau dalam model bisnis perusahaan terbukti dapat meningkatkan performa lingkungan dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Inisiatif Hijau berpotensi menjadi mekanisme mediasi yang penting untuk mempertahankan komitmen terhadap *Low Carbon Economy*, meskipun perusahaan dihadapkan pada ekspektasi tinggi dari investor publik.

Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif manajemen dan kebijakan perusahaan dalam memperkuat inisiatif hijau sebagai strategi mitigasi terhadap dampak negatif struktur kepemilikan. Bagi regulator dan pemangku kebijakan, penting untuk mendorong perusahaan publik agar tidak hanya terpaku pada kinerja keuangan, tetapi juga diwajibkan menjalankan tanggung jawab lingkungan yang terukur. Selain itu, penguatan IH sebagai bagian dari strategi perusahaan dapat menjadi jembatan antara tuntutan pasar dan komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang, sehingga tercipta keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai ekologis.

4.2.4 Biaya Lingkungan Terhadap *Low Carbon Economy* Dimediasi Oleh Inisiatif Hijau

Inisiatif hijau merujuk pada program dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan serta mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia (Nketiah et al., 2024). Inisiatif ini melibatkan berbagai tindakan, seperti proyek energi terbarukan, desain bangunan ramah lingkungan, transportasi berkelanjutan, pengurangan sampah, serta praktik bisnis yang mendukung kelestarian lingkungan (Umoh et al., 2024). Pemerintah, perusahaan, dan individu semakin menerapkan inisiatif hijau sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah

kaca, mengatasi perubahan iklim, dan mendorong terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan (Barnaby et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dari *Original Sample* (O) senilai +0.049 yang berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai T-Statistik > T-Tabel ($1.585 > 1.65$) dan nilai P-Value ($0.133 > 0.05$), yang berarti memiliki pengaruh tidak signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Biaya Lingkungan (BL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Low Carbon Economy* (LCE) yang dimoderasi dengan Inisiatif Hijau (IH).

Nilai *Original Sample* (O) sebesar +0.049 menunjukkan adanya hubungan positif antara Biaya Lingkungan dan *Low Carbon Economy*. Ini berarti bahwa secara umum, peningkatan pengeluaran perusahaan dalam aspek lingkungan seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan pengurangan emisi memiliki arah yang sejalan dengan peningkatan upaya menuju ekonomi rendah karbon. Namun, hubungan ini tergolong lemah karena nilai koefisiennya sangat kecil, yang menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap pencapaian LCE belum terlalu kuat atau luas.

Meskipun arah hubungan positif, hasil uji statistik menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Nilai T-statistik yang lebih kecil dari T-tabel ($1.585 < 1.96$) dan P-Value yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.133 > 0.05$) mengindikasikan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Biaya Lingkungan, meskipun dimediasi oleh Inisiatif Hijau, benar-benar memengaruhi LCE secara konsisten. Hal ini mengisyaratkan bahwa hubungan tersebut mungkin bersifat sementara, tergantung konteks, atau dipengaruhi oleh faktor eksternal lain yang tidak diteliti secara langsung.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa kehadiran Inisiatif Hijau (IH) sebagai variabel mediasi belum mampu memperkuat secara signifikan pengaruh Biaya Lingkungan

terhadap LCE. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa IH belum dijalankan secara menyeluruh atau terpadu dalam strategi perusahaan. Jika IH hanya bersifat simbolis (*greenwashing*) atau belum menysasar akar masalah lingkungan perusahaan, maka fungsinya sebagai penguat hubungan BL dan LCE menjadi kurang efektif. Dengan kata lain, IH sebagai moderator harus lebih bersifat strategis dan implementatif, bukan hanya administratif.

Dalam kerangka *Teori Stakeholder*, perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Biaya Lingkungan (BL) seharusnya menjadi cerminan dari tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder lingkungan. Ketika perusahaan mengalokasikan dana untuk pengelolaan lingkungan, hal itu diharapkan mencerminkan kepedulian terhadap tuntutan stakeholder yang semakin menuntut praktik bisnis berkelanjutan. Namun, jika biaya tersebut tidak diarahkan secara efektif atau tidak disertai komitmen manajerial yang kuat, maka hubungan positif antara BL dan LCE cenderung tidak signifikan secara statistik, sebagaimana tercermin dalam hasil penelitian.

Inisiatif Hijau (IH) dalam konteks teori stakeholder berfungsi sebagai mekanisme perusahaan untuk menjawab tuntutan yang lebih luas dari lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Idealnya, IH memperkuat komitmen lingkungan yang diwujudkan melalui alokasi biaya lingkungan, sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian Low Carbon Economy. Namun, jika inisiatif tersebut hanya bersifat sekadar formalitas atau tidak dijalankan secara menyeluruh, maka fungsinya sebagai faktor pengimbang menjadi kurang optimal. Hasil tidak signifikannya pengaruh BL terhadap LCE meskipun dimediasi IH menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan belum sepenuhnya terpadu dalam praktik bisnis, atau belum dirasakan secara nyata oleh

stakeholder utama.

Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dengan menunjukkan bahwa aktivitas mereka sejalan dengan nilai-nilai dan ekspektasi sosial. Dalam hal ini, pengeluaran untuk biaya lingkungan dan pelaksanaan inisiatif hijau merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk membangun citra sebagai entitas yang peduli terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Namun, jika aktivitas tersebut tidak menunjukkan hasil yang nyata atau dianggap sebagai formalitas administratif, maka legitimasi yang diharapkan juga tidak terwujud secara optimal. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa meskipun arah pengaruh positif, tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap LCE.

Penelitian ini mengindikasikan sekadar mengalokasi biaya lingkungan belum cukup untuk memperoleh legitimasi sosial maupun menciptakan dampak nyata terhadap *Low Carbon Economy*. Untuk mewujudkan legitimasi yang berkelanjutan, perusahaan harus menunjukkan tindakan yang konsisten dan transparan dalam inisiatif hijau, serta memastikan bahwa biaya lingkungan memberikan hasil yang terukur. Dengan demikian, dari sudut pandang stakeholder maupun legitimasi, efektivitas biaya lingkungan dan peran IH sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan strategi jangka panjang perusahaan. Kegagalan dalam aspek ini dapat menyebabkan lemahnya hubungan antara BL dan LCE, seperti yang tercermin dalam temuan hasil penelitian.

Penelitian ini selaras dengan hasil temuan dari Hart dan Ahuja (1996); (Rinsman & Prasetyo, 2020), bahwa pengeluaran untuk biaya lingkungan sering kali dianggap sebagai investasi perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi regulasi yang ketat, namun bertentangan dengan hasil penelitian (Pradhani et al., 2024).

Menurut Hart dan Ahuja (1996), perusahaan yang meningkatkan alokasi biaya lingkungan cenderung lebih mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga berpotensi mendukung pencapaian *Low Carbon Economy*. Penelitian oleh (Rinsman & Prasetyo, 2020), menguji pengaruh pengungkapan biaya dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan biaya lingkungan dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sehingga menekankan pentingnya transparansi dalam pengungkapan biaya lingkungan sebagai penyebab yang dapat memperkuat nilai perusahaan. Namun, (Pradhani et al., 2024) menemukan besaran biaya lingkungan tidak selalu berkorelasi langsung dengan hasil yang signifikan karena faktor efektivitas pemanfaatannya masih beragam.

Sejumlah penelitian menekankan pentingnya inisiatif hijau sebagai strategi yang memperkuat hubungan antara pengeluaran lingkungan dan kinerja lingkungan. Menurut Porter dan van der Linde (1995), implementasi inisiatif hijau yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi emisi karbon secara signifikan. Inisiatif hijau juga berfungsi sebagai sarana manajerial yang memastikan bahwa biaya lingkungan digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan keberlanjutan (Rejeb et al., 2024). Implementasi inisiatif hijau yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi emisi karbon secara signifikan. Inisiatif hijau juga berfungsi sebagai sarana manajerial yang memastikan bahwa biaya lingkungan digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan keberlanjutan (Issa, 2024). Namun, efektivitas inisiatif hijau dalam memoderasi hubungan ini masih tergantung pada komitmen dan konsistensi perusahaan dalam pelaksanaannya.

Beberapa penelitian empiris melaporkan bahwa pengaruh biaya lingkungan

terhadap pencapaian *Low Carbon Economy* atau kinerja lingkungan lainnya tidak selalu signifikan. Misalnya, studi oleh Chen et al. (2018) menemukan bahwa meskipun perusahaan mengeluarkan biaya lingkungan yang cukup besar, tanpa dukungan kebijakan internal dan eksternal yang kuat, dampaknya terhadap keberlanjutan masih kurang nyata. Penelitian oleh (Khatib et al., 2023), menganalisis dampak kebijakan lingkungan terhadap kinerja perusahaan dalam konteks emisi karbon. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal pengurangan emisi karbon dan efisiensi sumber daya. Temuan mereka menunjukkan bahwa perusahaan dengan kemampuan pemasaran yang kuat dapat meningkatkan kinerja lingkungan mereka, sementara kemampuan operasional hanya memoderasi dampak tersebut. Ini menunjukkan bahwa strategi internal yang efektif sangat penting dalam memaksimalkan dampak inisiatif hijau (Zameer et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya biaya lingkungan saja tidak cukup untuk mendorong perubahan signifikan tanpa didukung oleh strategi yang tepat seperti inisiatif hijau.

Penelitian yang dilakukan di negara berkembang, termasuk Indonesia, juga menyoroti bahwa kendala dalam implementasi inisiatif hijau dan pemanfaatan biaya lingkungan seringkali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran lingkungan. Menurut Santoso dan Laksmi (2020), perusahaan di negara berkembang cenderung menghadapi dilema antara tekanan profitabilitas jangka pendek dan tuntutan keberlanjutan jangka panjang. Penelitian (N. M. Ha et al., 2024), menunjukkan bahwa inovasi inisiatif hijau memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara inisiatif hijau tidak menunjukkan pengaruh signifikan.. Dukungan kebijakan yang kuat dan reformasi kelembagaan yang efektif sangat penting untuk membantu perusahaan menavigasi dilema antara profitabilitas jangka pendek dan

keberlanjutan jangka panjang (Mahajan et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana mediasi inisiatif hijau dapat memperkuat dampak biaya lingkungan terhadap pencapaian *Low Carbon Economy* secara lebih efektif.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan tidak cukup hanya mengeluarkan biaya lingkungan, melainkan perlu memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan secara tepat dan mendukung strategi hijau secara komprehensif. Inisiatif Hijau harus dirancang sebagai pendekatan manajerial yang holistik dan terintegrasi dalam semua aspek operasional perusahaan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam bentuk-bentuk IH yang efektif, serta bagaimana sinergi antara biaya lingkungan dan strategi hijau bisa ditingkatkan agar benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan *Low Carbon Economy*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Saham Publik berdampak pada seberapa banyak perusahaan mengungkapkan informasi tentang *Low Carbon Economy*. Pengaruhnya bersifat negatif dan signifikan, artinya semakin besar Kepemilikan Saham Publik (KSP), semakin rendah tingkat pengungkapan perusahaan terkait upaya menuju *Low Carbon Economy* (LCE).
- 2) Biaya Lingkungan (BL) berpengaruh terhadap seberapa banyak perusahaan mengungkapkan informasi tentang *Low Carbon Economy* (LCE). Namun, pengaruhnya bersifat negatif dan tidak signifikan. Artinya, besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk lingkungan tidak menjadi faktor utama atau penentu dalam mendukung upaya menuju *Low Carbon Economy*.
- 3) Kepemilikan Saham Publik (KSP) berpengaruh terhadap seberapa besar perusahaan mengungkapkan upaya menuju *Low Carbon Economy* (LCE) yang dimediasi Inisiatif Hijau (IH). Pengaruhnya positif dan signifikan, yang berarti semakin besar Kepemilikan Saham Publik, semakin besar juga pengungkapan perusahaan tentang LCE yang dimediasi oleh Inisiatif Hijau. Temuan ini melaporkan bahwa Kepemilikan Saham Publik menjadi faktor penentu dalam mendukung *Low Carbon Economy* yang di mediasi oleh Inisiatif Hijau.

- 4) Biaya lingkungan (BL) berpengaruh terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy* (LCE) yang di mediasi oleh Inisiatif Hijau (IH). Pengaruhnya positif dan signifikan, yang berarti semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk lingkungan, semakin tinggi pula komitmen perusahaan terhadap *Low Carbon Economy* yang dimediasi oleh inisiatif hijau. Artinya, Biaya Lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong *Low Carbon Economy* yang dimediasi oleh Inisiatif Hijau.

5.2 Saran

- 1) Meningkatkan peran pemegang saham publik dalam mendorong keterbukaan lingkungan karena Kepemilikan Saham Publik terbukti memiliki dampak negatif terhadap pengungkapan informasi tentang *Low Carbon Economy*, perusahaan perlu menyadarkan dan mengedukasi para pemegang saham publik tentang pentingnya keterbukaan informasi lingkungan dan keberlanjutan. Upaya ini bisa dilakukan melalui laporan tahunan, pertemuan pemegang saham, dan publikasi mengenai kebijakan keberlanjutan perusahaan.
- 2) Mengoptimalkan Biaya Lingkungan Lewat Program Inisiatif Hijau, meskipun Biaya Lingkungan tidak langsung berpengaruh besar terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy*, dampaknya menjadi positif dan signifikan jika disalurkan melalui program Inisiatif Hijau. Karena itu, perusahaan disarankan untuk menggunakan anggaran lingkungan secara lebih tepat, misalnya dengan menjalankan program nyata seperti

penghematan energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan pelestarian sumber daya alam.

- 3) Mendorong Regulasi dan Insentif Pemerintah untuk Pengungkapan *Low Carbon Economy*, Pemerintah dan lembaga pengawas pasar modal bisa membuat aturan atau memberikan insentif agar perusahaan publik lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait upaya mereka menuju ekonomi rendah karbon, terutama bagi perusahaan yang banyak dimiliki oleh investor publik.
- 4) Memperkuat peran Inisiatif Hijau dalam strategi keberlanjutan perusahaan karena Inisiatif Hijau terbukti mampu meningkatkan pengaruh positif dari Kepemilikan Saham Publik dan Biaya Lingkungan terhadap pengungkapan *Low Carbon Economy*, perusahaan sebaiknya menjadikan Inisiatif Hijau sebagai bagian utama dari strategi keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya sebagai program formalitas atau simbolis.
- 5) Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel independen dan mediasi lainnya, seperti kinerja keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, serta tekanan dari pihak luar seperti LSM atau kebijakan pemerintah, karena faktor-faktor tersebut mungkin juga memengaruhi pengungkapan *Low Carbon Economy*. Selain itu, penelitian dapat dilakukan pada sektor industri lain atau diperluas cakupan sampel ke tingkat internasional agar hasilnya bisa lebih mewakili berbagai kondisi secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A Gumanti, T. (2012). Teori Sinyal Dalam Manajemen Keuangan. *Manajemen Usahawan Indonesia*, 38(December 2014), 0–29.
- Abbas, S., Saqib, N., Mohammed, K. S., Sahore, N., & Shahzad, U. (2024). Pathways towards carbon neutrality in low carbon cities: The role of green patents, R&D and energy use for carbon emissions. *Technological Forecasting and Social Change*, 200, 123109.
- Abid, N., Ceci, F., & Aftab, J. (2024). Attaining sustainable business performance under resource constraints: Insights from an emerging economy. *Sustainable Development*, 32(3), 2031–2048.
- Acquafredda, V. (2024). *The farmers, the state and the climate change in Ethiopia*.
- Aftab, J., Abid, N., Sarwar, H., Amin, A., Abedini, M., & Veneziani, M. (2024). Does corporate social responsibility drive financial performance? Exploring the significance of green innovation, green dynamic capabilities, and perceived environmental volatility. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(3), 1634–1653.
- Ahmad, K. F., Didin, perkasa H., Siti, W. A., & Wenny, F. D. (2023). (n.d.). *Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kompetensi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan*. *Jurnal Price : Ekonomi Dan Akuntansi*, 02(01), 47–59.
- Akash, P. B., Chakraborty, P., Das, N., & Mullick, M. R. A. (2024). Assessment of carbon footprint of potable water production: A case from Bangladesh. *Green Carbon*, 2(3), 339–349.
- Akter, A., Wan Yusoff, W. F., & Abdul-Hamid, M. A. (2024). The moderating role of board diversity on the relationship between ownership structure and real earnings management. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(2), 98–115.
- Al Sayed, J., & Sayed, M. (2024). *The impact of digital technologies on international business practices*.
- Alawadi, H., & Rashid, N. (2023). Financial indicators and earnings management: a comprehensive panel data analysis of Jordan's non-financial companies. *Int J Acad Res Account Finance Manag Sci*, 13(2), 300–313.

- Aldawsari, S. H. M. (2023). *The policies and practices of CSR in Saudi Arabian bank*. Newcastle University.
- Ali, W., Wilson, J., & Frynas, J. G. (2024). Corporate governance mechanisms and carbon disclosure: A multilevel and multitheory literature survey. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*.
- Alifi, A., & Kurniawati, L. (2024). The Influence of Earning Management, Dividend Policy, and Free Float Ratio on Stock Returns. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(1), 128–143.
- Alshukri, T., Seun Ojekemi, O., Öz, T., & Alzubi, A. (2024). The Interplay of Corporate Social Responsibility, Innovation Capability, Organizational Learning, and Sustainable Value Creation: Does Stakeholder Engagement Matter? *Sustainability*, 16(13), 5511.
- Amimakmur, S. A., Saifi, M., Damayanti, C. R., & Hutahayan, B. (2024). Exploring the Nexus of Dividend Policy, Third-Party Funds, Financial Performance, and Company Value: The Role of IT Innovation as a Moderator. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(5), 210.
- Amoa-Gyarteng, K., & Dhliwayo, S. (2023). Capital structure, profitability, and short-term solvency of nascent SMEs in Ghana: An empirical study. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 19(4), 83–110.
- Andersen, S. C., Hollberg, A., Browne, X., Wallbaum, H., Birgisdóttir, H., Larsen, O. P., & Birkved, M. (2024). Environmental impacts of circularity in the built environment: How do system boundaries affect decision support? *Developments in the Built Environment*, 18, 100398.
- Angelina, A., & Handoko, J. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 49–68.
- Arisanti, R., Purnamawati, S., & Muslim, A. (2024). Determinants of greenhouse gas emissions in the transportation sector in Indonesia: official statistics and big data approach. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(1), 86–97.
- Asraf, A., Budihard, A. M., & Nurhayati, A. (2024). The Effect of Transformational Leadership on the Implementation of the Triple Bottom Line in MSMEs. *Jurnal*

- Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(4), 1285–1294.
- Bahodirovich, K. B. (2024). External Financing Sources For Businesses. *Gospodarka I Innowacje.*, 54, 119–124.
- Banerjee, A. K., Akhtaruzzaman, M., & Chatterjee, S. (2024). Earnings management: the influence of peer group and the corporate governance intervention. *Journal of Accounting Literature*.
- Barnaby, J., Idoko, I., Ugochi, A., Okafor, C., & Emmanuel, K. (2024). The blueprint for a greener future: sustainable architectures crucial role in combating climate change. *International Journal of Research and Scientific Innovation*, 11(2), 454–464.
- Barney, J. B., & Harrison, J. S. (2020). Stakeholder theory at the crossroads. In *Business & Society* (Vol. 59, Issue 2, pp. 203–212). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Bergh, D. D., Connelly, B. L., Ketchen, D. J., & Shannon, L. M. (2014). Signalling theory and equilibrium in strategic management research: An assessment and a research agenda. *Journal of Management Studies*, 51(8), 1334–1360. <https://doi.org/10.1111/joms.12097>
- Bertoli, G., Timm, J., Ries, R., Torres, M., & Passuello, A. (2024). Life cycle integrated analysis of thermal, environmental and cost performance of building envelope system: Small house case study considering grid mix change in Brazil. *Energy and Buildings*, 310, 114096.
- Bhatti, U. A., Bhatti, M. A., Tang, H., Syam, M. S., Awwad, E. M., Sharaf, M., & Ghadi, Y. Y. (2024). Global production patterns: Understanding the relationship between greenhouse gas emissions, agriculture greening and climate variability. *Environmental Research*, 245, 118049.
- Bonsu, M. O.-A., Guo, Y., & Zhu, X. (2024). Does green innovation mediate corporate social responsibility and environmental performance? Empirical evidence from emerging markets. *Journal of Applied Accounting Research*, 25(2), 221–239.
- Brigham, Eguene F & Houston, J. F. (2019). (n.d.). *Dasar-Dasar Manajemen Keunagan Edisi 14 Buku 2. Salemba Empat. Jakarta Selatan.*
- Burdon, P. D., & Martel, J. (2023). Myth for the Anthropocene. In *The Routledge*

- Handbook of Law and the Anthropocene* (pp. 306–317). Routledge.
- Butler, T. (2011). Compliance with institutional imperatives on environmental sustainability: Building theory on the role of Green IS. *The Journal of Strategic Information Systems*, 20(1), 6–26.
- Cadiz Dyball, M. (1998). Corporate annual reports as promotional tools: the case of Australian National Industries Limited. *Asian Review of Accounting*, 6(2), 25–53.
- Caesaria, A. F., & Basuki, B. (2017). The study of sustainability report disclosure aspects and their impact on the companies' performance. *SHS Web of Conferences*, 34, 8001.
- Cai, W., Bai, M., & Davey, H. (2024). Mandatory environmental disclosure policy in the largest carbon emission country. *Pacific Accounting Review*, 36(5), 527–560.
- Can, O., & Turker, D. (2024). Institutional pressures and greenwashing in social responsibility: reversing the link with hybridization capability. *Management Decision*.
- Chirsty, E., & Sofie. (2023).
Pengaruh_Pengungkapan_Environmental_Social_Dan_Gov. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3899–3908.
- Choi, B., Lee, D., & Luo, L. (2024). Carbon Disclosure and Common Ownership. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 0148558X241264668.
- Corazza, L., Cottafava, D., Torchia, D., & Dhir, A. (2024). Interpreting stakeholder ecosystems through relational stakeholder theory: The case of a highly contested megaproject. *Business Strategy and the Environment*, 33(3), 2384–2412.
- Dagestani, A. A., Chen, P., Du, L., Hu, J., & Bilan, Y. (2024). The impacts of urban development orientation of resource-based cities on environmental information disclosure and greenwashing behavior of listed firms in China. *Environment, Development and Sustainability*, 1–26.
- Damayanti, N. D. (2024). Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor. *Neraca Manajemen, Ekonomi Vol*, 3(9).
- Damodaran, A. (2024). *The little book of valuation: How to value a company, pick a stock, and profit*. John Wiley & Sons.

- Dhayal, K. S., Agrawal, S., Agrawal, R., Kumar, A., & Giri, A. K. (2024). Green energy innovation initiatives for environmental sustainability: current state and future research directions. *Environmental Science and Pollution Research*, 1–19.
- Di Vaio, A., Zaffar, A., Chhabra, M., & Balsalobre-Lorente, D. (2024). Carbon accounting and integrated reporting for net-zero business models towards sustainable development: a systematic literature review. *Business Strategy and the Environment*, 33(7), 7216–7240.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.
- Difinubun, Y., & Nastiti, D. D. (2024). Global Research on ESG in Accounting Science: Bibliometrics analysis. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 18–27.
- Dimingu, H., & Mogaji, I. M. (2024). The Role of Board Dynamics in Organizational Transformation: A Corporate Governance Perspective. *Open Journal of Business and Management*, 12(2), 1209–1227.
- Edmans, A. (2023). The end of ESG. *Financial Management*, 52(1), 3–17.
- Edo, G. I., Itoje-akpokiniovo, L. O., Obasohan, P., Ikpekoru, V. O., Samuel, P. O., Jikah, A. N., Nosu, L. C., Ekokotu, H. A., Ugbune, U., & Oghroro, E. E. A. (2024). Impact of environmental pollution from human activities on water, air quality and climate change. *Ecological Frontiers*.
- Elfeky, M. I. (2017). (n.d.). ‘The extent of voluntary disclosure and its determinants in emerging markets: Evidence from Egypt’, *Journal of Finance and Data Science*, 3(1–4), pp. 45– 59. doi: 10.1016/j.jfds.2017.09.005.
- Erben Yavuz, A., Kocaman, B. E., Doğan, M., Hazar, A., Babuşcu, Ş., & Sutbayeva, R. (2024). The Impact of Corporate Governance on Sustainability Disclosures: A Comparison from the Perspective of Financial and Non-Financial Firms. *Sustainability*, 16(19), 8400.
- Fadilla, N., & Yenti, R. R. (2024). The Effect Of Sustainability Report Disclosure And Company Size On Market Reaction Moderated By Sustainability Report Assurance In

- Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange In 2019- 2023. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(6), 1285–1300.
- Faisal, F., Prastiwi, A. and Yuyetta, E. N. A. (2018). (n.d.). *'Board Characteristics, Environmental Vol. 08 No. 1 (2022)*.
- Fam, A., & Fam, S. (2024). Review of the US 2050 long term strategy to reach net zero carbon emissions. *Energy Reports*, 12, 845–860.
- Fathi, S., Mohammadin, Z., & Azarbayjani, K. (2024). Corporate finance signaling theory: an empirical analysis on the relationship between information asymmetry and the cost of equity capital. *International Journal of Disclosure and Governance*, 1–15.
- Fina, F., Maulidia, R., & Mustika, I. G. (2024). The effect of green accounting, carbon emission disclosure and profitability on company value. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(5), 685–694.
- Fornasari, T., & Traversi, M. (2024). The Impact of the CSRD and the ESRS on Non-Financial Disclosure. *Symphonya*, 1, 117–133.
- Fosu, E., Yi, K., & Asiedu, D. (2024). The effect of CSR on corporate social performance: Mediating role of corporate image, green innovation and moderating role of corporate identity. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(1), 69–88.
- Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder theory and the resource-based view of the firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757–1770.
- Freeman, R. E., Phillips, R., & Sisodia, R. (2020). Tensions in stakeholder theory. *Business & Society*, 59(2), 213–231.
- Fu, C., Yu, C., Guo, M., & Zhang, L. (2024). ESG rating and financial risk of mining industry companies. *Resources Policy*, 88, 104308.
- Gbadeyan, O. J., Muthivhi, J., Liganiso, L. Z., & Deenadayalu, N. (2024). Decoupling economic growth from carbon emissions: a transition toward low-carbon energy systems—a critical review. *Clean Technologies*, 6(3), 1076–1113.
- Gezgin, T., Özer, G., Merter, A. K., & Balcioğlu, Y. S. (2024). The Mediating Role of Corporate Governance in the Relationship between Net Profit and Equity and

- Voluntary Disclosure in the Context of Legitimacy Theory. *Sustainability*, 16(10), 4097.
- Ghazali, A., & Z. (2020). (n.d.). *Pengaruh pengungkapan environmental, social, and governance (ESG) terhadap tingkat profitabilitas perusahaan (studi empiris pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Prosiding SNAM PNJ, 1–13.*
- Ghozali, I. (2020) 25. (n.d.). *GRAND THEORY TEORI BESAR ILMU MANAJEMEN, AKUNTANSI, DAN BISNIS. Semarang: Yoga Pratama.*
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan eview 10.*
- Gomez-Trujillo, A. M., Gonzalez-Perez, M. A., & Baena-Rojas, J. J. (2024). Sustainable strategy as a lever for corporate legitimacy and long-term competitive advantage: an examination of an emerging market multinational. *European Business Review*, 36(1), 112–139.
- Ha, J., Grodal, S., & Zuckerman Sivan, E. W. (2024). Your Ancestors Worked Hard for this Legitimacy! Theory and Experiment on the Inauthenticity of Second Movers. *Organization Science*.
- Ha, N. M., Nguyen, P. A., Luan, N. V., & Tam, N. M. (2024). Impact of green innovation on environmental performance and financial performance. *Environment, Development and Sustainability*, 26(7), 17083–17104.
- Handayani, M. K. Y. (2019). The effect of ESG performance on economic performance in the high profile industry in Indonesia. *J Int Bus Econ*, 7, 112–121.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., Anggana Lisiantara, G., & Kartika, A. (2024). How does environmental, social, governance disclosure and political connection performance affect firm value? An empirical study in Singapore. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2377764.
- Hasselsteen, L., Lindhard, S. M., & Kanafani, K. (2024). Resource management at modern construction sites: Bridging the gap between scientific knowledge and industry practice and needs. *Journal of Environmental Management*, 366, 121835.
- Hou, D., Yan, J., Sun, Q., & Chen, Y. (2025). Short-selling and corporate ESG performance: evidence from China. *Sustainability Accounting, Management and*

- Policy Journal*, 16(2), 443–483.
- Hu, W., & He, X. (2024). The role of fiscal policies in supporting a transition to a low-carbon economy: Evidence from the Chinese shipping industry. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 179, 103940.
- Hua, W., Liu, C., & Li, C. (2024). Environmental Regulation, Government-Business Relations, and Corporate Green Innovation: Evidence from Low-Carbon City Pilot Policy. *Sustainability*, 16(22), 9949.
- Husada, E. V., & Handayani, S. (2021). Pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi empiris pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019). *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(2), 122–144.
- Hutasoit, H., & Wau, R. (2017). Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali). *Business Management Journal*, 13(2).
- Imelda, L., Ikhsan, S., & Espa, V. (2024). Analysis Of The Influence Of Profitability, Solvency, And Liquidity On Audit Report Lag With Company Size As A Moderation Variable In Property And Real Estate Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange During The Period 2018-2022. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 204–225.
- Issa, A. (2024). Do emissions reduction initiatives improve financial performance? Empirical analysis of moderating factors. *International Journal of Accounting & Information Management*, 32(2), 228–257.
- Issa, A., & In'airat, M. (2024). From words to action: unpacking the real impact of sustainability initiatives on carbon emissions reduction. *Social Responsibility Journal*, 20(3), 585–604.
- Jum'a, L., Zimon, D., Sroufe, R., & Tyan, J. (2024). Sustainable supply chain management's impact on triple bottom line performance: Does the firm size matter? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*.
- Kair, A. F., Magito, M., Perkasa, D. H., Wahdiniawati, S. A., & Febrian, W. D. (2023). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kompetensi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. *Jurnal Price: Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(01), 47–59.

- Kaplan, S. (2023). World is on brink of catastrophic warming, UN climate change report says. *Washington Post*, 20.
- Karman, A., Prokop, V., Giglio, C., & Rehman, F. U. (2024). Has the Covid-19 pandemic jeopardized firms' environmental behavior? Bridging green initiatives and firm value through the triple bottom line approach. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(1), 375–395.
- Khalil, N., Che Abdullah, S. N., Haron, S. N., & Hamid, M. Y. (2024). A review of green practices and initiatives from stakeholder's perspectives towards sustainable hotel operations and performance impact. *Journal of Facilities Management*, 22(4), 653–682.
- Khan, H. A. A. (2024). Corporate social responsibility and stakeholder management: A social science approach. *Global Journal of Econometrics and Finance*, 2(01), 13–25.
- Khatib, S. F. A., Ismail, I. H. M., Salameh, N., Abbas, A. F., Bazhair, A. H., & Sulimany, H. G. H. (2023). Carbon emission and firm performance: The moderating role of management environmental training. *Sustainability*, 15(13), 10485.
- Kiladze, L., Surmanidze, N., & Mushkudiani, Z. (2024). Social entrepreneurship & corporate social responsibility driving sustainable solutions: comparative analysis. *Access Journal*, 5(1), 85–101.
- Kim, M. M. (2024). How Do Institutional Investors Perceive Mandatory ESG Disclosure: Evidence From SEC's Mandatory Climate Change Disclosure Proposal. *Journal of Accounting & Finance (2158-3625)*, 24(4).
- König, P. D., & Wenzelburger, G. (2021). The legitimacy gap of algorithmic decision-making in the public sector: Why it arises and how to address it. *Technology in Society*, 67, 101688.
- Kouam, A. W. F. (2024). *ESG Integration in Corporate Governance: A Comparative Study of Practices in Emerging Markets*.
- Kujala, J., Lämsä, A.-M., & Riivari, E. (2017). Company stakeholder responsibility: An empirical investigation of top managers' attitudinal change. *Baltic Journal of Management*, 12(2), 114–138.

- Kumar, S., Chatterjee, U., David Raj, A., & Sooryamol, K. R. (2024). Global Warming and Climate Crisis/Extreme Events. In *Climate Crisis: Adaptive Approaches and Sustainability* (pp. 3–18). Springer.
- Kuncoro, A. H., Santosa, J., Fitriana, I., Nurrohim, A., Sugiyono, A., Slamet, E. D., Nurliyanti, V., Niode, N., & Wijaya, P. T. (n.d.). *Towards Net Zero Emission in Indonesia: Strategic Fuel Demand Analysis for Sustainable Electricity (2022-2060)*.
- Lamberton, G. (2015). Accounting and happiness. *Critical Perspectives on Accounting*, 29, 16–30.
- Lei, X., Wang, H., Deng, F., Li, S., & Chang, W. (2024). Sustainability Through Scrutiny: Enhancing Transparency in Chinese Corporations via Environmental Audits. *Journal of the Knowledge Economy*, 1–70.
- Lelkes, Y. (2016). Winners, losers, and the press: The relationship between political parallelism and the legitimacy gap. *Political Communication*, 33(4), 523–543.
- Lestari, C. A., & Riyadi, S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 46–57.
- Li, Z., Wang, X., & Wu, Z. (2024). Corporate environmental infringement, legal regulation, and sustainable development: punitive damages as a perspective. *Frontiers in Environmental Science*, 12, 1325375.
- Lim, M. K., Tan, K. R., & Roquiño, E. F. (2024). *Setting the Stage for Sustainability: An Environmental Impact Baseline Study of QCinema International Film Festival*.
- Lin, Y., Mahmood, M. A., Meng, W., & Ali, Q. (2024). Green economy transition in Asia Pacific: A holistic assessment of renewable energy production. *Journal of Cleaner Production*, 437, 140648.
- Lindsey, K., Mauck, N., & Olsen, B. (2021). The coming wave of small business succession and the role of stakeholder synergy theory. *Global Finance Journal*, 48, 100457.
- Line, T. B. (2017). Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Equity*, 3(4).
- Liu, J., Xiong, X., Gao, Y., & Zhang, J. (2023). The impact of institutional investors on

- ESG: Evidence from China. *Accounting & Finance*, 63, 2801–2826.
- Liu, X., Grant, D. B., & Wei, Z. (2024). Strategic initiatives and institutional conformity for low carbon supply chain integration. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 27(9), 1551–1568.
- Lu, T., Ruan, L., Wang, Y., & Yu, L. (2024). Real effects of greenhouse gas disclosures. *China Journal of Accounting Research*, 17(2), 100360.
- Lugo-Morin, D. R. (2021). Global future: low-carbon economy or high-carbon economy? *World*, 2(2), 175–193.
- Luo, J., Zhuo, W., Liu, S., & Xu, B. (2024). The optimization of carbon emission prediction in low carbon energy economy under big data. *IEEE Access*.
- MacLeod, A. J. (2024). Why Equity Follows the Law. *Laws*, 13(1), 3.
- Madi, S. (2024). Power resources, institutional legacy and labour standards transformation: Lessons from two developing countries. *Economic and Industrial Democracy*, 45(4), 987–1015.
- Mahajan, R., Kumar, S., Lim, W. M., & Sareen, M. (2024). The role of business and management in driving the sustainable development goals (SDGs): Current insights and future directions from a systematic review. *Business Strategy and the Environment*, 33(5), 4493–4529.
- Makhija, H., Raghukumari, P. S., & Sharma, D. (2025). Exploring the Nexus between Company ESG Performance and Dividend Policy: An Aggregate, Disaggregate, and Industry-Wide Panel Analysis. *Australasian Accounting Business & Finance Journal*, 19(1), 45–63.
- Maman, A., Dias, J. G., & Bassi, F. (2024). Sustainability-oriented management in the SMEs. A multilevel analysis in the European Union. *Journal of Environmental Management*, 365, 121559.
- Martha, H., & Khomsiyah, K. (2023). The effects of environmental, social, and governance (ESG) on corporate performance. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 17(1), 112–120.
- Maryanti, E., & Fithri, W. N. (2017). Corporate social responsibility, good corporate governance, kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dan pengaruhnya pada nilai perusahaan. *Journal of Accounting Science*, 1(1), 21–37.

- Mechrgui, S., & Theiri, S. (2024). The effect of environmental, social, and governance (ESG) performance on the volatility of stock price returns: the moderating role of tax payment. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Melinda, A., & Wardhani, R. (2020). The effect of environmental, social, governance, and controversies on firms' value: evidence from Asia. In *Advanced issues in the economics of emerging markets* (pp. 147–173). Emerald Publishing Limited.
- Meutia, I., Kartasari, S. F., & Yaacob, Z. (2022). Stakeholder or legitimacy theory? The rationale behind a company's materiality analysis: Evidence from Indonesia. *Sustainability*, *14*(13), 7763.
- Mishra, A. (n.d.). *Master of Technology in Agricultural Engineering (Soil and Water Engineering)*.
- Moehler, M., & Thrasher, J. (2024). New Social Contract Theory. *New Approaches to Social Contract Theory: Liberty, Equality, Diversity, and the Open Society*, 1.
- Morrison, E. A., Adu, D. A., Yongsheng, G., Kimani, D., & Saa, V. Y. (2024). Assessing the Impact of Board Sustainability Committees on Greenhouse Gas Performance: Evidence From Industrialised European Countries. *Business Strategy and the Environment*.
- Mousa, G., & Hassan, N. T. (2015). Legitimacy theory and environmental practices: Short notes. *International Journal of Business and Statistical Analysis*, *2*(01).
- Moussa, A. S., & Elmarzouky, M. (2024). Beyond compliance: how ESG reporting and strong governance influence financial performance in UK firms. *Journal of Risk and Financial Management*.
- Muharman, D. (2024). Sustainable Business of Kopi Kenangan as a Startup Company in Improving the Company's Reputation and Competitiveness. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 82–90.
- Mulpiani, W. (2019). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(2), 77–90.
- Nanik Ermawati dan Yanuar Nugroho, N. S. (2023). (N.D.). *Pelaporan Environment Social Governance (Esg) Dari Sudut Pandang Filsafat Jawa Berdimensi "Hamemayu Hayuning Bawana."*

- วารสารราชภัฏการมหาวิท ยาลย้อสี่เทริน เอเซยี, 4(1), 88–100.
- Nasta, L., Magnanelli, B. S., & Ciaburri, M. (2024). From profits to purpose: ESG practices, CEO compensation and institutional ownership. *Management Decision*, 62(13), 46–68.
- Nasution, S. W. P., Wardhani, W., Sa'diah, K., Simanjuntak, V. C., & Rianto, R. (2024). Exploring the Correlation Between Corporate Governance and Financial Performance of Listed Companies in Indonesia's Stock Market. *The Journal of Academic Science*, 1(8), 1001–1015.
- Nijs, T., Martinovic, B., & Verkuyten, M. (2024). The two routes of collective psychological ownership: Rights and responsibilities explain intentions to exclude outsiders and engage in stewardship behavior. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 50(2), 270–284.
- Nishitani, K., Park, J. D., & Haider, M. B. (2024). Bridging the Gap Between Legitimacy and Voluntary Disclosure Theory and Current Corporate Nonfinancial Reporting Practices: Insights From Japanese Companies. *Business Strategy and the Environment*.
- Nketiah, E., Song, H., Adjei, M., Obuobi, B., & Adu-Gyamfi, G. (2024). Assessing the influence of research and development, environmental policies, and green technology on ecological footprint for achieving environmental sustainability. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 199, 114508.
- Novemyanto, A. D., & Nazri, M. (2024). Life Cycle Assessment (LCA) Method As Environmental Law Enforcement In Green Economic Development. *ICEETE Conference Series*, 2(1), 268–280.
- Nugraha, R., Varlitya, C. R., Judijanto, L., Adiwijaya, S., Suryahani, I., Murwani, I. A., Sopiana, Y., Boari, Y., Kartika, T., & Fatmah, F. (2024). *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang di Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurfatimah, U. F., & Difinubun, Y. (2024). Sustainability Accounting: Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosures, Low Carbon Economy and Green Initiatives. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 38–55.
- Nurhayati, Y., Said, M. Y., & Yanova, M. H. (2024). Carbon Pricing Policy to Support

- Net Zero Emission: A Comparative Study of Indonesia, Finland and Sweden. *Environmental Policy and Law*, 54(1), 53–63.
- Nurseha, S. S., Kamelia, E. A., Suri, V. P. N. B., & Fikri, M. A. H. (2024). Urgensi Transisi Green Economy Oleh Generasi Muda Terhadap Pengaruh Pembangunan Berkelanjutan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 133–151.
- Nuryakin, N., & Maryati, T. (2022). Do green innovation and green competitive advantage mediate the effect of green marketing orientation on SMEs' green marketing performance? *Cogent Business & Management*, 9(1), 2065948.
- Octavio, M. F. R., & Setiawan, D. (2024). The influence of board characteristics, ownership structure and public attention on climate change disclosure in banking sector companies. *Business Strategy & Development*, 7(2), e394.
- Oke, A. E., Oyediran, A. O., Koriko, G., & Tang, L. M. (2024). Carbon trading practices adoption for sustainable construction: A study of the barriers in a developing country. *Sustainable Development*, 32(1), 1120–1136.
- Ombai, P., Kiflemariam, A., & Odollo, L. (2024). Financial and Non-Financial Information on Strategy Management Process; A Systematic Literature Review. *Journal of Strategic Management*, 8(1), 33–64.
- Oyerogba, E. O., Olugbenro, S. K., Omojola, S. O., Wright, O., Aregbesola, O. D., Akinsola, T. O., & Amu, I. (2025). The Roles of Ownership Structure on Carbon Emission Disclosure Quality of the Listed Oil and Gas Companies in Nigeria. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15(1), 25–35.
- Penuelas, J., Coello, F., & Sardans, J. (2023). A better use of fertilizers is needed for global food security and environmental sustainability. *Agriculture & Food Security*, 12(1), 1–9.
- Pham, T. Q. A., & Nguyen, Q. L. H. T. T. (2024). Climate change and firm performance: the case of top 100 largest companies in Vietnam. *THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, LAW AND GOVERNMENT (ELG 2024)*, 177.
- Pradhani, T. B. W., Shabana, M. A., & Pandin, M. Y. R. (2024). The impact of improving environmental performance and implementing environmental cost

- allocation on company profitability. *Jurnal Ekonomi*, 13(01), 1069–1080.
- Priyanto, U., Murti, G. W., Sevie, G. N., Masfuri, I., Syaftika, N., Septriana, D., & Dewi, E. L. (n.d.). Exploring Preferences for Alternative Cooking Fuels to Lpg in Indonesia. Available at SSRN 4848315.
- Purnamasari, B. D., & Nurachmah, A. E. (2023). The fair and acceptable implementation of carbon market in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1267(1), 12034.
- Puteri, D. S. (2024). Making Indonesia Sustainable: Shaping the Law to Reduce Digital Carbon Footprint. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 6(1), 77–102.
- Putra, I. G. (2024). BEYOND THE TRIPLE BOTTOM LINE CONCEPT: ADDING SPIRITUAL LEVEL DIMENSION. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 146(2), 106–114.
- Qian, W., Parker, L., & Zhu, J. (2024). Corporate environmental reporting in the China context: The interplay of stakeholder salience, socialist ideology and state power. *The British Accounting Review*, 56(1), 101198.
- Qin, J., Jia, M., & Sun, J. (2024). Examining the effects of elevated CO₂ on the growth kinetics of two microalgae, *Skeletonema dohrnii* (Bacillariophyceae) and *Heterosigma akashiwo* (Raphidophyceae). *Frontiers in Marine Science*, 11, 1347029.
- Qing, L., Li, P., Woo, C., & Zhong, K. (2024). Does climate change exposure impact on corporate finance and energy performance? Unraveling the moderating role of CEOs' green experience. *Journal of Cleaner Production*, 461, 142653.
- Rahmani, D. A., Munawar, A. H., & Dermawan, W. D. (2024). GREEN FINANCE DALAM PERSPEKTIF ANALISIS BIBLIOMETRIK: TREND, KONTRIBUSI, DAN IMPLIKASI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 177–198.
- Ramadhan, M. L., Nugraha, F., Prastowo, D. A., Kusumawardhani, A., & Raharjo, S. T. (2024). Development of Environmentally Friendly Technology for Key Industries in Achieving Golden Indonesia. *Research Horizon*, 4(4), 205–220.
- Ramadhan, P., Rani, P., & Wahyuni, E. S. (2023). Disclosure of carbon emissions,

- covid-19, green innovations, financial performance, and firm value. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 25(1), 1–16.
- Ramlawati, R., Junaid, A., Alattas, S. N., & Muslim, M. (2022). The effect of environmental performance on profitability with environmental disclosure as moderating. *Jurnal Akuntansi*, 26(2), 306–323.
- Rana, G., & Arya, V. (2024). Green human resource management and environmental performance: mediating role of green innovation—a study from an emerging country. *Foresight*, 26(1), 35–58.
- Rau, P. R., & Yu, T. (2024). A survey on ESG: investors, institutions and firms. *China Finance Review International*, 14(1), 3–33.
- Ray, S., & Hardi, I. (2024). Refining ESG Disclosure’s Role in Corporate Economic, Environmental, and Social Sustainability Performance. *Indatu Journal of Management and Accounting*, 2(1), 1–8.
- Rehman, A., Alam, M. M., Ozturk, I., Alvarado, R., Murshed, M., Işık, C., & Ma, H. (2023). Globalization and renewable energy use: how are they contributing to upsurge the CO2 emissions? A global perspective. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(4), 9699–9712.
- Reid, A., Ringel, E., & Pendleton, S. M. (2024). Transparency reports as CSR reports: motives, stakeholders, and strategies. *Social Responsibility Journal*, 20(1), 81–107.
- Rejeb, A., Rejeb, K., Kayikci, Y., Appolloni, A., & Treiblmaier, H. (2024). Mapping the knowledge domain of green procurement: A review and bibliometric analysis. *Environment, Development and Sustainability*, 26(12), 30027–30061.
- Ren, F. (2024). Does Government Environmental Concern Affect Enterprise Sustainable Development? Evidence from China. *Sustainability*, 16(21), 9527.
- Rinsman, T. C. S., & Prasetyo, A. B. (2020). The effects of financial and environmental performances on firm value with environmental disclosure as an intervening variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(2), 90–99.
- Rivero-Gutiérrez, L., Cabanelas, P., Díez-Martín, F., & Blanco-González, A. (2024). How can companies boost legitimacy in international markets? A dynamic marketing capabilities approach. *International Marketing Review*, 41(1), 273–301.

- Rohani, A., & Jabbour, M. (2024). Carbon media legitimacy in UK companies: actions or words? *Journal of Applied Accounting Research*, 25(2), 298–324.
- Rokhmawati, A., Sarasi, V., & Berampu, L. T. (2024). Scenario analysis of the Indonesia carbon tax impact on carbon emissions using system dynamics modeling and STIRPAT model. *Geography and Sustainability*, 5(4), 577–587.
- Saeed, U. F., Kamil, R., & Wiredu, I. (2024). The moderating role of technological innovation on ownership structure, financing decisions and environmental accounting disclosure. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2396543.
- Saputra, I. (2020). the Influence of Environmental Performance, Organizational Reputation, Environmental Disclosure and Environmental Strategy on Bussiness Performance. *International Journal of Contemporary Accounting*, 2(2), 173–190.
- Saragih, J. R., Purwoko, A., & Asaad, M. (2024). Classifying Economic Sectors to Improve Regional Development Priorities in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(5).
- Sari, P. A., Rays, M., Purwanti, P., & Hidayat, I. (2024). Achievement of Carbon Emission Disclosure as a Mediator between Factors Increasing Firm Value: Eco-efficiency and Green Innovation. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(6), 246–253.
- Sari, R. D. P., Nurjaya, I. N., Puspitawati, D., & Monteiro, S. (2024). State Financial Losses as a Result of Environmental Damage. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(1), 121–148.
- Sari, R., & Muslim, M. (2024). Corporate Transparency and Environmental Reporting: Trends and Benefits. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 4(1), 1–18.
- Selin, H. (2024). *Introducing a New Payment Method in Finnish E-Commerce*.
- Senir, G. (2024). Evaluation of the environmental sustainability performance of Eastern European countries with integrated MCDM methods. *International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences*, 8(2), 378–391.
- Shan, C., & Ji, X. (2024). Environmental Regulation and Green Technology Innovation: An Analysis of the Government Subsidy Policy's Role in Driving Corporate Green Transformation. *Industrial Engineering and Innovation*

Management, 7(1), 39–46.

- Siagian, N. (2024). The role of economic policies to adopt renewable energy and digital technology on business decisions and HR management in the Indonesian mining sector. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(2), 632–641.
- Singhal, N., & Kapur, D. (2024). Mind your own business and communicate the same!—signaling content that makes investors interested. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 16(4), 1023–1042.
- Singhania, M., & Bhan, I. (2024). Firm ownership structure and voluntary carbon disclosure: a systematic review and meta-analysis. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*.
- Slaper, T., & Hall, T. (2011). The Triple Bottom Line : What Is It and How Does It Work? *Indiana University Kelley School of Business*, 86(1), 4–8.
- Smith, J. D., Adam, R., & Maarif, S. (2024). How social movements use religious creativity to address environmental crises in Indonesian local communities. *Global Environmental Change*, 84, 102772.
- Smith, P. A. C., & Sharicz, C. (2011). The shift needed for sustainability. *The Learning Organization*, 18(1), 73–86.
- Sofyanty, Y. R., Hamid, D., & Dewantara, R. Y. (2017). *Analisis Penerapan CSR dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Hotel Ibis Surabaya City Center)*. Brawijaya University.
- Spanuth, A., & Urbano, D. (2024). Exploring social enterprise legitimacy within ecosystems from an institutional approach: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 26(2), 211–231.
- Srivastav, A. (2024). Nature’s Nonpareil Gift—Forests. In *Forest Policies, Laws, and Governance in India: Conservation Challenges in the Face of Climate Change* (pp. 63–94). Springer.
- Statore, R. L. D. (2019). *Public Understanding of Climate Science, Extreme Weather and Climate Attribution*. Carnegie Mellon University.
- Su, E., Mahmood, R., & Md. Som, H. (2024). Navigating external pressures: a study on CSR disclosure practices in an emerging region. *Cogent Business &*

Management, 11(1), 2375408.

Sugiarto, A. (2018). *Manajemen kearsipan modern*.

Sugiyono. (2017). (n.d.). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sujatmiko, D. B., Difinubun, Y., & Munzir, M. (2024). Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia diprosikan dengan Profitabilitas. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 69–79.

Sukumaran, K. (2022). Impact of Human Activities Inducing and Triggering of Natural Disasters. In *A System Engineering Approach to Disaster Resilience: Select Proceedings of VCDRR 2021* (pp. 17–31). Springer.

Sullivan, R., & Robinson, M. (2017). *Business and human rights: dilemmas and solutions*. Routledge.

Sun, Y. (2024). The real effect of innovation in environmental, social, and governance (ESG) disclosures on ESG performance: An integrated reporting perspective. *Journal of Cleaner Production*, 460, 142592.

Tajuddin, A. H., Akter, S., Mohd-Rashid, R., & Mehmood, W. (2024). The influence of board size and board independence on triple bottom line reporting. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 42(3), 1026–1043.

Talan, G., Sharma, G. D., Pereira, V., & Muschert, G. W. (2024). From ESG to holistic value addition: Rethinking sustainable investment from the lens of stakeholder theory. *International Review of Economics & Finance*, 96, 103530.

Tektona, R. I., Harefa, J. M. A., & Yasa, I. W. (2025). Legal Certainty in Carbon Trading in Indonesia. *Simbur Cahaya*, 31(2), 208–231.

Tetteh, L. A., Agyenim-Boateng, C., & Simpson, S. N. Y. (2024). Institutional pressures and accountability processes in pursuit of sustainable development goals: Insights from Ghanaian indigenous oil companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(1), 89–107.

Thanissery, V. V. (n.d.). *A Sustainable Approach for the Reduction of Carbon Dioxide*

Emissions in the Latvian Construction Industry.

- Tjahjono, M. E. S. (2024). THE OTHER FACE OF ACCOUNTING RESEARCH: A Perspective From Sociological Theory. *JOURNAL OF MANAGEMENT, ACCOUNTING, GENERAL FINANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES*, 3(2), 516–535.
- Torres, P., Silva, P., & Augusto, M. (2024). Equity ownership concentration and firm growth: the moderating role of industry growth. *Management Research Review*, 47(7), 1096–1111.
- Tracy, T. C. (2024). *How to read a financial report: wringing vital signs out of the numbers*. John Wiley & Sons.
- Trenberth, K. E. (2018). Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 36(4), 463–481.
- Umoh, A. A., Ohenhen, P. E., Chidolue, O., Ngozichukwu, B., Fafure, A. V., & Ibekwe, K. I. (2024). Incorporating energy efficiency in urban planning: A review of policies and best practices. *Engineering Science & Technology Journal*, 5(1), 83–98.
- Uswatul, F. N., Difinubun, Y., & Khaerani, A. (2024). *Akuntansi Keberlanjutan : Pengungkapan Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (ESG), Ekonomi Rendah Karbon dan Informasi Akuntansi Hijau*. 2(1), 34–45.
- Utami, S. S. (2021). *Menuju Bangunan Zero Energy di Indonesia*. UGM PRESS.
- Vazhynskyi, V., Pohoretskyi, M., & Toporetska, Z. (2024). Responsible Business Practice By Institutional Investors As The Basic Means Of Preventing Violations Of Public Interest Of Citizen Investors. *Baltic Journal of Economic Studies*, 10(1), 20–29.
- Velte, P. (2024). A literature review concerning the non-carbon-related environmental goals of the EU Taxonomy Regulation and the European Sustainability Reporting Standards (ESRS). *Journal of Global Responsibility*.
- Walmsley, A., & Wraae, B. (2024). Taken for granted or wilfully ignored? Seeking legitimacy for the entrepreneurship educator. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*.

- Wang, S., Chen, S., Ali, M. H., & Tseng, M. (2024). Nexus of environmental, social, and governance performance in China-listed companies: Disclosure and green bond issuance. *Business Strategy and the Environment*, 33(3), 1647–1660.
- Wang, X., & Wu, L. (2024). Intergenerational differences in the environmental concerns of plastic waste business owners: environmental knowledge, environmental risk exposure, and community connection as mediators. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–13.
- Weniger, S., & Jarchow, S. (2024). Corporate venturing in times of crisis: securing resources through legitimacy. *Review of Managerial Science*, 1–55.
- Wiessner, Y. T., Giuliani, E., Wijen, F., & Doh, J. (2024). Towards a more comprehensive assessment of FDI's societal impact. *Journal of International Business Studies*, 55(1), 50–70.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wong, T. J., Yu, G., Zhang, S., & Zhang, T. (2024). Calling for transparency: Evidence from a field experiment. *Journal of Accounting and Economics*, 77(1), 101604.
- Wu, D., & Xie, Y. (2024). Unveiling the impact of public data access on collaborative reduction of pollutants and carbon emissions: Evidence from open government data policy. *Energy Economics*, 138, 107822.
- Wu, G., Sun, M., & Feng, Y. (2024). How does the new environmental protection law affect the environmental social responsibility of enterprises in Chinese heavily polluting industries? *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–14.
- Wu, Q. (2024). Power play in carbon trading market: How status of executives with R&D background incentives companies' low-carbon innovation. *Energy Policy*, 188, 114049.
- Yacob, P., Wong, L. S., & Khor, S. C. (2019). An empirical investigation of green initiatives and environmental sustainability for manufacturing SMEs. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 30(1), 2–25.
- Yadav, A., Gyamfi, B. A., Asongu, S. A., & Behera, D. K. (2024). The role of green

- finance and governance effectiveness in the impact of renewable energy investment on CO2 emissions in BRICS economies. *Journal of Environmental Management*, 358, 120906.
- Yanti, F., & Rasmini, N. K. (2015). Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dan Faktor Yang Mempengaruhi : Studi Di Perusahaan Indonesia Dan Singapura. *Akuntansi*, 13(2), 499–512.
- Yustina, A. I., Dewi, C. N., Mahmudah, H., & Andrianantenaina, H. (2024). Corporate governance mechanism for carbon emission disclosure: Evidence from state-owned enterprises in Indonesia. *Global Business & Finance Review (GBFR)*, 29(4), 28–42.
- Zameer, H., Wang, Y., & Yasmeen, H. (2024). Strengthening green competitive advantage through organizational learning and green marketing capabilities in a big data environment: a moderated-mediation model. *Business Process Management Journal*, 30(6), 2047–2072.
- Zaporowska, Z., & Szczepański, M. (2024). The Application of Environmental, Social and Governance Standards in Operational Risk Management in SSC in Poland. *Sustainability*, 16(6), 2413.
- Zhang, Y. (2024). *I Am New but Social: How and When Different Types of Social Networks Influence Newcomers' Organizational Socialization*. Pepperdine University.
- Zhu, Q., Duan, Y., & Sarkis, J. (2024). Supply chain carbon transparency to consumers via blockchain: does the truth hurt? *The International Journal of Logistics Management*, 35(3), 833–864.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Sampel Data Perusahaan mengikuti PROPER

No.	Nama Entitas	Kode Emiten
1	PT Adaro Indonesia	ADRO
2	PT Aneka Tambang, Tbk.	ANTM
3	PT Astra Internasional	ASII
4	PT Austindo Nusantara Jaya	ANJT
5	PT Austindo Nusantara Jaya Agri	ANJA
6	PT Barito Pacifik, Tbk.	BRPT
7	PT Biofarma	INAF
8	PT Bukit Asam	PTBA
9	PT Bumi Resource, Tbk.	BUMI
10	PT Candra Asri Petrochemical, Tbk.	TPIA
11	PT Cikarang Listrindo	POWR
12	PT Elnusa, Tbk.	ELSA
13	PT Indika Energy, Tbk.	INDY
14	PT Indonesia Asahan Aluminium	TINS
15	PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk.	INTP
16	PT Indonesia Power	KRYA
17	PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.	JPFA
18	PT JOB Pertamina - Medco E&P Tomori	MEDC
19	PT Kalbe Farma	KLBF
20	PT Pertamina	PGEO
21	PT Pertamina EP Asset 1 - Field Rantau	PGEO
22	PT Pertamina Geothermal Energy	PGEO
23	PT Pertamina Hulu Indonesia	PGEO
24	PT Perusahaan Gas Negara, Tbk.	PGAS
25	PT Petrokimia Gresik	PIHC
26	PT Petrosea, Tbk.	PTRO
27	PT Phapros, Tbk.	PEHA
28	PT PLN	PLN
29	PT Pupuk Indonesia	PIHC
30	PT Pupuk Iskandar Muda	PIHC
31	PT Pupuk Kalimantan Timur	PIHC
32	PT Pupuk Kujang	PIHC
33	PT SRIWIdjaja Palembang	PIHC
34	PT Sahabat Mewah Dan Makmur	ANJA
35	PT Sumber Graha Sejahtera (Sampoerna Kayoe)	SGER
36	PT Semen Indonesia	SMGR
37	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido SIDOMUNCUL	SIDO
38	PT Solusi Bangun, Tbk.	SMBC
39	PT Timah, Tbk.	TINS
40	PT Toyota Motor Manufacturing	TMMIN
41	PT United Tractors	UNTR
42	PT Vale Indonesia	INCO

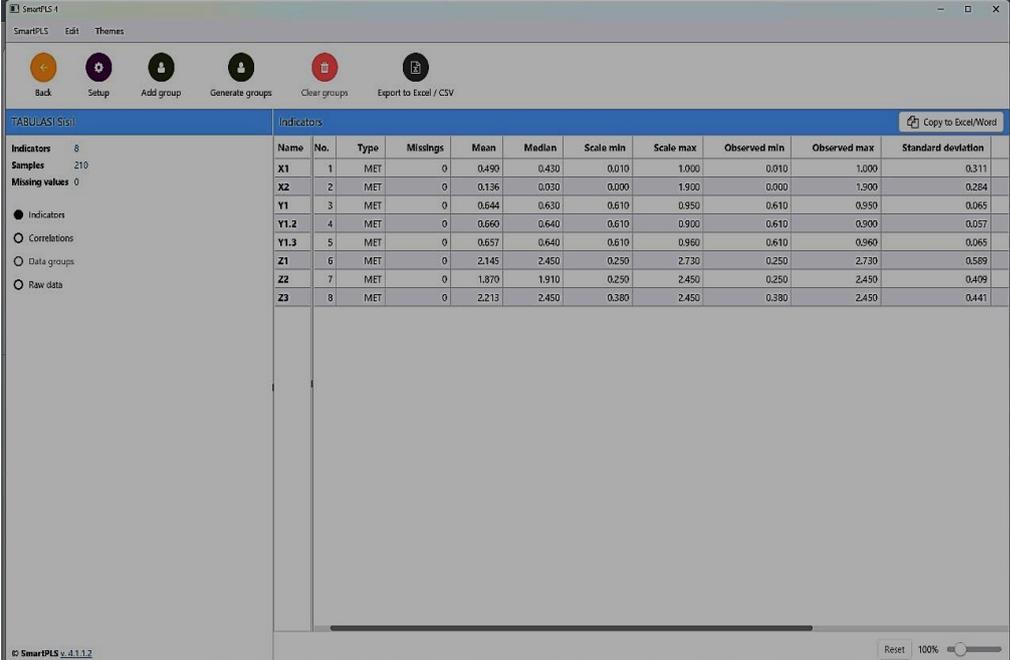
Lampiran 2.1 Tabulasi Data Perusahaan

N0	X1	X2	Y1	Y1.2	Y1.3	Z1	Z2	Z3
1	0.44	0.19	0.94	0.90	0.95	0.25	0.38	0.45
2	0.44	0.17	0.92	0.90	0.96	0.25	0.38	0.45
3	0.41	0.18	0.91	0.90	0.91	0.25	0.38	0.45
4	0.41	0.19	0.93	0.90	0.92	0.25	0.38	0.45
5	0.41	0.18	0.95	0.90	0.93	0.25	0.38	0.45
6	0.35	0.17	0.94	0.90	0.95	0.45	0.25	0.38
7	0.35	0.18	0.92	0.90	0.94	0.45	0.25	0.38
8	0.35	0.19	0.93	0.90	0.95	0.45	0.25	0.38
9	0.35	0.18	0.95	0.90	0.93	0.45	0.25	0.38
10	0.35	0.17	0.91	0.90	0.91	0.45	0.25	0.38
11	0.50	0.01	0.65	0.64	0.67	0.38	1.64	2.18
12	0.50	0.01	0.63	0.64	0.67	0.38	1.64	2.18
13	0.50	0.01	0.64	0.64	0.67	0.38	1.64	2.18
14	0.50	0.01	0.62	0.64	0.67	0.38	1.64	2.18
15	0.50	0.01	0.61	0.64	0.67	0.38	1.64	2.18
16	0.08	0.03	0.64	0.64	0.67	0.38	1.91	2.45
17	0.08	0.04	0.62	0.64	0.67	0.38	1.91	2.45
18	0.08	0.00	0.65	0.64	0.67	0.38	1.91	2.45
19	0.08	0.04	0.61	0.64	0.67	2.45	1.91	2.45
20	0.08	0.76	0.63	0.64	0.67	2.45	1.91	2.45
21	0.08	0.03	0.65	0.64	0.64	2.18	1.91	2.18
22	0.08	0.04	0.63	0.61	0.64	2.18	1.91	2.45
23	0.08	0.00	0.64	0.63	0.64	2.18	1.91	2.45
24	0.08	0.04	0.62	0.65	0.64	1.91	1.91	2.45
25	0.09	0.76	0.61	0.62	0.64	1.91	1.91	2.45
26	0.26	0.00	0.65	0.61	0.64	2.45	1.91	2.18
27	0.26	0.00	0.63	0.64	0.64	2.45	1.64	2.18
28	0.27	0.02	0.61	0.63	0.64	2.45	1.91	2.18

29	0.27	0.05	0.64	0.65	0.64	2.73	1.64	2.45
29	0.27	0.01	0.62	0.62	0.64	2.73	1.64	2.45
30	0.68	0.01	0.64	0.64	0.67	2.45	1.64	2.45
31	0.68	0.06	0.62	0.64	0.67	2.45	1.64	2.45
32	0.68	0.06	0.65	0.64	0.67	2.45	1.64	2.45
33	0.68	0.06	0.61	0.64	0.67	2.45	1.64	2.45
34	0.68	0.06	0.63	0.64	0.67	2.45	1.64	2.45
35	0.31	0.02	0.65	0.64	0.67	2.45	1.91	2.45
36	0.31	0.04	0.63	0.64	0.67	2.45	1.91	2.45
37	0.34	0.01	0.64	0.64	0.67	2.45	1.91	2.45
38	0.34	0.01	0.62	0.64	0.67	2.45	1.91	2.45
39	0.34	0.02	0.61	0.64	0.67	2.45	1.91	2.45
40	0.77	0.79	0.65	0.61	0.64	2.18	1.91	2.45
41	0.73	0.02	0.63	0.64	0.64	2.18	1.91	2.45
42	0.74	0.02	0.64	0.63	0.64	2.18	1.91	2.45

Lampiran 3.1 Hasil Analisis Data

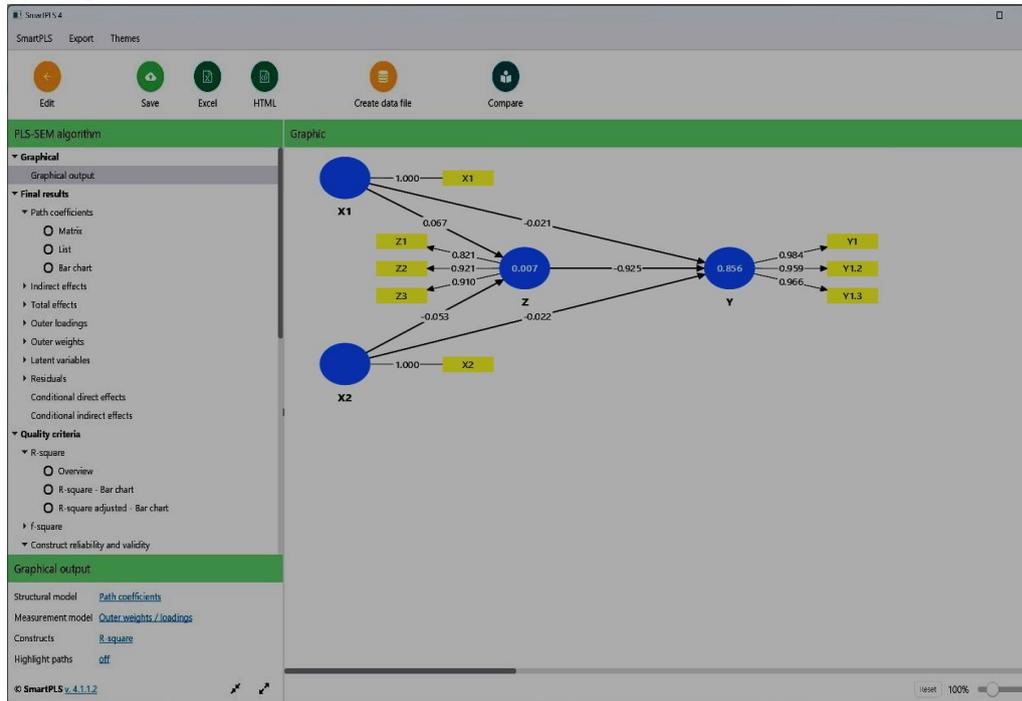
Uji Statistik Deskriptif



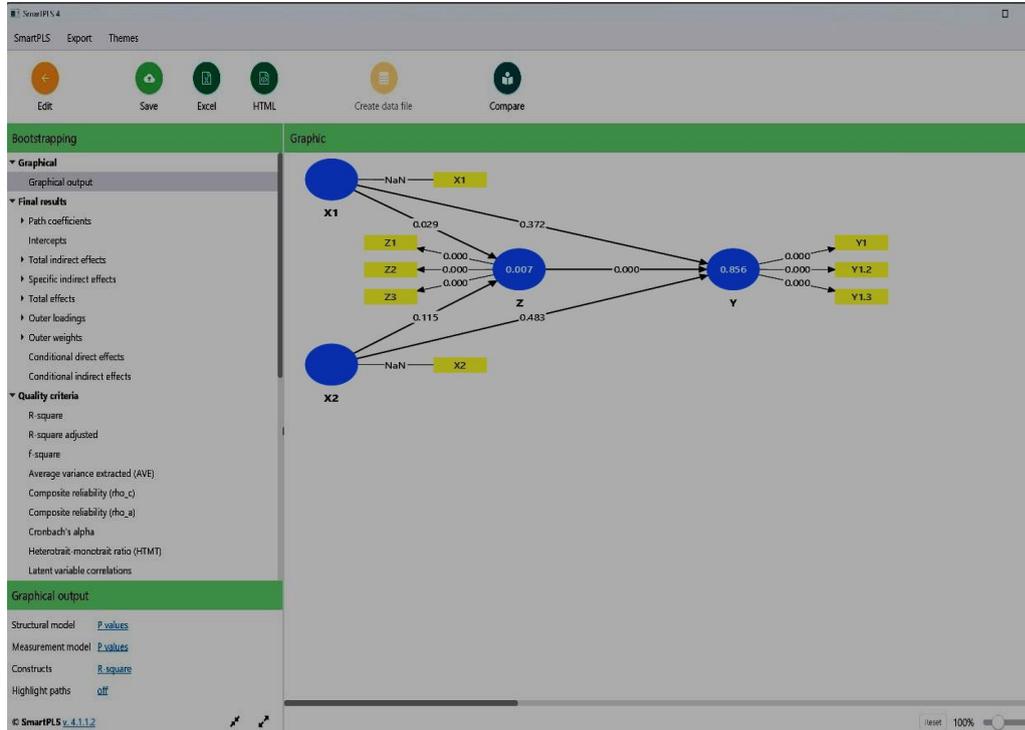
The screenshot displays the SmartPLS 4 interface with a table of indicator statistics. The table includes columns for Name, No., Type, Missings, Mean, Madian, Scale min, Scale max, Observed min, Observed max, and Standard deviation. The indicators listed are X1, X2, Y1, Y1.2, Y1.3, Z1, Z2, and Z3.

Name	No.	Type	Missings	Mean	Madian	Scale min	Scale max	Observed min	Observed max	Standard deviation
X1	1	MET	0	0.490	0.430	0.010	1.000	0.010	1.000	0.311
X2	2	MET	0	0.136	0.030	0.000	1.900	0.000	1.900	0.284
Y1	3	MET	0	0.644	0.630	0.610	0.950	0.610	0.950	0.065
Y1.2	4	MET	0	0.660	0.640	0.610	0.900	0.610	0.900	0.057
Y1.3	5	MET	0	0.657	0.640	0.610	0.960	0.610	0.960	0.065
Z1	6	MET	0	2.145	2.450	0.250	2.730	0.250	2.730	0.589
Z2	7	MET	0	1.870	1.910	0.250	2.450	0.250	2.450	0.409
Z3	8	MET	0	2.213	2.450	0.380	2.450	0.380	2.450	0.441

Uji Hipotesis – Outer Model



Uji Hipotesis - Outer Bootstrapping



SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

Bootstrapping Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values Copy to Excel/Word Copy to R

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
X1 -> Y1	-0.021	-0.020	0.023	0.892	0.372
X1 -> Z	0.067	0.066	0.031	2.184	0.029
X2 -> Y1	-0.022	-0.022	0.031	0.702	0.483
X2 -> Z	-0.053	-0.056	0.034	1.576	0.115
Z -> Y1	-0.925	-0.921	0.025	37.702	0.000

Final results

- Path coefficients
 - Mean, STDEV, T values, p values
 - Confidence intervals
 - Confidence intervals bias corrected
- Intercepts
- Total indirect effects
- Specific indirect effects
- Total effects
- Outer loadings
- Outer weights
- Conditional direct effects
- Conditional indirect effects
- Quality criteria
 - R-square
 - R-square adjusted
 - F-square
 - Average variance extracted (AVE)
 - Composite reliability (rho_c)
 - Composite reliability (rho_a)
 - Cronbach's alpha
 - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
 - Latent variable correlations
 - Outer model collinearity statistics (VIF)
 - Inner model collinearity statistics (VIF)
- Model fit

© SmartPLS v. 4.1.1.2 Reset 100%

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

Bootstrapping Specific indirect effects - Mean, STDEV, T values, p values Copy to Excel/Word Copy to R

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
X1 -> Z -> Y1	-0.062	-0.061	0.029	2.149	0.032
X2 -> Z -> Y1	0.049	0.051	0.031	1.585	0.113

Final results

- Path coefficients
 - Mean, STDEV, T values, p values
 - Confidence intervals
 - Confidence intervals bias corrected
- Intercepts
- Total indirect effects
 - Mean, STDEV, T values, p values
 - Confidence intervals
 - Confidence intervals bias corrected
- Specific indirect effects
 - Mean, STDEV, T values, p values
 - Confidence intervals
 - Confidence intervals bias corrected
- Total effects
- Outer loadings
- Outer weights
- Conditional direct effects
- Conditional indirect effects
- Quality criteria
 - R-square
 - R-square adjusted
 - F-square
 - Average variance extracted (AVE)
 - Composite reliability (rho_c)
 - Composite reliability (rho_a)
- Model fit

© SmartPLS v. 4.1.1.2 Reset 100%

Uji Convergent Validity

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm Outer loadings - Matrix Copy to Excel/Word Copy to R

	X1	X2	Y1	Z
X1	1.000			
X2		1.000		
Y1			0.984	
Y2			0.959	
Y3			0.966	
Z1				0.821
Z2				0.921
Z3				0.910

© SmartPLS v.4.1.1.2

Uji Discriminant Validity

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm Discriminant validity - Cross loadings Copy to Excel/Word Copy to R

	X1	X2	Y1	Z
X1	1.000	-0.011	-0.083	0.068
X2	-0.011	1.000	0.029	-0.054
Y1	-0.071	0.031	0.984	-0.909
Y2	-0.079	-0.004	0.959	-0.874
Y3	-0.092	0.056	0.966	-0.907
Z1	0.038	0.007	-0.677	0.821
Z2	0.070	-0.020	-0.850	0.921
Z3	0.069	-0.115	-0.905	0.910

© SmartPLS v.4.1.1.2

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion

Copy to Excel/Word Copy to R

	X1	X2	Y1	Z
X1	1.000			
X2	-0.011	1.000		
Y1	-0.083	0.029	0.970	
Z	0.068	-0.054	-0.925	0.885

SmartPLS v.4.1.1.2

Reset 100%

Uji Composite Reability, Cronbach Alpha dan Average Variance Extracted

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm

Construct reliability and validity - Overview

Copy to Excel/Word Copy to R

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho a)	Composite reliability (rho c)	Average variance extracted (AVE)
Y1	0.968	0.969	0.979	0.941
Z	0.862	0.883	0.916	0.784

SmartPLS v.4.1.1.2

Reset 100%

SmartPLS 4

SmartPLS Export Themes

Edit Save Excel HTML Create data file Compare

PLS-SEM algorithm R-square - Overview Copy to Excel/Word Copy to R

	R-square	R-square adjusted
Y1	0.856	0.854
Z	0.007	-0.002

Graphical output
 Final results

- Path coefficients
- Indirect effects
- Total effects
- Outer loadings
- Outer weights
- Latent variables
- Residuals
 - Conditional direct effects
 - Conditional indirect effects

Quality criteria

- R-square
 - Overview
 - R-square - Bar chart
 - R-square adjusted - Bar chart
- F-square
- Construct reliability and validity
- Discriminant validity
- Collinearity statistics (VIF)
- Model fit
- Model selection criteria

Algorithm

- Setting
- Stop criterion changes
- Posthoc minimum sample size
- Execution log

© SmartPLS v. 4.1.1.2 Reset 100%